# PERJALANAN HAJI JAMAAH BANYUWANGI PADA TAHUN 1970 - 1980

## SKRIPSI

Oleh:

Achmad Thoriq

NIM 204104040014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

**2023**

# PERJALANAN HAJI JAMAAH BANYUWANGI PADA TAHUN 1970 - 1980

## SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Program Studi Sejarah Peradaban Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Achmad Thoriq

NIM 204104040014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

**2023**

# PERJALANAN HAJI JAMAAH BANYUWANGI PADA TAHUN 1970 - 1980

## SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Program Studi Sejarah Peradaban Islam


Oleh:

Achmad Thoriq

NIM 20410404001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Disetujui Pembimbing

**Dr. H. Amin Fadlillah, SQ., M.A.**

**NUP. 2013057601**

**PERJALANAN HAJI JAMAAH BANYUWANGI PADA TAHUN 1970-1980**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu

Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Hari: Selasa

Tanggal: 19 Desember 2023

Tim Penguji

| Ketua Sidang | Sekretaris |
|---|---|
| Muhamaad Faiz, Lc., M.A. | Sitti Zulaihah, M.A. |
| NIP.198510312019031006 | NIP. 198908202019032011 |

Anggota:

1. Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I
2. Dr. H. Amin Fadlillah, SQ., M.A

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

**Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.**

NIP.197406062000031003

**MOTTO**

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat"[1]

14:7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Kemnetrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2016), 256

## PERSEMBAHAN

Karya Ini Saya Persembahkan

Untuk kedua orang tua saya atas jerih payah, semangat, dan doanya selama ini,

dan kepada almamater saya Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember,

serta para akademisi dan praktisi sejarah di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# ABSTRAK

Achmad Thoriq. 2023. *Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi pada Tahun 1970-1980*

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang sifatnya wajib dilakukan oleh orang yang mampu. Ibadah haji berlangsung pada bulan Dzulhijjah, dan memiliki serangkaian peribadatan didalamnya. Indonesia yang merupakan penyumbang jamaah haji terbanyak setiap tahunya, dan memiliki kisah menarik tentang perjalanan haji dilingkup daerah yang ada di Indonesia, Kabupaten Banyuwangi adalah salah satunya yang menyumbang kisah menarik dalam hal perjalanan haji.

Fokus penelitian ini ada tiga, yakni: (1) Bagaimana pelaksanaan ibadah haji sebelum Indonesia merdeka? (2) Bagaimana pelaksaan ibadah haji paska kemerdekaan Indonesia (3) Bagaimana perjalanan Jamaah Haji Banyuwangi dalam melaksakan Ibadah Haji pada tahun 1970-1980?

Dengan adanya fokus penelitian yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian dari penelitian ini untuk mengetahui sejarah dan pelaksanaan ibadah haji pada masa sebelum Indonesia merdeka. Setelah itu mengetahui sejarah dan pelaksanaan dalam malaksanakan ibadah haji paska kemerdekaan Indonesia, dan untuk mengetahui pelaksanaan jamaah haji Baanyuwangi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa metode sejarah. Di dalam metode sejarah, didalamnya akan menyajikan tentang pengumpul sumber sejarah atau heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi atau penulisan suatu penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, perjalanan ibadah haji pada masa sebelum Indonesia merdeka diprakarsai oleh pemerintah kolonial Belanda, dan pada masa ini pemerintah kolonial Belanda membuat semacam kebijakan-kebijakan untuk mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Dimasa selanjutnya yakni pendudukan Jepang tidak tercatat adanya pemberangkatan jamaah haji, hal ini dikarenakan pada masa itu darurat perang. Beranjak paska Indonesia merdeka penyelenggaraan ibadah haji diprakasai oleh pemerintah Indonesia, dan pada masa Orde Baru terciptalah suatu kebijakan tentang transportasi haji. Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji tingkat daerah. Perjalanan haji jamaah Banyuwangi pada tahun 1971 menggunakan jasa dari yayasan Ya Mualim dan menggunakan transportasi berupa kapal laut, serta tercatat pada tahun 1971 merupakan pemberangkatan terakhir dari yayasan Ya Mualim di Banyuwangi. pada tahun 1979 jamaah haji Banyuwangi sudah menggunakan pesawat terbang sebagai transportasi jamaah haji. Akan tetapi, pada tahun ini Muassasah masih belum diberlakukan, dan menggunakan jasa dari syekh. Untuk pendaftaran calon jamaah haji dipegang oleh staf pemerintah daerah.

*Kata Kunci: Ibadah Haji, Kebijakan, Perjalanan*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini diajukan kepada prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember merupakan salah satu syarat menyelesaikan program sarjana.

Dalam proses perjuangan dan kerja keras yang penulis lalui, mengantarkan pada sebuah kesuksesan dalam penulisan skripsi dengan judul "PERJALANAN HAJI JAMAAH BANYUWANGI PADA TAHUN 1970-1980". Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melaikan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan Program Sarjana.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora. Serta seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam para Program Sarjana Fakultas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Dr. Win Usuluddin, M.Hum. selaku Kepala Jurusan Studi Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.
4. Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Atas bimbingan dan motivasi, serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkulian.
5. Bapak Dr. H. Amin Fadlillah, SQ., MA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiranya dalam membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi. Tanpa adanya saran, motivasi, dan bantuan dari beliau skripsi ini tidak akan selesai.
6. Prof. Dr. H. Aminullah Elhady, M.Ag., Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd., Dr. Aslam Sa'ad M.Ag., Ahmad Hanafi, M.Hum., Abdulloh Dardum, M.Th.I., Dahimatul Afidah, M.Hum., Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si., Mahillah, M.Fil.I., Mawardi Purbo Sanjoyo, M.A., Muhammad Faiz, Lc., M.A., Sitti Zulaihah., M.A., Dr.,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Win Usuluddin, M.Hum., Dr. H. Amin Fadlillah, SQ., M.A., Hj. Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarokah, S.Th.I., M.A., Dr. Moh. Salman Hamdani, M.A., Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sosio., dan Syaiful Rijal, S.Ag., M.Pd., serta seluruh jajaran dosen , Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang tulus memberikan ilmunya dan memberi semangat untuk dapat meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.

7. Seluruh pegawai lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Atas informasi-informasi yang diberikan.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis yakni Abah H. Subeki, B.Sc dan Ibu Hj. Sutiyani, yang selalu memberikan doa, semangat, dan usaha serta membiayai dan mendukung penulis dalam menyelesaikan program pendidikan ini.
9. Terimakasih kepada kakak saya yakni Achmad Wasil Mustofa, A.Md.Kes. yang selalu memberikan masukan-masukan dan semangat kepada penulis.
10. Terimakasih kepada seluruh keluarga Bani Musthofa yang selalu membimbing, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

11. Terimakasih kepada Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang memberikan data-data haji guna menunjang penelitian ini.
12. Terimakasih kepada Abah Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa, yang menyempatkan waktunya untuk membantu dan membimbing peneliti dalam proses penelitian dan menemui informan kunci.
13. Terimakasih kepada Kiai Haji Muwafiq Amir pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Makmur (Kebonbejo) Genteng yang menyempatkan waktunya untuk menjadi informan bagi peneliti.
14. Terimakasih kepada Kiai Haji Umar Abdullah pengasuh Pondok Pesantren Cemoro.
15. Terimakasih kepada mahasiswa dengan NIM 204104040034 yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
16. Dan taklupa terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam angkatan 20, khususnya kelas SPI 1, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas sikap solidaritasnya serta kepada semua pihak terlibat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta meluangkan waktunya sehingga terselesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT. Atas segala kekurangan serta kekhilafan yang ada, sepenuh hati penulis minta maaf yang sebesar-besarnya.

Jember, 19 Desember 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL DEPAN** ..... **i**

**HALAMAN JUDUL DALAM** ..... **ii**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **iii**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI** ..... **iv**

**MOTTO** ..... **v**

**PERSEMBAHAN** ..... **vi**

**ABSTRAK** ..... **vii**

**KATA PENGANTAR** ..... **viii**

**DAFTAR ISI** ..... **xiii**

**DAFTAR TABEL** ..... **xvi**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xvii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Konteks Penelitian ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 9

C. Tujuan Penelitian ..... 9

D. Ruang Lingkup Penelitian ..... 10

E. Manfaat Penelitian ..... 10

F. Studi Terdahulu ..... 12

G. Signifikansi Penelitian ..... 15

H. Kerangka Konseptual ..... 16

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

I. Metode Penelitian.....21

J. Sitematika Pembahasan.....26

**BAB II PELAKSANAAN IBADAH HAJI SEBELUM INDONESIA MERDEKA.....28**

A. Tinjauan Umum Ibadah Haji.....28

1. Ibadah Haji.....28

2. Islam di Nusantara.....33

3. Perjanan Ibadah Haji Pra Kolonial.....37

B. Penyelenggaraan Ibadah Haji Masa Kolonialisme di Indonesia.....39

1. Pendudukan Belanda.....39

2. Pendudukan Jepang.....58

**BAB III IBADAH HAJI PASKA KEMERDEKAAN INDONESIA.....62**

A. Permulaan Ibadah Haji Paska Indonesia Merdeka.....62

B. Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Pemerintah Indonesia.....68

C. Ibadah Haji pada Masa Orde Lama.....74

D. Ibadah Haji pada Awal Masa Orde Baru.....79

**BAB IV PERJALANAN HAJI UJUNG TIMUR PULAU JAWA.....89**

A. Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi.....89

B. Peran Para Haji dalam Penyebaran Agama Islam di Banyuwangi.....105

1. Kiai Haji Saleh Lateng.....107

2. Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro.....111

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Kiai Haji Harun Abdullah Tukangkayu ..... 113

**BAB V PENUTUP ..... 119**

A. Kesimpulan ..... 119

B. Saran ..... 121

**DAFTAR PUSTAKA ..... 122**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

**BIOGRAFI PENULIS**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Nama Duta Belanda di Jeddah ..... 50

Tabel 3.1 Data Jamaah Haji Indonesia Tahun 1951-1955 ..... 70

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pengurus Jajasan Muawanah Lil Muslimien Banyuwangi ..... 89

Gambar 4.2 Daftar Nama Jamaah Haji Banyuwangi 1971 ..... 93

Gambar 4.3 Surat Penghargaan Wakil Ketua Palka (7 April 1971) ..... 95

Gambar 4.4 Jamaah Haji Banyuwangi di Maktab Syekh Muhtar Sidayu ..... 97

Gambar 4.5 Sertifikat Syekh Muhtar Sidayu ..... 98

Gambar 4.6 Sertifikat Syekh Madinah ..... 99

Gambar 4.7 Paspor Turis Tahun 1979 Milik KH. Muwafiq Amir ..... 101

Gambar 4.8 Visa Haji dalam Paspor Turis Tahun 1979 Milik

KH. Muwafiq Amir ..... 103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Agama Islam merupakan salah satu agama yang ada di dunia, dan juga merupakan salah satu dari agama Samawi atau agama yang bersumber dari Tuhan atau biasa disebut dengan Agama Langit.[1] Kedatangan Agama Islam di Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan, terdapat berbagai versi masuknya Islam di wilayah Indonesia.[2] Agama Islam merupakan Agama yang kompleks, yang mengatur segala umatnya, Agama Islam memiliki beberapa aturan-aturan di dalamnya, dan juga terdapat rukun-rukun baik Rukun Islam dan Rukun Iman. Rukun Islam terbagi menjadi lima rukun, yang di antaranya yakni pertama membaca syahadat, yang kedua yaitu mengerjakan sholat, selanjutnya nomer tiga yakni membayar zakat, dan nomer empat yaitu menjalankan puasa, serta yang kelima yakni melaksanakan haji. Bentuk rukun Islam yang ke lima yakni Ibadah haji. Ibadah haji merupakan perjalanan mendatangi Baitullah dan tempat tempat tertentu yang masuk kedalam rukun ibadah haji, mendatangi tempat tersebut hukumnya rukun dan tidak dapat dilalai kan. Ibadah haji ini berlangsung pada bulan Dzulhijjah, dan dengan syarat syarat yang sudah ditentukan.[3]

Dalam ajaran Ahlu Sunnah Wal Jama'ah rukun Islam yang kelima ini yakni ibadah haji tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Ibadah haji bersifat wajib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] R. Abuy Sodikin, " Konsep Agama dan Islam," *AL QALAM: Jurnal Kajian Keislaman* 20, No. 97 (April – Juni 2003): 9. (https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i97.643).

[2] Badri Yatim, M.A, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 194.

[3] M Abdurachman Rochimi., *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011), 8.

dilakukan oleh para kaum muslimin jika para muslimin tersebut dikatakan mampu dalam menjalankan ibadah haji. Kata mampu disini mengarah kepada kesiapan seorang muslimin dalam menjalankan ibadah haji, dikarenakan ibadah haji tergolong tidak mudah untuk dilakukan oleh sembarang orang. Mampu dalam artian segi jasmani, rohani, dan juga finansial.[4]

Dalam segi jasmani, seorang yang akan menjalani ibadah haji di bulan Dzulhijjah diharuskan memiliki keadaan fisik yang sehat, hal ini karena dalam melaksanakan ibadah haji, tentunya para jamaah akan mengikuti serangkaian kegiatan yang di rukun kan, dan serangkaian kegiatan tersebut tidaklah mudah dilakukan serta membutuhkan tenaga yang sedikit ekstra. Seperti halnya, *tawaf* mengelilingi Ka'bah, lari lari kecil di bukit Shofa dan Marwah, *wukuf* di padang Arafah dan lain sebagainya. Hal ini membutuhkan tenaga yang tidak sedikit.

Mampu dalam hal rohani juga sangat penting, ke ikhlas an dalam menjalankan ibadah haji tidak bisa dikatakan mudah dilakukan agar mendapatkan predikat haji yang *mabrur*. Secara finansial tentu nya sangat berpengaruh, ibadah haji ini dilakukan di negara Arab Saudi, sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengunjungi tempat haji, terlebih lagi Jamaah dari Indonesia maupun negara di luar dari negara Arab Saudi.

Sejarah perjalanan haji jamaah Indonesia memiliki kisah yang sangat menarik untuk dibahas dan memiliki serangkaian peristiwa sejarah yang sangat panjang dalam segi pelaksanaan kegiatan ibadah haji. Indonesia merupakan negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Zainal, "Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah," *JURIS* 11, No. 2 (Desember 2021): 96. (https://doi.org/10.1234/juris.v11i2.1118).

yang menjadi penganut agama Islam terbesar di dunia sehingga hal tersebut membuat pelaksanaan ibadah haji merupakan isu yang sangat penting bagi dunia sejarah peradaban Islam. Dari masa ke masa Indonesia selalu berada di urutan teratas yang menyumbang jamaah haji terbanyak setiap tahunnya, namun ibadah haji Indonesia tidak baru terjadi ketika Indonesia merdeka melainkan jauh sebelum Indonesia dikatakan merdeka, atau biasa disebut dengan Nusantara.[5]

Golongan masyarakat dari Nusantara yang melaksanakan ibadah haji bukanlah dari golongan jamaah haji, melainkan dari golongan pedagang yang sengaja diutus oleh para sultan atau raja yang dahulu kala menguasai salah satu daerah diwilayah Nusantara. Serta terdapat satu lagi yakni para golongan pelajar yang menuntut ilmu di tanah Arab.[6] Di tengah tengah kesibukan mereka untuk berdagang, menjalankan tugas sultan, dan mencari ilmu pada bulan haji atau Dzulhijjah mereka menyempatkan diri untuk menjalankan ibadah haji.

Pada abad ke 16 masih belum tersedia kapal yang sengaja diperuntukkan sebagai kapal pengangkut jamaah haji. Jamaah haji pada masa tersebut menjalankan ibadah haji tidak bisa menggunakan kapal khusus melainkan harus menggunakan kapal dagang yang dimiliki oleh orang Arab dan India, serta keberadaan kapal dagang dari orang Arab dan India tersebut berada di daerah Singapura. Maka dengan hal ini para jamaah haji harus melakukan perjalanan sampai ke Singapura. Para jamaah haji Indonesia waktu itu sangat gigih dalam menjalankan ibadah haji,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Dalwan Multazami Rohmatullah, "Perjalanan Haji Indonesia di Masa Kolonial," *QALAMUNA* 10, No. 2 (Juli - Desember 2017): 115-116.(https://doi.org/10.37680/qalamuna.v9i02.359).

[6] Iin Hindasah dan Amung Ahmad SM, "Transportasi Jamaah Haji Masa Kolonial Abad XIX," *HISTORIA MADANI. Jurnal Ilmu Sejarah* 2, No.2 (2018): 2. (https://doi.org/10.15575/hm.v2i2.9147).

mereka rela lama dalam perjalanan demi dapat menunaikan ibadah haji. Para jamaah haji bisa menghabiskan waktu tiga sampai empat tahun dalam menjalankan ibadah haji, selama itu banyak yang diantaranya para jamaah yang sambil bekerja mencari sumber penghasilan agar dapat melanjutkan perjalanan dan tak sedikit pula yang menuntut ilmu di negeri orang, sehingga hal tersebut lah yang menjadi mengapa berhaji dimasa itu tergolong sangat lama.[7] Sedangkan normalnya perjalanan haji dapat ditempuh sekitar lima sampai enam bulan perjalanan dari Nusantara ke Jeddah dengan menggunakan pelayaran kapal dagang. Hal ini dapat berlangsung lebih lama ketika bertemu dengan faktor alam, seperti badai maupun penyakit yang melanda.[8]

Masuk kedalam abad ke 17 jamaah haji Nusantara mulai mendapatkan sedikit kerepotan dalam hal perjalanan haji. Hal ini dikarenakan medan pelayaran kapal tidak ada yang langsung menuju ke Hijaz yang merupakan sebuah wilayah di negara Arab Saudi tepatnya di sebelah barat laut dari Arab Saudi. Hal ini disebabkan karena rute pelayaran didominasi oleh kapal kapal Eropa, sehingga hal tersebut yang merepotkan jamaah haji Nusantara kala itu. Karena hal tersebut yang membuat para kapal tidak lagi langsung menuju ke Hijaz dan para jamaah haji harus mengambil rute lain.[9] Pada waktu abad yang bersamaan juga telah berdiri perusahaan dagang asal negeri Belanda yang dikenal dengan *Verenigde Oost-Indische Compagnie* atau biasa disingkat dengan nama VOC, perusahaan dagang asal Belanda tersebut berdiri pada tahun 1602.[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[7] Iin Hindasah dan Amung Ahmad SM, "Transportasi Jamaah Haji," 2.
[8] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial* (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), 2.
[9] Hindasah., 3.
[10] Majid, 48..

Sebelum era kedatangan Belanda, umat Islam di Nusantara menjalankan ibadah haji tanpa ada halangan yang berarti. Semenjak kedatangan Belanda, Belanda mengetahui hasrat umat muslim Nusantara sangat besar dalam menjalankan ibadah haji ini, sehingga Belanda membuat kebijakan-kebijakan yang mempersulit untuk umat muslim Nusantara menjalankan ibadah haji. Kebijakan tersebut bernama Resolusi Haji dan akhirnya lambat laun berubah menjadi Ordonansi Haji.[11]

Pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan-kebijakan dalam hal mengatur keberangkatan ibadah haji masyarakat muslim Nusantara secara umum agar jamaah haji mendapatkan kenyamanan dan merasakan rasa aman selama menjalani ibadah haji di tanah suci, baik dari segi perjalanan dan ibadah. Akan tetapi dilihat dari segi politik pemerintah kolonial Belanda sebenarnya ingin mengatur agar supaya jamaah haji yang sedang pergi berhaji serta mencari ilmu di kota suci agar tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.[12] Dengan hal tersebut pemerintah kolonial Belanda kala itu membuat peraturan kebijakan haji yang pada tahun 1825 terbentuk lah kebijakan haji yang bernama Resolusi Haji. Akan tetapi kebijakan yang dinamakan dengan nama Resolusi haji tidak berjalan dengan maksimal, karena kebijakan ini jamaah haji menganggap bahwa kebijakan ini sangat merugikan sehingga tidak lagi sepenuhnya dipatuhi. Akhirnya pada tahun 1859 pemerintah kolonial Belanda membuat revisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi: Ibadah Haji dengan Misi Tersembunyi Jamaah Haji Indonesia Tahun 1945-1950" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020), 2-3.

[12] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 83.

kebijakan haji yang diberi nama Ordonansi Haji, kebijakan Ordonansi Haji juga diperbaharui pada tahun 1922.[13]

Masa pendudukan Jepang tidak ada kebijakan khusus dalam hal ibadah. Masa pendudukan Jepang tidak mengatur layanan pengangkutan jamaah haji seperti yang dilakukan pada masa pendudukan Belanda. Masa pendudukan Jepang di Nusantara juga tidak ada data yang menyebutkan adanya kapal angkutan jamaah haji yang beroperasi.[14] Dengan masa yang singkat serta kondisi Jepang pada kala itu yang menyebabkan pemerintah Jepang tidak membuat kebijakan kebijakan tentang pemberangkatan ibadah haji di wilayah Nusantara.

Kegiatan ibadah haji Indonesia berlanjut pada tahun 1948. Bagi umat Islam Indonesia ibadah haji bukan hanya sekedar melaksanakan ritus keagamaan, melainkan juga bisa dijadikan sebagai alat politik diplomasi. Pelaksanaan ibadah haji tahun 1948 berkaitan erat dengan nuansa politik diplomasi yang dilancarkan bangsa Indonesia. Dimana pada tahun tersebut, bangsa Indonesia mengirim misi haji untuk pertama kali. Tujuan dalam mengirim misi haji ini untuk menyampaikan mision yang bersifat diplomatis, menarik simpati atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus sebagai bentuk usaha memperoleh pengakuan kedaulatan dengan jalan politik diplomasi.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Orde Lama digantikan dengan Orde Baru, Orde Baru ini berlangsung salama 32 tahun, hal ini terjadi karena pergantian Presiden Indonesia pertama yakni Ir. Soekarno digantikan oleh Soeharto. Kebijakan kebijakan juga mengalami

[13] Iin Hindasah dan Amung Ahmad SM, "Transportasi Jamaah Haji," 8.
[14] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi." 29.
[15] Ibid., 68.

perubahan, banyak yang berubah selama 32 tahun berlangsungnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru atau biasa disingkat dengan nama Orba diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dan berakhir sampai tahun 1998.

Pada tahun 1971 menurut sumber premier yang penulis temukan, jamaah haji Kabupaten Banyuwangi berangkat pergi berhaji terpantau mulai pada tanggal 1 Januari 1971, dari pemaparan dokumentasi pribadi salah satu jamaah haji asal Banyuwangi yakni yang bernama Mugeni dan setelah melaksanakan ibadah haji namanya berubah jadi H. Musthofa Sidik, pada hari tersebut kelompok jamaah haji Banyuwangi berangkat dari Banyuwangi menuju ke Surabaya. Setelah menempuh perjalanan menggunakan kendaraan roda empat, akhirnya jamaah haji Banyuwangi sampai di Surabaya, dan ketika berada di Surabaya, jamaah haji Banyuwangi menetap selama empat hari di asrama haji. Beralih pada tanggal 4 Januari 1971, jamaah haji dari Banyuwangi melanjutkan perjalanan ibadah haji dari Surabaya dengan menaiki kapal dengan nama *"Tjut Njak Dhien"*, rombongan jamaah haji ini berangkat menuju ke Jakarta dan sampai pada tanggal 6 Januari 1971. Pada jam dua siang di hari yang sama para jamaah haji Banyuwangi mulai meninggalkan Jakarta dan sampai di kota Kolombo negara Sri Langka enam hari kemudian yakni pada tanggal 11 Januari 1971. Perjalanan haji jamaah Banyuwangi melanjutkan perjalanannya dari Sri Langka menuju ke Arab Saudi sehari ketika kedatangan jamaah haji di Kolombo Sri Langka yakni pada tanggal 12 Januari 1971. Akhirnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pada tanggal 19 Januari 1971 para jamaah haji dari Banyuwangi telah tiba di pelabuhan Jeddah Arab Saudi. [16]

Dengan demikian perjalaan haji jamaah Banyuwangi pada tahun 1971 masa Orde Baru memakan waktu sembilan belas hari perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi. Pada masa tersebut perjalanan haji masih menggunkan moda transpostasi berupa kapal laut, sehingga hal tersebut yang menjadikan perjalanan haji pada masa itu tergolong lama jika dibandingkan dengan perjalanan haji di masa sekarang. Perjalanan haji pada masa tersebut tidak dilakukan sekali jalan, melainkan harus mampir atau transit di beberapa tempat terlebih dahulu, sebelum menuju ke Arab Saudi.

Berangkat dari gagasan tersebut, penulis menganggap bahwa kajian tentang *"pelaksanaan ibadah haji di tingkat daerah tahun 1970-1980"* ini sangat menarik untuk dikaji dan diangkat serta dikembangkan sebagai karya ilmiah yang menarik dalam dunia Sejarah Peradaban Islam. Adanya kajian tersebut penulis berharap terhadap masyarakat mengetahui tentang bagaimana pendaftaran, pemberangkatan, ibadah haji, dan sampai kembali ke tanah air. Penulis membatasi penelitian ini pada Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten ini merupakan kabupaten paling timur pulau jawa Kabupaten Banyuwangi ini juga memiliki sekelumit cerita unik tentang ibadah haji baik pada masa awal Orde Baru dalam rentan tahun 1970-1980. Maka dalam kesempatan ini penulis akan menulis mengenai sejarah tentang pemberangkatan haji, kebijakan-kebijakan yang ada selama masa awal Orde Baru dalam rentan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Arsip Bani Musthofa: Dokumen pribadi H. Musthofa Sidik, Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Tahun 1971.

tahun 1970-1980 tentang pemberangkatan haji, dan kondisi sosial masyarakat Banyuwangi, serta kondisi pemberangkatan haji di Baanyuwangi dalam sebuah penelitian yang berjudul "Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi pada Tahun 1970-1980".

## B. Fokus Penelitian

Penelitian yang berjudul berjudul "Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi pada Tahun 1970-1980", peneliti akan menetapkan suatu fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji sebelum Indonesia merdeka?
2. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji paska kemerdekaan Indonesia?
3. Bagaimana perjalanan jamaah haji Banyuwangi dalam melaksakan Ibadah Haji pada tahun 1970-1980?

## C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya fokus penelitian yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejarah dan pelaksanaan ibadah haji sebelum Indonesia merdeka.
2. Mengetahui sejarah dan pelaksanaan ibadah haji paska kemerdekaan Indonesia.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan ibadah haji jamaah Banyuwangi tahun 1970-1980.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## D. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat suatu ruang lingkup yang di antaranya yakni ruang lingkup yang bersifat temporal dan ruang lingkup bersifat spasial, adapun penjelasanya sebagai berikut:

1. Ruang lingkup temporal, penulis mengambil pada rentan tahun 1970-1980 yang dimana tahun tersebut masuk kedalam masa awal pemeritahan Orde Baru. Pada rentan tahun tersebut menarik untuk dikaji, dikarenakan dalam rentan tahun 1970-1980 transportasi pemberangkatan ibadah haji mengalami perubahan yang dimana awalnya mengunakan transportasi laut berubah menjadi transportasi udara. Dengan hal tersebutlah yang menjadikan perjalanan haji pada awal masa Orde Baru dalam rentan tahun 1970-1980 menarik untuk dikaji.
2. Ruang lingkup spasial, dalam ruang lingkup ini yang menjadikan penulis tertarik karena kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang memiliki segenap budaya lokal yang ada dan rentan tahun tersebut yakni masa Orde Baru tak sedikit yang masih percaya akan animisne dan dinamisme. Dan juga Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten ujung timur pulau Jawa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini berisi tentang kontribusi yang dapat diberikan setelah selesai melaksanakan suatu penelitian dan penulisan. Hal berikut ini merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tentang "Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi pada Tahun 1970-1980" sebagai berikut:

*a. Manfaat Teoritis*

Manfaat teoritis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi leboh dalam upaya memperkaya bahan informasi, penambahan wawasan, dan pengetahuan didalam bidang sejarah khususnya Ibadah haji masa Orde Baru dalam rentan tahun 1970-1980.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan refrensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan Sejarah Peradaban Islam.

*b. Manfaat Praktis*

Manfaat praktis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, melatih, dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dalam pembahasan mengenai ilmu pengetahuan Sejarah Peradaban Islam dalam bidang Perjalanan haji Indonesia khususnya Kabupaten Banyuwangi, serta untuk menyelesaikan tugas akhir program sarjana.

b. Bagi Masyarakat

Menjadi bahan informasi bagi masyarakat mengenai sejarah perjalanan haji di Indonesia dan memberikan suatu pemahaman kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat tentang ilmu pengetahuan dalam bidang perjalanan haji Indonesia khusunya Kabupaten Banyuwangi.

## F. Studi Terdahulu

Dalam penyusunan sebuah penelitian, penulis akan menjaelaskan hasil penelitian yang sudah tertulis terlebih dahulu dan dengan tema dibidang yang sama. Akan tetapi dalam hal ini penulis melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu dengan adanya hal tersebut akan menggambarkan secara jelas adanya perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Studi terdahulu memiliki peranan yang sangat penting selain sebagai pembanding dengan penelitian sebelumnya, dalam studi pustaka juga berperan sebagai tolak ukur sebuah karya ilmiah agar tidak ada unsur plagiasi dan bersifat orisinil.

Sebuah karya ilmiah atau penelitian yang membahas tentang ibadah haji memang telah banyak dijumpai, setelah melakukan penelusuran dan pencarian sumber penulis menemukan beberapa koleksi yang membahas tentang ibadah haji, dengan diantaranya sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Buku yang ditulis oleh M. Dien Majid dengan judul *"Berhaji di Masa Kolonial"* yang diterbitkan oleh CV Sejahtera di kota Jakarta pada tahun 2008. Buku ini menjelaskan dengan rinci bagaimana perjalanan haji di Indonesia khususnya pada masa kolonial. Didalam buku karangan M. Dien Majid ini menjelaskan cukup rinci bagaimana para jamaah haji Indonesia kala itu melakukan perjalanan haji, mulai dari perjalanan haji menggunakan kapal-kapal dagang, lalu berubah menjadi kapal uap

sampai dengan rinci menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Kolonial Belanda dalam mengatur para jamaah haji Indonesia dengan membuat kebijakan Resolusi Haji dan Ordonasi haji.[17]

2. Skripsi yang ditulis oleh Taufik Ismail dengan judul *"Berhaji Masa Revolusi: Ibadah Haji dengan Misi Tersembunyi Jamaah Haji Indonesia Tahun 1945-1950"* dari Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta pada tahun 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang perjalanan haji jamaah Indonesia paska kemerdekaan Republik Indonesia. Didalam skripsi karya Taufik Ismail ini cukup menjelaskan sejarah bagaimana perjalanan haji paska kemerdekaan, pada tahun 1945-1947 telah terjadi kekosongan pemberangkatan haji jamaah Indonesia karena adanya faktor faktor yang mempengaruhi, yakni faktor fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, agresi militer Belanda, dan bangsa Indonesia sedang tahap penataan negara. Hal tersebut yang menjadikan faktor mengapa pada tahun 1946-1947 terjadinya kekosongan pemberangkatan haji. lalu pada tahun 1948 barulah Indonesia mengirimkan jamaah haji dengan sebuah misi diplomasi didalamnya. Pada tahun 1950 akhirnya ibadah haji diprakarsai oleh pemerintah Indonesia dan memberangkatkan sejumlah 9.933 jamaah. semua hal tersebut mulai dari tahun 1945 sampai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 83.

1950 telah dijabarkan dengan rinci dalam skripsi ini.[18]

3. Skripsi yang ditulis oleh Istikomah dengan judul *"Pelaksanaan Ibadah Haji Abad ke 19 dan Dampaknya Terhadap Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda"* dari Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2017. Skripsi ini menitik beratkan tentang pengaruh jamaah haji Indonesia terhadap masa pemerintahan kolonial Belanda. Dalam skripsi karya Istikomah ini menjelaskan secara rinci tentang kebijakan yang menyulitkan para jamaah haji Indonesia baik yang akan keluar berhaji maupun yang akan masuk lagi ke Indonesia. Perlawanan perlawanan golongan Islam yang dipimpin oleh para haji yang menyebabkan pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke 19 membuat kebijakan-kebijakan yang menyulitkan para jamaah haji untuk dapat menunaikan ibadah haji. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat agar supaya meminimalisir jumlah jamaah haji namun faktanya para jamaah haji merasa tertantang dan jumlah jamaah haji terus meningkat.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Jurnal yang ditulis oleh Dalwan Multazami Rohmatullah dengan judul *"Perjalanan Haji Indonesia di Masa Kolonial"* yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama yang bernama Qalamuna Volume 9 No 2 tahun 2017. Jurnal ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Perjalanan Haji Indonesia di Masa Kolonial. Mulai dari berat

[18] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi." 97-101.

[19] Istikomah, "Pelaksanaan Ibadah Haji Abad Ke 19 dan Dampaknya Terhadap Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda" (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati, 2017), 65.

nya perjalanan, moda transportasi, rintangan-rintangan yang akan dihadapi baik rintangan alam maupun resiko keamanan. Jurnal ini memuat berbagai sumber berupa arsip-arsip dan buku serta jurnal ilmiah sesuai dengan bidang yang ada.[20]

5. Jurnal yang ditulis oleh Iin Hindasah dan Amung Ahmad SM dengan judul *"Transportasi Jamaah Haji Masa Kolonial Abad XIX"* yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Sejarah Historia Madani Volume 2 No 2 tahun 2018. Jurnal ini menjelaskan tentang semua hal yang berkaitan tentang perjalanan haji khususnya pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, lebih khusus lagi dalam masa abad ke 19. Didalam Jurnal ini menjelaskan awal bagaimana perjalanan haji jamaah Indonesia, meskipun tidak diketahui kapan dan siapa yang menjalankan ibadah haji pertama kali dari jamaah Indonesia. Jurnal ini memuat semua tentang hal perkembangan transportasi haji dan kebijakan dari pemerintah Kolonial Belanda, serta terdapat penjelasan tentang ongkos haji dan perusahaan pelayaran yang mengangkut jamaah haji. Fokus dalam karya tulis ilmiah ini adalah tentang transportasi yang digunakan jamaah haji Indonesia pada abad ke 19.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## G. Signifikansi Penelitian

Sejumlah karya ilmiah diatas berbeda dengan apa yang akan penulis teliti. Penelitian penulis berfokus pada masa Orde Baru dan kebanyakan karya ilmiah

[20] Dalwan Multazami Rohmatullah, "Perjalanan Haji Indonesia di Masa Kolonial," 126-127.

[21] Iin Hindasah dan Amung Ahmad SM, "Transportasi Jamaah Haji," 20-21.

diatas menggunakan ruang lingkup temporal pada masa kolonial Belanda. Untuk Skripsi karya Taufik Ismail membahas tentang perjalanan haji pada masa Revolusi dan diakhiri pada tahun 1950, akan tetapi penulis akan mengambil tahun penelitian perjalanan haji pada awal masa Orde Baru yakni dalam rentan tahun 1970-1980.

Selain hal tersebut penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang perjalanan haji khususnya salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yakni Kabupaten Banyuwangi, dan penulis masih belum menemukan penelitian yang spesifik membahas Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi pada Tahun 1970-1980. Bahkan peneliti tidak menemukan penelitian yang meneliti tentang perjalan haji di kabupaten Banyuwangi dalam setiap masa baik masa Kolonial, Revolusi, Orde Lama, Orde Baru, dan sampai pada masa Reformasi.

Dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan akan menjadi sebuah penelitian yang baru ditulis atau diangkat, dan akan membantu memberikan sumbangsih keilmuan dari bidang Sejarah Peradaban Islam khususnya pada masalah perjalanan haji. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mejadi sumber rujukan bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi pada khususnya dan masyarakat Republik Indonesia pada umumnya tentang perjalanan haji yang dilaksanakan pada awal masa Orde Baru dalam rentan tahun 1970-1980 dari sudut pandang perjalanan jamaah haji Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu pembahasan yang berisi tentang penjelasan dari istilah istilah yang terdapat dalam penelitian. Kerangkan konseptual memuat tentang hal yang penting dan pokok yang mejadi pembahasn utama dalam

suatu judul penelitian. Hal ini memiliki tujuan gara supaya tidak adanya kesalah pahaman tentang makna makna istilah yang terdapat didalam suatu penelitian. Berikut merupakan istilah yang digunakan oleh peneliti yakni:

1. Ibadah Haji

Agama Islam merupakan Agama yang kompleks, yang mengatur segala umatnya, Agama Islam memiliki beberapa aturan-aturan didalam, dan juga terdapat rukun-rukun baik Rukun Islam dan Rukun Iman. Rukun Islam terbagi menjadi lima rukun, yang diantaranya yakni pertama membaca syahadat, yang kedua yaitu mengerjakan sholat, selanjutnya nomer tiga yakni membayar zakat, dan nomer empat yaitu menjalankan puasa, serta yang kelima yakni melaksanakan Haji. Bentuk rukun Islam yang ke lima yakni ibadah haji. Ibadah haji merupakan perjalanan mendatangi Baitullah dan tempat tempat tertentu yang masuk kedalam rukun ibadah haji, mendatangi tempat tersebut hukumnya rukun dan tidak dapat dilalai kan. Ibadah haji ini berlangsung pada bulan Dzulhijjah, dan dengan syarat syarat yang sudah ditentukan.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam ajaran Ahlu Sunnah Wal Jama'ah rukun Islam yang kelima ini yakni ibadah haji tidak boleh ditunda tunda pelaksanaannya. Ibadah haji bersifat wajib dilakukan oleh para kaum muslimin jika para muslimin tersebut dikatakan mampu dalam menjalankan ibadah haji. Kata mampu disini mengarah kepada kesiapan seorang muslimin dalam menjalankan ibadah haji, dikarenakan ibadah haji tergolong tidak mudah untuk dilakukan

[22] M Abdurachman Rochimi., *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh*. 8

oleh sembarang orang. Mampu dalam artian segi jasmani, rohani, dan juga finansial.[23]

2. Kebijakan pemeritah

Dalam suatu kelompok sosial pasti terdapat yang namanya kebijakan, kebijakan tersebut ada karena ingin mengatur sekelompok manusia yang ada. Kebijakan ini diguakan untuk memecahkan masalah yang akan atau bahkan sedang dihadapi. Kebijakan juga bersifat mengatur kepentingan masyarakat agar tidak mendapatkan masalah kedepanya.[24] Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tertuju kepada semua lapisan masyarakat yang dinaunginya, maka dari itu kebijakan pemerintah sangat luas cakupanya. Kebijakan ini memiliki tujuan agar supaya hal telah ada menjadi kearah yang lebih baik. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan sedikit menyinggung tentang pemerintah kolonial Belanda, untuk dapat mengatur para rakyat Indonesia dalam urusan ibadah haji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Maka dengan demikian penelitian ini menggunakan teori yang dipaparkan oleh Titmuss yakni teori kebijakan publik. Menurut Titmuss, kebijakan adalah prinsip prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan tertentu. Kebijakan juga senantiasa berorientasi kepada

[23] Zainal, "Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah., 96.

[24] Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), 15.

masalah dan tindakan.[25] Kebijakan ini memiliki tujuan agar supaya hal telah ada menjadi kearah yang lebih baik.

3. Haji Menurut Snouck Hurgronje

Snock Hurgronje merupakan warga negara kebangsaan Belanda, dan namanya tidak asing dalam kolonialisme di Indonesia. Snock Hurgronje memiliki nama samaran yakni H. Abdul Gaffar, dengan nasehat-nasehatnya menjadikan pemerintah kolonial Belanda mendapatkan simpati dari masyarakat Nusantara khusunya yang beragama Islam. Salah satu nasehatnya yakni mengenai kebijakan haji. Snock Hurgronje berpendapat bahwa masyarakat muslim yang ingin berhaji jangan diberikan beban yang lebih apalagi sampai dilarang, hal tersebut berimbas kepada kepercayaan masyarakat Nusantara terhadap pemeritah kolonial Belanda.

Selain karena kewajiban menjalankan rukun Islam yan kelima, menurut pemaparan Snock Hurgroje ada beberapa faktor lainya, yang diantaranya yakni:[26]

a. Bertambahnya kehormatan yang akan dinikmati sesudah kembali ke tanah air.
b. Adanya keyakinan bahwa perjalanan haji merupakan peralihan yang bergendi menuju kehidupan baru dalam keimanan.
c. Atau justru karena beranggapan perjalan tersebut sebagai tamasya ke tanah suci.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisispasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014) 36.
[26] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 103-104.

d. Bahkan banyak orang yang masih juga naik haji pada usia lanjut dengan keinginan untuk meninggal di tanah suci dan dikubur disana.

Dengan hal tersebut terlebih lagi poin nomor satu dan dua menjadikan Snock Hurgronje memiliki pendapat bahwa sebanarnya jamaah haji Nusantara tidak diberikan kerumitan perihal keberangkatan haji. Hal ini dikarenakan, para haji yang telah kembali dari tanah suci dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk dapat mengatur rakyat Nusantara, karena gelar haji yang diterima seseorang dapat membuahkan rasa hormat dan tentunya dihormati oleh masyarakat sekitar.

Kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda akan pemberontakan paska seseorang pergi berhaji tentu saja ada, akan tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan memperketat kebijakan dan memberikan pengawasan-pengawasan terhadap jamaah haji Nusantara seperti menugaskan Konsul/Duta Belanda di Jeddah untuk mengawasi gerak-gerik dari jamaah haji Nusantara agar supaya pemerintah kolonial Belanda dapat mencegah pergerakan yang ditimbulkan atau digelorakan oleh para haji yang menentang kebijakan Belanda.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Teori Arus Balik

Teori arus balik dipaparkan oleh Frederik David Kan Bosch, dalam teori ini F.D.K Bosch menjelaskan bahwa penyebaran agama Hindu Budha di Indonesia merupakan jerih payah dari masyarakat Indonesia di masa lalu.

[27] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*. 83.

Agama Hindu Budha pertama kali dibawa oleh orang India ke Indonesia, akan tetapi terdapat sebuah kasus yang mana orang Indonesia penasaran akan ajaran asli Hindu Budha, sehingga dengan demikian yang menjadikan masyarakat Indonesia kala itu tertarik untuk belajar langsung ke negara asal Hindu Budha yakni di India. Para masyarakat tersebut berangkat ke India dan belajar ilmu ilmu di India dan ketika kembali ke tanah air, para masyarakat yang belajar langsung dari negara India mengajarkan kembali ilmu yang diperoleh kepada masyarakat Indonesia.[28]

Dalam hal ini memiliki kesamaan pola yang dilakukan oleh sekelompok jamaah haji Indonesia. Pada awalnya Islam masuk oleh pendatang baru yang mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Indonesia. Selanjutnya dengan adanya ibadah haji, masyarakat Indonesia mulai dari jaman sebelum kolonial Belanda sampai sekarang mengambil ilmu dan ketika sepulang haji para jamaah mengajar kan ilmu yang sudah didapat kepada masyarakat sekitar. Sampai dengan masa sekarang, banyak dari kalangan haji yang sepulang dari ibadah haji mereka mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam, baik dengan metode pembelajaran, dakwah, dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## I. Metode Penelitian

Metode peneltian pada dasarnya merupakan cara yang bersifat ilmiah untuk mendapatkan data dengan cara mencari suatu tujuan dan kegunaan suatu penelitian.

[28] Nofiyah Mardiyani, Umasih, dan Murni Winarsih, "Materi Sejarah Masa Hindu-Budha dan Penggunaan Sumber Belajar Sejarah dalam Pembelajaran di SMK," *TAMADDUN* 7, No. 2 (Desember 2019): 334. (https://doi.org/10.24235/tamaddun.v7i2.5501).

Terdapat empat kata kunci yang didasarkan oleh hal tersebut. Hal tersebut meliputi cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.[29]

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah skripsi tentang penelitian yang berjudul "Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi pada Tahun 1970-1980" menggunakan sebuah metode penelitian kualitatif berupa metode sejarah. Di dalam metode sejarah, didalamnya akan menyajikan tentang pengumpul sumber sejarah atau heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi atau penulisan suatu penelitian. Adapun langkah langkah yang akan dijalani dalam penulisan suatu penelitian berupa skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Langkah pertama yang akal dilakukan dalam penelitian ini yaitu Heuristik. Heuristik sendiri berasal dari kata Yunani *Hueriskein* yang memiliki arti memperoleh. Heuristik adalah langkah awal dalam penelitian sejarah yang merupakan aktivitas mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang akan dijadikan acuan untuk penelitian yang menggunakan metode sejarah.[30]

Pertama tahapan yang diambil dalam penelitian ini adalah Heuristik, penulis mengambil beberapa sumber yanh dijadikan acuan dalam pembuatan penelitian ini melalui buku buku, arsip, artikel, jurnal, koran yang berhubungan dengan perjalanan haji pada masa Orde Baru dalam rentan Tahun 1970-1980. Dalam tahapan Heuristik ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran atau kerangka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &. D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

[30] Joko Sayono, "Langkah-Langkah Heuristik Dalam Metode Sejarah Di Era Digital,"Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya 15. No.2 (2021): 371. (http://dx.doi.org/10.17977/um020v15i22021p369-376).

pemahaman yang berdasarkan sumber sumber yang relevan dengan penelitian.[31] Terdapat dua klasifikasi sumber yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan suatu penelitian. Berikut adalah sumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

*a. Sumber Primer*

Sumber primer merupakan sumber inti atau sumber utama dalam penelitian yang digunakan peneliti sebagai acuan yang kuat dalam penelitiannya. Seperti arsip, dokumen, foto, wawancara dan lain sebagainya. Dengan kata lain sumber primer ini merupakan sumber yang menyaksikan langsung sebuah peristiwa sejarah atau sebagai pelaku sejarah. Baik berupa lisan, foto, dokumen yang ditulis pada peristiwa sejarah tersebut.[32]

*b. Sumber Sekunder*

Sumber sekunder merupakan sumber pendukung dari sumber primer dalam penelitian. Dalam penelitian sumber sekunder merupakan sumber dari pihak kedua. Sumber sekunder dari penelitian ini berupa buku-buku literatur yang berkaitan tentang peribadahan haji di Indonesia seperti buku Berhaji di Masa Kolonial karya M. Dien Majid, jurnal jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

2. Verifikasi

Sumber sumber data yang sudah terkumpul selanjutnya melalui tahapan kedua yakni Verifikasi atau kritik sumber. Dalam verifikasi data memiliki tujuan agar mendapatkan data sumber yang benar benar valid.[33] Dalam verifikasi data,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995), hlm 90-98
[32] Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2021), 24.
[33] Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode Dan Praktik*, (Gresik: JSI Press, 2020), 80.

tahapan ini memiliki dua kritik sumber yakni kritik intern dan kritik ekstern. Sumber sumber yang sudah penulis kumpulkan lalu selanjutnya diuji dengan serangkaian kritik yang bersifat intern maupun ekteren. Pengertian dari kritik intern dan ekstern adalah sebagai berikut:

*a. Kritik Intern*

Kritik Intern, yakni kritik yang menguji kredibilitas dan keabsahan sumber untuk menggambarkan fakta sejarah yang ada.[34] Kredibilitas semacam ini biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa. Untuk menjalankan kritik intern ini dengan cara membaca, memperlajari, memahami, menelaah secara mendalam terhadap sumber-sumber yang didapatkan tadi. Langkah selanjutnya ialah membandingkan isi sumber satu dengan yang lain guna menemukan keabsahan sumber dan mengambil data yang bisa dipercaya.

*b. Kritik Ekstern*

Kritik Eksten, yakni merupakan kritik untuk menguji keaslian sumber. Untuk melakukan kritik ektern ini, dengan cara pengecekan penerbitan tanggal sumber yang ada. Hal ini bertujuan agar supaya mendapatkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Interpretasi

Tahapan ketiga yakni interpretasi atau penafsiran, sumber sumber yang telah ada atau telah dikumpulkan lalu melalui tahapan interpretasi. Secara terminologi

[34] Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), 105.
[35] Ibid., 105

kata interpretasi ini dapat diartikan yakni menguraikan[36]. Dengan melalui tahapan interpretasi ini penulis memberikan penafsiran terhadap sumber atau data yang diperoleh tentang perjalanan haji jamaah Banyuwangi masa Orde Baru dalam rentan Tahun 1970-1980.

Interpretasi atau penafsiran ini memiliki tujuan untuk memperoleh sejumlah fakta sejarah dari sumber sejarah, setelah itu fakta fakta tersebut disusun menjadi satu kesatuan.[37] Kuntowijoyo membagi interpretasi menjadi dua bagian, yang diantaranya yakni:

*a. Analisis*

Analisis merupakan kegiatan menguraikan dan memaparkan sumber-sumber sejarah yang telah didapatkan untuk kemudian dipastikan bahwa sumber-sumber tersebut telah menjadi fakta yang telah terjadi dalam sebuah peristiwa sejarah.

*b. Sintesis*

Sintesis merupakan kegiatan menyatukan sumber-sumber sejarah yang telah menjadi fakta tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulan.[38]

4. Historiografi

Tahapan selanjutnya yakni Historiografi, Historiografi berasal dari kata *history* atau *historio* yang berarti sejarah, dan *grafi* yang memiliki arti penulisan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 64.

[37] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*., 102.

[38] Ibid., 78-79.

atau deskripsi.[39] Historiografi ini merupakan tahapan terakhir dalam penulisan penelitian yang menggunakan metode sejarah.[40] Historiografi ini merupakan tahapan penulisan sejarah dari sumber sumber yang lolos melalui klasifikasi sebelumnya.

## J. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini memiliki tujuan agar skripsi ini lebih terstuktur, jelas, dan terarah serta tentunya bersifat sistematis. Maka dengan hal ini penyusunan akan dibagi menjadi beberapa bab dan masing masing disetiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab pembahasan yang diantaranya:

1. BAB I

Bab pertama yang berisi pendahuluan, didalam pendahuluan terdapat sembilan sub bab didalamnya, yang diantaranya yakni konteks penelitian, fokus penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terdahulu, signifikansi penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. BAB II

Didalam Bab II ini mulai masuk kedalam pembahasan penelitian, bab dua ini akan membahas dan memaparkan tentang ibadah haji sebelum Indonesia merdeka. Pembahasan dalam bab ini akan dimulai dengan tinjauan umum ibadah haji yang mencakup tentang pengertian ibadah haji, Islam di Nusantara, dan

---

[39] Imas Emalia, *Historiografi Indonesia Sejak Masa Awal Sampai Masa Kontemporer*, (Jakarta: UIN Jakarta Press), 6.

[40] Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 67.

perjalanan ibadah haji pra kolonial. Selanjutnya mebahas tentang penyelenggaraan ibadah haji masa kolonialisme di Indonesia yang didalamnya membahas tentang ibadah haji masa penduduka Belanda dan pendudukan Jepang.

3. BAB III

Selanjutnya pada pembahasan Bab III masih masuk kedalam suatu pembahasan. Dalam Bab tiga ini akan memaparkan perjalanan paska kemerdekaan Indonesia. Pembahasan bab ini akan dimulai dengan pembahasan permulaan ibadah haji paska Indonesia merdeka, penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah Indonesia, ibadah haji pada masa Orde Lama, dan ibadah haji pada awal masa Orde Baru.

4. BAB IV

Pada pembahasan Bab IV akan mendeskrisikan tentang perjalanan haji yang terfokuskan kepada para jamaah dari Kabupaten Banyuwangi. Dalam bab ini akan membahas tentang penjelasan singkat Kabupaten Banyuwangi yang didalamnya akan ada sebuah pembahasan yang berupa gambaran umum Kabupaten Banyuwangi dan sejarah Banyuwangi. Selanjutnya akan membahas tentang peran para haji dalam penyebaran agama Islam di Banyuwangi, dan diakhiri pada pembahasan tentang perjalanan jamaah haji Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. BAB V

Yang terakhir yakni Bab V atau penutup, dalam bab ini berisikan dengan kesimpulan dan saran. Pembahasan pada bab ini memaparkan secara singkat analisa pembahasan dari bab-bab sebelumnya tentang “Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi pada Tahun 1970-1980.”

# BAB II

# PELAKSANAAN IBADAH HAJI SEBELUM INDONESIA MERDEKA

## A. Tinjauan Umum Ibadah Haji

### 1. Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan salah satu dari lima rukun yang ada di agama Islam, ibadah ini berbeda dengan ibadah yang ada dirukun Islam lainya[1]. Selain sifatnya yang opsional atau yang mampu saja, ibadah haji ini juga harus dilaksanakan di negara Arab Saudi bukan seperti ibadah dari rukun Islam yang lainya yang bisa dilaksanakan di negara atau rumahnya sendiri. Kata mampu disini memiliki berbagai macam artian, kelompok Ahlu Sunnah Wal Jama'ah[2] mendeskripsikan kata mampu dalam menjalankan ibadah haji memiliki arti sebagai kesiapan seorang muslimin dalam menjalankan dan melaksanakan ibadah haji ini. Hal tersebut dikarenakan ibadah haji tergolong tidak mudah untuk dilakukan oleh sembarang orang. Kata mampu juga mengacu kepada kesanggupan dalam hal rohani, jasmani, dan tentunya finansial.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kata mampu yang telah disebutkan memiliki artian mampu dalam rohani, jasmani, dan finansial hal ini dikarenakan seorang yang akan menjalani ibadah haji

[1] M Abdurachman Rochimi., *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011), 8

[2] Ahlussunah wal Jama'ah merupakan suatu golongan dari golongan Suni. Kelompok ini biasa dikenal dengan sebutan Aswaja yang dimana golongan ini berpedoman akan akidah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Drs. H.A. Syafii Musthofa HM, *Ahlussunah Wal Jamaah An Nahdliyah* (t.t : t.p, 2016), 1-2.

[3] Zainal, "Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah," *JURIS* 11, No. 2 (Desember 2021): 96. (https://doi.org/10.1234/juris.v11i2.1118).

di bulan Dzulhijjah diharuskan memiliki keadaan fisik yang sehat, hal ini karena dalam melaksanakan ibadah haji, tentunya para jamaah akan mengikuti serangkaian kegiatan yang dirukun kan, dan serangkaian kegiatan tersebut tidaklah mudah dilakukan serta membutuhkan tenaga yang sedikit ekstra. Seperti halnya, *tawaf*[4] mengelilingi Ka'bah, *sa'i* atau lari lari kecil di bukit Shofa dan Marwah, *Wukuf* [5]di padang Arafah dan lain sebagainya. Hal ini membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Mampu dalam hal rohani juga sangat penting, ke ikhlas an dalam menjalankan ibadah haji tidak bisa dikatakan mudah dilakukan agar mendapatkan predikat haji yang *mabrur*[6]. Secara finansial tentu nya sangat berpengaruh, ibadah haji ini dilakukan di negara Arab Saudi, sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengunjungi tempat haji, terlebih lagi Jamaah dari Indonesia maupun negara di luar dari negara Arab Saudi.

Ibadah Haji merupakan ibadah yang bersifat rukun, kata dari haji sendiri diambil pada kata *Al-Hajju* yang dapat diartikan sebagai kata menuju atau mengunjungi. Kata *Al-Hajju* atau haji ini dapat diistilahkan dan memiliki arti berkunjung ke Baitullah dan melaksanakan serangkaian ibadah haji di tempat dan waktu yang telah ditentukan, hal ini tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang telah diperintahkan dan ditetapkan demi mendapatkan ridho Allah SWT.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[4] Tawaf adalah salah satu rukun haji yang dimana para jamaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh putaran.

[5] Wujuf merupakan salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan, jika jamaah tidak melaksanakannya maka haji tersebut tidak sah. Wukuf merupakan serangkaian haji paling penting, yang dimana wukuf merupakan puncak dari rangkaian haji. Wukuf artinya berdiam diri di padang Arafah dengan menggunakan ihram.

[6] Mabrur merupakan istilah kepada para haji yang diterima oleh Allah, gelar haji mabrur tidak ada yang tahu, akan tetapi terdapat beberapa ciri, yakni setelah datang dari tanah suci, haji tersebut lebih dekat dengan Allah (Habluminallah) dan dmendapatkan kehormatan di masyarakat (Habluminannas).

[7] M Abdurachman Rochimi., *Segala Hal Tentang Haji*, 8.

Perintah melaksanakan ibadah haji tidak hanya terdapat pada masa ke Rasullan Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyebarkan ajaran agama Islam di dunia, ibadah haji ke Baitullah merupakan salah satu ritus keagamaan bagi pemeluk agama-agama samawi atau agama yang bersumber dari Tuhan. Nabi sebelum Nabi Muhammad yang menjalankan ibadah haji yakni Nabi Adam, Nabi Adam melaksanakan ibadah haji dengan cara mengelilingi Ka'bah atau *tawaf*.[8] Pada masa Nabi Adam ibadah haji terlaksana dengan sangat sederhana, pada saat itu pelaksanaan ibadah haji Nabi Adam dibimbing oleh malaikat, mulai dari pelaksanaannya dan ucapan doannya. Nabi Adam bertawaf di Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran. Pelaksanaan ibadah haji Nabi Adam terjadi ketika selesai membangun Ka'bah.[9]

Nabi selanjutnya yang melaksanakan ibadah haji adalah Nabi Ibrahim. Dengan berpindahnya Nabi Ibrahim ke Mekkah, tampaknya Nabi Ibrahim sengaja diperintahkan oleh Allah SWT untuk membangun kembali atau merenovasi Ka'bah yang telah runtuh. Dengan bantuan puteranya yakni Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun kembali dan meninggikan ukuran Ka'bah dari semula.[10] Setelah pembangunan Ka'bah selesai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melaksanakan ibadah haji dengan mengelilingi Ka'bah atau *tawaf* sebanyak tujuh putaran, dan disetiap putaran mereka mengusuap *rukn* atau sudut Ka'bah, selanjutnya dilanjutkan dengan menunaikan ibadah sholat di balik *Maqam Ibrahim*, lalu kemudian melakukan *sa'i* atau lari-lari kecil diantara bukit Shafa dan Marwah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Dr. M. Shaleh Putuhena., *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta:LkiS, 2017). 21
[9] Ibid., 22.
[10] Ibid., 26.

Setelah serangkaian hal tersebut, atas petunjuk Malaikat Jibril, mereka diarahkan berangkat ke Mina untuk melempar jumroh dan kemudian dilanjut berkunjung ke Arafah. Setelah pelaksanaan ibadah haji tersebut, di Arafah Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk menyerukan pelaksanaan ibadah haji ke seluruh umat manusia.[11] Beberapa Nabi lainya seperti Nabi Nuh, Hud, Shaleh, dan Syu'aib dikabarkan sudah pernah melaksanakan ibadah haji di Baitullah.[12]

Sebelum masa kerasullan Nabi Muhammad, bangsa Arab yang merupakan bangsa Jahiliah masih memelihara tradisi berhaji ini. Akan tetapi tradisi yang diserukan oleh Nabi Ibrahim diselewengkan oleh para bangsa kaum Jahiliah. Beberapa suku di bangsa Jahiliah menetapkan aturan tradisi haji kepada anggota baru, yang dimana anggota baru yang melaksanakan tradisi haji diharuskan melakukan *tawaf* dengan tanpa busana, baik dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Sedangkan masyarakat yang dihormati di suku tersebut tetap mengenakan pakaian ketika melaksanakan *tawaf*. Akan tetapi, terdapat sebuah aturan baru yang dimana setiap lapisan masyarakat baik dari kaum terpandang maupun biasa, tidak lagi diperbolehkan menggunakan pakaian saat bertawaf. Hal tersebut terjadi karena mereka memiliki pandangan pakaian apapun yang digunakan merupakan hal yang kotor atau tidak suci. Dengan hal tersebut menjelaskan bahwa suku suku Arab dari bangsa Jahiliah masih menggunakan *Millah Ibrahim*[13]. Meski demikian ajaran tersebut disusupi dengan tradisi-tradisi Jahiliah.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Dr. M. Shaleh Putuhena., *Historiografi Haji Indonesia*. 27.
[12] Ibid., 21.
[13] Milah Ibrahim adalah tutunan hidup yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang merupakan dan menjadi pedoman hidup pada masa tersebut.
[14] Putuhena, 29-30.

Pada masa Rasulullah SAW perintah untuk melaksanakan haji diterima pada tahun 6 H/628 M, yakni kurang lebih enam tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada tahun sama ketika firman Allah tersebut datang, Nabi Muhammad dan beserta pengikutnya pada tanggal 6 Dzulqa'dah atau 8 Maret menuju ke Mekkah untuk menjalankan iadah Umrah. Akan tetapi ditengah jalan rombongan Nabi Muhammad diberhentikan oleh kaum musyrik Mekkah, kedua kelompok tersebut melakukan perundingan dan terciptalah perjanjian Hudaibiyah, yang dimana kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad pada tahun tersebut tidak diperkenankan untuk masuk ke kota Mekkah.[15]

Nabi Muhammad SAW dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun 10 H atau 632 M, empat tahun setelah perintah kewajiban ibadah haji yang Nabi Muhammad terima. Haji ini dikenal dengan nama Haji Wada' karena tidak lama setelah itu Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya. Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji dengan tata cara manasik atau tatacara pelaksanaan ibadah haji. Manasik Nabi Muhammad sebagian besar tempat, waktu, dan kegiatanya sama dengan apa yang menjadi Manasik Nabi Ibrahim.[16] Pada masa Rasulullah ini lah, ibadah haji dilakukan dengan lengkap dan memiliki beberapa syarat wajib dan rukun haji, seperti halnya *tawaf, sa'i, wukuf, melempar jumroh, tahalul dan ihram*.[17] Semua syarat tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika Haji Wada'.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Dr. M. Shaleh Putuhena., *Historiografi Haji Indonesia*. 31.
[16] Ibid., 32-34
[17] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi: Ibadah Haji dengan Misi Tersembunyi Jamaah Haji Indonesia Tahun 1945-1950" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020), 21

**2. Islam di Nusantara**

Nama Indonesia merupakan nama yang dikekemukan oleh James Ricarson Logan dan G.W Earl pada tahun 1850. Indonesia pada jaman era sebelum kolonial Belanda dikenal dengan kawasan wilayah Nusantara, Nusantara sendiri bukan hanya meliputi negara Indonesia saja melainkan meliputi seluruh wilayah Asia Tenggara. Nama Nusantara diambil dari bahasa Kawi atau biasa dikenal dengan sebutan Jawa Kuno. Kata nusantara diambil dari dua kata yakni, Nusa dan Antara, kata Nusa memiliki arti Pulau sedangkan kata Antara memiliki arti hubungan. Dengan demikian kata Nusantara dapat diartikan sebagai rangkaian pulau-pulau.[18]

Agama Islam diperkirakan masuk ke kawasan wilayah Nusantara diperkiraakan terjadi pada abad ke-8 M sampai dengan abad ke-9 M. Para penyebar agama Islam di wilayah Nusantara pada kala itu mengarjarkan rasa toleransi yang tinggi dan persamaan derajad. Hal tersebut sangat di terima dengan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat Nusantara. Hal tersebut karena agama yang ada sebelumnya yakni agama Hindu sangat menekankan perbedaan kasta, sehingga hal tersebut menarik perhatian dari kalangan masyrakat Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara tidak secara serentak melainkan terdapat proses yang cukup panjang.[19]

Agama Islam masuk ke pulau Jawa sekitar abad ke-11 M. Hal ini selaras dengan ditemukanya nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, nisan tersebut bertuliskan angka 474 H atau 1082 M.[20] Akan tetapi menurut pemaparan Teguh Fatchur Rozi, S.Hum., M.Pd selaku sekretaris perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[18] Yunani Hasan, "Tinjauan Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau di Indonesia," *CRIKSETRA* 5, No. 10 (Agustus 2016): 125. (http://dx.doi.org/10.36706/jc.v5i2.4809).

[19] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi." 21-22.

[20] Badri Yatim, M.A, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 197.

KOMDA Jawa Timur dalam seminar "Menarasikan Sejarah Islam Indonesia Melalui Data Arkeologis" yang diadakan di Aula Perpustakan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Kamis, 7 September 2023, memaparkan bahwa makam Fatimah binti Maimun harus dikritisi lagi, hal ini selaras dengan kebiasaan para pendatang membawa barang bawaan sakral tak terkecuali dengan nisan. Para pedatang tersebut mebawa nisan untuk mengenang leluhur mereka dan nisan tersebut ditaruh disuatu tempat di Leran Gresik.[21] Hal ini diperkuat dengan sedikitnya atau langka berita Islam di Jawa pada abad ke-11 M sampai dengan abad ke-12 M.

Pada masa keemasan kerajaan besar di Jawa yakni kerajaan Majapahit, ajaran agama Islam di pulau Jawa sudah banyak ditemukan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan nisan-nisan dengan corak Islam yang ditemukan disekitar daerah Troloyo, Trowulan, dan Gresik.[22] Hal ini juga diperkuat dengan sistem pemrintahan dari kerajaan Majapahit yang terkenal dengan toleransinya. Toleransi tersebut tertuang dalam kakawin karangan Mpu Tantular yakni Kakawin Sutasoma, yang dimana pada pupuh 139 bait 5 menjelaskan tentang rasa toleransi.[23] Dengan hal tersebut yang menjadikan agama Islam juga diterima oleh masyarakat, dan dibuktikan pada tahun 1416 terdapat suatu pemukiman muslim baik di kota dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Teguh Fatchur Rozi, S.Hum., M.Pd, *Menarasikan Sejarah Islam Indonesia Melalui Data Arkeologis*, dalam Seminar 7 September 2023 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

[22] Badri Yatim, M.A, *Sejarah Peradaban Islam*. 197

[23] Prasetyo Budi Agung, "Frase Bhineka Tunggal Ika dalam Kakawin Sutasoma", diakses pada 9 Oktober 2023, https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/munas/frase-bhinneka-tunggal-ika-dalam-kakawin-sutasoma/

paling banyak didaerah pesisir dekat dengan pelabuhan yang dimana tempat tersebut merupakan tempat biasanya terjadi Islamisasi.[24]

Pada masa senjakala atau melemahnya kerajaan Majapahit, hal ini menjadi momentum bagi Islam untuk menyebarkan ajaran agama Islam di bumi Jawa. Dengan terbentuknya kerajaan Demak pada kala itu berhasil menggantikan kekuasaan kerajaan Majapahit, sehingga dengan demikian perkemabngan ajaran agama Islam khusunya di pulau Jawa terjadi sangat masif.[25] Peran Walisongo sangatlah berperan penting dalam penyebaran agama Islam, bahkan sosok Walisongo menjadi tokoh sentral dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa.

Indonesia bagian timur khususnya Maluku penyebaran ajaran agama Islam tidak lepas dari pengaruh jalur perdangangan yang terbentang dari pusat pelayaran interasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Penyebaran agama Islam di Maluku ini terjadi pada abad ke-14 M. Pada abad tersebut di Ternate tidak sedikit masyarakatnya menganut agama Islam. Tome Pires memaparkan bahwa kira-kira pada tahun 1460-1465 M masyarakat Maluku mulai masuk kedalam agama Islam. Berbeda dengan di Jawa yang mengalami perpecahan suatu kerajaan, masyarakat Maluku menerima ajaran agama Islam dari jalur perdagangan, dakwah, dan perkawinan.[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Datuk Ri Bandang dan Tunggang Parangan merupakan orang yang pertama kali mengislamkan Kalimantan Timur atau di Kutai. Proses Islamisasi ini terjadi sekitar pada tahun 1575. Beranjak ke daerah Sulawesi khusunya bagian selatan,

---

[24] Badri Yatim, M.A, *Sejarah Peradaban Islam*. 197.
[25] Ibid., 199
[26] Ibid., 199-200

pada abad ke-15 M banyak pedagang-pedagang muslim yang bersinggah didaerah ini. Pada awal abad ke-16 M kerajaan-kerajaan di Sulawesi seperti halnya Gowa dan Tallo masih menjadi kerajaan yang menyembah berhala, akan tetapi tidak sedikit masyarakatnya menganut agama Islam. Pada tanggal 22 September 1605 M, raja-raja dari kerajaan Gowa dan Tallo secara resmi masuk agama Islam.[27]

Proses Islamisasi di Nusantara tergolong berjalan dengan cepat, hal ini dikarenakan para penyebar ajaran agama Islam dan para pemeluk baru agama Islam tidak terjadi guncangan yang dapat menyebabkan permusuhan. Penyebaran agama Islam di Nusantara tergolong sangat damai, dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Terlebih lagi didalam Islam tidak mengenal adanya sistem kasta yang membedakan mereka, sehingga hal tersebut menjadikan masyarakat Nusantara sangat terbuka dengan penyebaran agama Islam. Di Jawa pada khusunya meskipun beragama Hindu yang memiliki beberapa dewa, mereka hanya menyembah satu dewa, seperti halnya raja-raja Majapahit yang menyembah dewa Siwa dan raja Airlangga yang menyembah dewa Wisnu, serta para kaum kasta brahmana yang menaganut agama Budha. Hal tersebut yang menjadikan Islam sangat diterima karena Islam hanya menyambah satu tuhan yakni Allah SWT.

Dengan banyaknya masyarakat Nusantara yang memeluk agama Islam, menjadikan minat para masyarakat Nusantara sangat besar untuk dapat melaksanakan rukun Islam kelima yakni menjalankan ibadah haji. Permulaan perjalanan haji jamaah Nusantara sangat bergantung pada keadaan transpostasi jalur laut antara Nusantara dengan Jazirah Arab. Hubungan antara wilayah ini terjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Badri Yatim, M.A, *Sejarah Peradaban Islam*. 200.

karena jalur pelayaran perdagangan dan berkaitan erat dengan masuknya agama Islam di Nusantara serta pembentukan komunitas muslim di Nusantara.[28]

### 3. Perjalanan Ibadah Haji Pra Kolonial

Dari masa ke masa Indonesia selalu berada di urutan teratas yang menyumbang jamaah haji terbanyak setiap tahunnya, namun ibadah haji Indonesia tidak baru terjadi ketika Indonesia merdeka melainkan jauh sebelum Indonesia dikatakan merdeka, atau biasa disebut dengan Nusantara.[29] Dalam pelaksanaan ibadah haji jamaah Nusantara, masih belum ditemukan sumber primer yang bisa dikatakan sangat kredibel yang menuliskan kapan para jamaah haji dari Nusantara menjalankan ibadah haji. Akan tetapi terdapat sumber sekunder yang menyebutkan bahwa perjalanan pemberangkatan ibadah haji dari arah Nusantara terjadi pada tahun 1521 M. Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal dengan Sunan Gunung Jati melakukan perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. [30]

Golongan masyarakat dari Nusantara yang melaksanakan ibadah haji bukanlah dari golongan jamaah haji, melainkan dari golongan pedagang yang sengaja diutus oleh para sultan atau raja yang dahulu kala menguasai salah satu daerah diwilayah Nusantara. Serta terdapat satu lagi yakni para golongan pelajar yang menuntut ilmu di tanah Arab.[31] Di tengah-tengah kesibukan mereka untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[28] Dr. M. Shaleh Putuhena., *Historiografi Haji Indonesia*. 67

[29] Dalwan Multazami Rohmatullah, "Perjalanan Haji Indonesia di Masa Kolonial," *QALAMUNA* 10, No. 2 (Juli - Desember 2017): 115-116.(https://doi.org/10.37680/qalamuna.v9i02.359).

[30] Achmad Taqiyudin dkk, *Antara Mekkah dan Madinah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009). 204

[31] Iin Hindasah dan Amung Ahmad SM, "Transportasi Jamaah Haji Masa Kolonial Abad XIX," *HISTORIA MADANI. Jurnal Ilmu Sejarah* 2, No.2 (2018): 2. (https://doi.org/10.15575/hm.v2i2.9147).

berdagang, menjalankan tugas sultan, dan mencari ilmu pada bulan haji atau Dzulhijjah mereka menyempatkan diri untuk menjalankan ibadah haji.

Ketika abad ke 16 masih belum tersedia kapal yang sengaja diperuntukkan sebagai kapal pengangkut jamaah haji. Jamaah haji pada masa tersebut menjalankan ibadah haji tidak bisa menggunakan kapal khusus melainkan harus menggunakan kapal dagang yang dimiliki oleh orang Arab dan India, serta keberadaan kapal dagang dari orang Arab dan India tersebut berada di daerah Singapura. Maka dengan hal ini para jamaah haji harus melakukan perjalanan sampai ke Singapura. Para jamaah haji Indonesia waktu itu sangat gigih dalam menjalankan ibadah haji, mereka rela lama dalam perjalanan demi dapat menunaikan ibadah haji. Para jamaah haji bisa menghabiskan waktu tiga sampai empat tahun dalam menjalankan ibadah haji, selama itu banyak yang diantaranya para jamaah yang sambil bekerja mencari sumber penghasilan agar dapat melanjutkan perjalanan dan tak sedikit pula yang menuntut ilmu di negeri orang, sehingga hal tersebut lah yang menjadi mengapa berhaji dimasa itu tergolong sangat lama.[32] Sedangkan normalnya perjalanan haji dapat ditempuh sekitar lima sampai enam bulan perjalanan dari Nusantara ke Jeddah dengan menggunakan pelayaran kapal dagang. Hal ini dapat berlangsung lebih lama ketika bertemu dengan faktor alam, seperti badai maupun penyakit yang melanda.[33]

Masuk kedalam abad ke 17 jamaah haji Nusantara mulai mendapatkan sedikit kerepotan dalam hal perjalanan haji. Hal ini dikarenakan medan pelayaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Iin Hindasah dan Amung Ahmad SM, "Transportasi Jamaah Haji," 2.
[33] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial* (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), 2.

kapal tidak ada yang langsung menuju ke Hijaz yang merupakan sebuah wilayah di negara Arab Saudi tepatnya di sebelah barat laut dari Arab Saudi. Hal ini disebabkan karena rute pelayaran didominasi oleh kapal kapal Eropa, sehingga hal tersebut yang merepotkan jamaah haji Nusantara kala itu. Karena hal tersebut yang membuat para kapal tidak lagi langsung menuju ke Hijaz dan para jamaah haji harus mengambil rute lain.[34] Pada waktu abad yang bersamaan juga telah berdiri perusahaan dagang asal negeri Belanda yang dikenal dengan *Verenigde Oost-Indische Compagnie* atau biasa disingkat dengan nama VOC, perusahaan dagang asal Belanda tersebut berdiri pada tahun 1602.[35]

## B. Penyelenggaraan Ibadah Haji Masa Kolonialisme di Indonesia

### 1. Pendudukan Belanda

Pada masa kolonialisme di Indonesia diawali dengan kedatangan para rombongan bangsa Belanda yang terjadi pada tahun 1596 M dan mendarat di Banten. Para rombongan bangsa Belanda tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman, setelah kedatangan bangsa belanda yang terjadi pada tahun 1596 M ini rentetan peristiwa kolonialisme di Indonesia pun terjadi.[36] Merujuk kepada peribadatan haji, ketika belanda sudah mulai menguasai wilayah Nusantara, pemerintah kolonial Belanda akhirnya mengetahui keinginan masyarakat yang menggebu-gebu dalam melaksanakan ibadah haji, hal ini membuat pemerintah kolonial Belanda ikut campur dalam urusan haji. Nusantara sebagai wilayah jajahan dari pemerintah kolonial Belanda, akhirnya membuat semacam peraturan-peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Iin Hindasah dan Amung Ahmad SM, "Transportasi Jamaah Haji," 3.
[35] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 48.
[36] Djakaria, Sejarah Indonesia II, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm 71

yang menyulitkan para jamaah haji Nusantara kala itu untuk dapat melaksanakan ibadah haji dengan membuat suatu kebijakan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan ibadah haji. [37]

Meskipun demikian hasrat yang ada dalam hati masyarakat sangat besar untuk dapat menjalankan ibadah haji ini, meskipun terdapat peraturan atau kebijakan yang menyulitkan hal tersebut tetap dilewati oleh masyarakat nusantara kala ini, hal ini terjadi karena ibadah haji dipandang sebagai suatu kewajiban dan kiblat bagi seluruh umat Islam.[38] Dengan hal demikian meskipun terdapat suatau kebijakan, tempat yang jauh yang notabene memakan waktu yang tidak sebentar masyarakat Nusantara pada masa tersebut tetap ingin berangkat pergi haji ke tanah suci.

Perjalanan haji jamaah Nusantara pada masa tersebut menggunakan jalur laut untuk menuju ke Mekkah, jalur laut tersebut tidak hanya bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga dapat berlayar dari Singapura dan Malaka. Dengan demikian hal ini mebuat pemerintah Belanda mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun politik.[39] Dengan kejadian inilah yang mebuat pemerintah kolonial Belanda timbul ide untuk membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keberangkatan haji jamaah haji Nusantara.

Kerugian yang didapatkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam segi ekonomi dapat dilihat ketika para jamaah haji Nusantara menggunakan jalur dari Singapura, hal ini dapat merugikan pihak pemerintah Belanda, dikarenakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi," 26
[38] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 81.
[39] Ibid.

kebutuhan-kebutuhan jamaah haji Nusantara dapat dibeli di Singapura, hal ini berdampak kepada perputaran ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Kerugian selanjutnya yakni dalam segi politik, pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan haji yang memiliki tujuan utama agar supaya para jamaah haji Nusantara merasa aman dalam perjalanan atau selama pelaksanaan ibadah haji di Mekkah. Akan tetapi disamping hal tersebut kebijakan kebijakan haji yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda memiliki tujuan politik di dalamnya, dalam konteks politik yang sangat mendasar penerapan kebijakan haji tersebut memiliki tujuan agar para jamaah haji yang menggali ilmu pengetahuan disana yakni di Mekkah para jamaah haji Nusantara tersebut dapat dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda dari hal-hal yang dapat merugikan atau bahkan melawan pemerintah kolonial Belanda.[40]

Pemeritah juga menyadari bahwa kala itu jamaah haji Nusantara dapat bertemu dengan jamaah haji dari berbagai negara dibelahan dunia. Para jamaah tersebut ada yang belajar dan bertukar pemikiran serta memberikan informasi yang berkembang dibelahan dunia Islam lainya. Sehingga haji pada masa pendudukan pemerintah kolonial Belanda selain sebagai konsolidasi politik akan tetapi juga sebagai konsolidasi intelektual. Selain golongan tersebut ada juga yang hanya sekedar menunaikan atau melaksanakan kewajiban ibadah haji.[41]

Kebijakan yang pertama kali dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda tentang pelaksanaan ibadah haji terjadi atau dibuat pada tahun 1825 dengan lahirnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 82-83.
[41] Ibid., 82-83.

kebijakan yang bernama *Resolutie*.[42] Resolusi ini berisi tentang kewajiban para calon jamaah haji yang akan pergi berhaji ke tanah suci agar supaya mebayar uang pas atau paspor haji sebesar 110 gulden.[43] Namun sebenarnya resolusi ini memiliki tujuan utama untuk membatasi para calon jamaah haji untuk pergi berhaji dan mengawasi gerak gerik para jamaah haji[44], hal ini dapat dibuktikan dengan surat-surat rahasia yang dikirim kepada para residen dan para bupati untuk menggunakan pengaruhnya membendung para calon jamaah haji atau para penduduk pribumi untuk melaksanakan ibadah haji.[45]

Pemerintah kolonial Belanda membuat atau mengeluarkan kebijakan berupa Resolusi Haji 1825 ini atas laporan surat dari Residen Batavia yang menyebutkan bahwa terdapat 200 calon jamaah haji mengajukan surat permohonan ke kantor polisi untuk dapat pergi berhaji ke tanah suci. Pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa jumlah tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Ibadah haji pada tahun 1825 yang diikuti oleh 200 calon jamaah haji dari Keresidenan Batavia dan sekitarnya yang tertulis pada laporan Residen Batavia kepada Gubernur Jendral tertanggal 11 Oktober 1825, masyarakat berbondong bondong untuk mendaftar ke kantor polisi dan meminta pas untuk berhaji dengan menggunakan kapal Agbar milik Syekh Umar Bugis.[46] Hal tersebut membuat pemerintah kolonial Belanda mengalami kecemasan dikarenakan bahwa bila pasca melaksanakan ibadah haji dari tanah suci menuju Nusantara, para

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*. 83
[43] M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*. 126.
[44] Majid., 83.
[45] Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 24.
[46] Majid., 88.

golongan haji tersebut motivasi untuk bekerjanya menjadi turun dan hanya fokus beribadah.[47] Jacob Vredenbregt memaparkan bahwa dalam pandangan pemerintah kolonial Belanda, mereka yang kembali menunaikan ibadah haji menjadi orang terpandang dikalangan masyarakat, dan memiliki kekuatan untuk mengumpulkan para masyarakat untuk menentang pemerintah. [48]

Para haji yang telah selesai menunaikan ibadah haji dan pulang ke tanah air akan menanamkan benih benih fanatisme dan hal ini dapat mempengaruhi masyarakat untuk menggoyahkan sendi sendi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang menguasai Nusantara.[49] Hal ini karena para haji lama dalam perjalanan hajinya sehingga menyerap ilmu ilmu dari haji lain diberbagai belahan dunia Islam, para golongan haji tersebut saling bertukar pikiran dan saling belajar yang bersifat lintas budaya sehingga tidak menutup kemungkinan melahirkan pemikiran-pemikiran yang bersifat progresif-radikal yang merupakan pemikiran sebuah kesadaran untuk lepas dari tangan penjajahan.[50] Untuk membendung hal yang dapat membuat pemerintah kolonial Belanda kerepotan menghadapi para haji tersebut, pemerintah kolonial Belanda membuat peraturan atau kebijakan yang mengatur setiap gerak langkah perjalaan ibadah haji.[51]

Resolusi pada tahun 1825 tidak semuanya ditaati oleh para calon jamaah haji Nusantara pada kala itu, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaanya banyak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 84.
[48] Jacob Vredenbregt, Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia" dalam empat karangan di bawah redaksi Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, terj Soedarso Soekarno dan Therisia Slamet (Jakarta: INIS 1997). 8.
[49] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*. 85.
[50] Ibid., 83.
[51] Ibid., 85.

merugikan jamaah haji. Oleh sebab itu yang menjadikan tak sedikit dari jamaah haji Nusantara menggunakan embarkasi atau tempat pemberangkatan jamaah haji untuk menuju ke Arab Saudi menggunakan jalur dari Singapura dan Malaka baik berangkat maupun pulang dari Mekkah.[52] Dengan banyaknya kekurangan dan tidak disenangi oleh para calon jamaah haji Nusantara, akhirnya pemerintah kolonial Belanda merevisi hasil dari kebijakan Resolusi Haji 1825 dengan melakukan penyempurnaan dalam hal yang dianggap lemah. Penyempurnaan kebijakan tersebut terjadi beberapa kali yakni pada tahun 1827, 1830, 1831, 1850, 1859, 1872, dan 1922. Perubahan yang sangat mendasar hanya terdapat dalam kebijakan Ordonansi Haji 1859 dan 1922.[53]

Karena banyak tidak diikuti oleh para calon jamaah haji Nusantara kala itu dan lebih memilih menggunakan tempat pemberangkatan atau embraksi dari Singapura dan Malaka, maka peraturan Resulusi Haji 1825 akhirnya mendapatkan revisi oleh pemerintah kolonial Belanda yakni pada tahun 1827. Pada tahun ini Resolusi Haji mengalami perubahan kebijakan, yang dimana terdapat sebuah keringanan untuk biaya pemberangkatan haji. Keringanan tersebut berupa anak-anak yang umurnya tidak lebih atau dibawah 12 tahun boleh tidak memiliki pas untuk melaksanakan ibadah haji.[54] Kebijakan ini memang membuat peraturan tentang pengurusan perjalan haji menjadi lebih ringan daripada kebijakan sebelumnya, para orang tua bisa mengajak anaknya yang belum genap usia 12 tahun untuk dapat mengikuti orang tuanya melaksanakan ibadah haji di tanah suci tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 83.
[53] Ibid.
[54] Ibid., 90.

harus memikirkan beban biaya seperti yang terjadi pada Resolusi Haji 1825 yang dimana semua golongan jamaah haji Nusantara dipukul rata soal usia para jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci.

Tahun 1831 terdapat suatu revisi tentang kebijakan haji yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dalam Resolusi Haji, dalam kebijakan ini memuat tentang peraturan pembayaran pas haji, yang dimana siapa saja jamaah haji yang tidak membayar uang pas haji sebesar f.110, maka ketika sekembalinya di Jawa maka akan dikenai hukuman berupa denda mebayar sebanyak dua kali lipat harga pas haji yakni sebesar f.220.[55] Kebijakan ini dibuat atas dasar agar supaya para jamaah haji patuh dengan kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda, meskipun terdapat kebijakan-kebijakan tersebut tidak sedikit para jamaah haji yang masih saja melanggar kebijakan tersebut, dengan demikian lah yang menjadikan pemerintah kolonial Belanda kembali merevisi dan mempertegas kebijakan tentang pemberangkatan ibadah haji yakni Resolusi Haji.

Albertus Jacobus Duymaer van Twist merupakan gubernur jendral Hindia Belanda yang ke 50 dan memerintah dalam periode tahun 1851-1856 menggantikan Jan Jacob Rochussen sebagai Jendral Hindia Belanda.[56] Pada tahun 1852 Duymaer mencabut kebijakan Resolusi Haji yang telah ada dan hanya memberlakukan pas jalan haji dan menghapuskan tentang kebijakan denda dua kali lipat pembayaran haji. Pada tahun 1852 Resolusi Haji pada memiliki kebijakan yang mana mengintruksikan kepada kepala pemerintahan di Jawa, Residen Palembang, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 91.

[56]Ensiklopedia Dunia, "Albertus Jacobus Duymaer van Twist", dalam https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Albertus_Jacobus_Duymaer_van_Twist (10 Oktober 2023)

Gubernur Pesisir Barat Sumatera untuk dapat mengawasi dan membuat pelaporan pemberankatan dan kepulangan para jamaah haji Nusantara.[57]

Resolusi Haji yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebelumnya untuk membuat kebijakan mengatur jamaah haji Nusantara dianggap gagal, dengan demikian pemerintah kolonial Belanda memutar otak dan kembali membuat langkah langkah baru untuk dapat mengatur tentang pelaksanaan ibadah haji ini. Pada tahun 1859 pemerintah kolonial Belanda merevisi dan memperbaharui serta mengganti nama kebijakan yang awalnya bernama Resolusi Haji berganti menjadi Ordonansi Haji, tentunya perubahan nama tersebut bukan tanpa alasan, melaikan perubahan kebijakan tersebut dianggap lebih kompleks daripada kebijakan sebelumnya yakni Resolusi Haji.[58] Munculnya kebijakan baru yang dinamakan Ordonansi Haji ini didasari karena banyaknya jamaah haji Nusantara pada kala itu menyalahgunakan gelar hajinya dan tidak sedikit para jamaah haji yang pergi melaksanakan ibadah haji ke tanah suci tidak kembali pulang ke tanah air. Hal tersebut berakibat menimbulkan masalah ekonomi bagi keluarga yang ditinggal untuk pergi berhaji.[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kebijakan yang memuat tentang peraturan pelaksanaan ibadah haji yang bernama Ordonansi Haji ini berbeda dengan apa yang terjadi pada kebijakan Resolusi Haji, perbedaan tersebut yakni kebijakan tentang haji ini untuk pertama kali dimuat kedalam *Staatblad van Nederlandsch-Indie* 6 Juli 1859, Nomor 42, dan dialih bahasakan kedalam bahasa Melayu dan Cina. Kebijakan ini dibuat untuk

[57] Jacob Vredenbregt, Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia". 8.
[58] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi." 29.
[59] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 95.

mempertegas kebijakan-kebijakan haji yang telah dibuat sebelumnya, akan tetapi meskipun sudah dilakukan banyak sekali perubahan kebijakan, tetap saja kebijakan tersebut dirasa masih belum optimal.[60] Ordonansi Haji 1859 ini berisi tentang kebijakan-kebijakan haji yang dibuat oleh peerintah kolonial Belanda yang isinya yakni peraturan pas jalan haji, persyaratan ekonomi, persyaratan administrasi haji, ujian haji, dan juga meliputi denda.[61] Kebijakan dari Ordonansi Haji ini lebih ketat daripada peraturan sebelumnya yakni Resolusi Hajai yang dikeluarkan oleh Gubernur Jendral pemeritah kolonial Belanda.[62]

Terjadinya pembaharuan-pembaharuan kebijakan haji yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda ini tetap saja masih belum optimal dilaksanakan oleh calon atau jamaah haji Nusantara. Meskipun pada tahun 1859 kebijakan haji berubah nama menjadi Ordonansi Haji dan dimasukan kedalam *Staatblad van Nederlandsch-Indie* 6 Juli 1859, Nomor 42, dan kebijakanya lebih diperketat lagi, hal tersebut masih saja tidak dipatuhi oleh keseluruhan jamaah haji Nusantara. Tidak sedikit para calon jamaah haji Nusantara pada kala itu menggunakan embarkasi lain yakni embarkasi Singapura.[63] Dan juga tidak dapat dipungkiri tidak sedikit para calon jamaah haji yang terlantar dan tidak ada uang bekal untuk mencukupi kebutuhan primer mereka dan karena hal tersebut tidak sedikit para calon jamaah haji tidak melanjutakan perjalanannya menuju ke tanah suci. Karena hal tersebut membuat para clon jamaah haji dipaksa untuk tidak melanjutkan perjalannanya ke Mekkah dan hanya sampai di Singapura, setelah itu mereka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 95.
[61] *Staatblad van Nederlandsch-Indie* 6 Juli 1859, No. 42.
[62] Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia." 26.
[63] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi." 29.

kembali pulang ke kampung halaman. *"Haji Singapura"* merupakan istilah atau gelar khusus yang disandingkan ke calon jamaah haji yang hanya sampai di Singapura dan tidak dapat melanjutkan menuju tanah suci.[64]

Atas dasar tersebut pemerintah kolonial Belanda tidak ingin ada jamaah haji Nusantara yang menyandang gelar *"Haji Singapura"*. Dikarenakan tidak sedikit yang mengaku sudah melaksanakan ibadah haji, akan tetapi tidak sampai ke tanah suci dan hanya sampai di Singapura. Karena hal tersbut jamaah haji yang kembali dari perjalanannya dikenakan wajib lapor ke pemerintah kolonial Belanda untuk menentukan murni-tidaknya menyandang gelar haji didepan namanya. Setelah melapor para haji tersebut mendapatkan sertifikat haji dan sesuai dengan surat keputusan kebijakan haji yakni *Staatblad van Nederlandsch-Indie* 6 Juli 1859, Nomor 42, para jamaah haji yang terbukti melanggar akan dikenakan denda gelar haji nya akan dicabut oleh pemerintah kolonial Belanda.[65]

Resolusi Haji dan Ordonansi Haji yang selama ini dibuat dan selalu mendapatkan penyempurnaan yang diberlakukan di daerah Hindia Belanda selama ini masih belum dapat membendung arus dari keinginan masyarakat Nusantara pada kala itu untuk dapat melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dilain sisi pemerintah kolonial Belanda tidak dapat memantau secara langsung jamaah haji dari Nusantara ketika melaksanakan ibadah haji di tanah suci maupun kegiatan lainya selama diluar dari Hindia Belanda dalam konteks ini yakni di negara Arab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 96.
[65] Ibid., 101-102.

Saudi. Dengan hal demikian pada tahun 1872 pemerintah kolonial Belanda akhirnya membuka Kantor Konsulat di Jeddah.[66]

Terbentuknya Kantor Konsulat di Jeddah ini memiliki berbagai tugas didalamnya yang diantaranya yakni memberikan pertolongan dan pengertian kepada jamaah haji Nusantara bahwa mereka berasal dari mana, bagaimana mengurus barang barang milik pribadi atau barang barang milik seseorang yang telah meningal dunia ketika melaksanakan ibadah haji dan harus disampaikan kepada siapa.[67] Dengan keberadaan kantor wakil pemerintah kolonial Belanda di Jeddah diharapkan banyak meberikan sumbangan data tentang pelaksanaan haji jamaah Nusantara pada masa itu dan kegiatan apa saja yang dilakukan jamaah haji Nusantara selain melaksanakan ibadah haji ketika berada di Arab Saudi.[68]

Dengan dibuatnya Kantor Konsulat di Jeddah, seiring berjalannya waktu laporan seputar jamaah haji Nusantara mulai mengalir dengan baik, laporan tersebut mengalir dengan baik ke Hindia Belanda maupun di Kerajaan Belanda. Laporan tersebut berisi tentang data akurat mengenai jumlah haji yang tiba di Mekkah setiap tahunya, kapal-kapal apa saja yang membawa jamaah haji, data para jamaah yang dililit hutang karena kehabisan bekal ketika diperjalanan haji, hal tersebut selalu dilaporkan dalam bentuk laporan tahunan.[69]

Konsulat yang dibuat peerintah koloial Belanda yang berada di Jeddah dibawah naungan dari Departemen Luar Negeri. Alur dari laporan yang dibuat konsulat ini yakni, konsulat membuat laporan lalu mengirimkan data ke De Haag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 120.
[67] Ibid.
[68] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi." 30.
[69] Majid, 120.

Belanda, setelah itu laporan tersebut diteruskan ke Departemen Luar Negeri, setelah itu Departemen Koloni yang menyampaikan laporan tersebut ke Gubernur Jendral.[70] Menurut data dari buku Poitik Islam Hindia Belanda yang ditulis oleh Aqib Suminto memaparkan beberapa nama yang diberikan tugas untuk menjadi konsulat di Jeddah yang diantaranya yakni sebagai berikut:[71]

**Tabel 2.1 Daftar nama Duta Belanda di Jeddah**

| **Konsul/Duta Belanda di Jeddah**<br><br>**1872-1950** | |
|---|---|
| 1. Mr. RW.C. de Menthon Bake<br><br>Beslit Raja no. 20, 7 Februari | 1872-1873 |
| 2. W. Hanegraaff<br><br>Beslit Raja no. 51, 25 Agustus | 1873-1878 |
| 3. J.A. Kruyt<br><br>Beslit Raja no. 31, 12 Agustus | 1878- |
| 4. J.A. de Vieg<br><br>Beslit Raja no. | -1890 |
| 5. H. Spakler<br><br>Beslit Raja no. | 1890-1892 |
| 6. H. Van der Houven van Dordt<br><br>Beslit Raja no. 42, 8 Juni | 1892- |
| 7. G.S Endt<br><br>Beslit Raja no. 23, 27 September | 1892-1894 |

[70] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi." 31.
[71] Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1986). 224

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

| | |
|---|---|
| 8. F.J. Haver Droeze<br>Beslit Raja no. 30, 22 Februari | 1894- |
| 9. hr. Mr. J.E. de Struler<br>Beslit Raja no. 44, 20 September<br>Beslit Raja no. 21, Februari | 1894-1897<br>1895-1897 |
| 10. E. Th. van Delden<br>Beslit Raja no. 146, 15 Februari | 1897-1899 |
| 11. F.G.A. van Delden<br>Beslit Raja no. 44, 11 Desember | 1899-1903 |
| 12. C.Ch. M Honny<br>Beslit Raja no. 44, 11 Desember | 1903-1904 |
| 13. N. Scheltema<br>Beslit Raja no. 31, 3 Agustus | 1905-1911 |
| 14. J. Wolff<br>Beslit Raja no. | 1911-1916 |
| 15. E. Gobee<br>Beslit Raja no. 44, 20 April | 1917-1921 |
| 16. Ch. O. van der Plas<br>Beslit Raja no. 73, 8 Seprember | 1921-1926 |
| 17. D. van der Meulen<br>Beslit Raja no. 46, 4 November | 1926-1931 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

| | |
|---|---|
| 18. C. Adriaanse<br>Beslit Raja no. 29, 19 September | 1931-1939 |
| 19. Dr. H.W. Dingemans<br>Beslit Raja no. 89, 21 Agustus | 1939-1940 |
| 20. D. van der Meulen<br>Beslit Raja no. | 1940-1945 |
| 21. Dr. H.W. Dingemans<br>Beslit Raja no. | 1945-1950 |
| | Arsip Deparlu Belanda<br>di Den Haag, A190,533 |

Sumber: Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1986). 224.

Beberapa nama-nama tersebut yang menjadi konsulat jamaah haji Nusantara yang sedang melaksanakan tanah suci, mereka bertugas untuk mencatat laporan-laporan data yang berkaitan tentang jamaah haji Nusantara lalu dilaporkan ke pemerintah kolonial Belanda seperti yang diterangkan diatas. Dengan adanya Kantor Konsulat di Jeddah ini sangat membantu pemerintah kolonial Belanda untuk dapat memantau secara lansung pergerakan dari para jamaah haji Nusantara yang berada di Arab Saudi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Masalah transpotasi yang digunakan para jamaah haji Nusantara pada kala itu awalnya menggunkan kapal layar yang berupa kapal dagang, dengan menggunkan kapal ini perjalanan haji jamaah Nusantara membutuhkan waktu yang lama yakni kisaran dua atau tia tahun dihabiskan untuk satu perjalanan haji.[72]

[72] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 69.

Sekitar tahun 1852-1858 rata-rata kapal layar mengangkut 2.000 jamaah haji untuk melakukan ibadah haji di tanah suci.[73] Kapal layar ini tidak dilengkapi dengan fasilitas air dan pangan yang cukup untuk melakukan suatu perjalanan jauh. Selain hal tersebut kapal layar ini juga terdapat dampak negatif lainya, yakni dari segi ekonomi yang sangat mahal, biaya perjalanan haji hanya berkisar f.500, dana ini sangat pas-pasan jika digunakan untuk biaya hidup dan membayar kapal dan juga untuk keamanan transportasi berkendara sangat berbahaya jika menggunakan kapal layar atau kapal dagang.[74]

Kapal layar atau kapal dagang akhirya pada akhir abad ke-19 diganti dengan mengguakan kapal uap, dengan terjadinya pergantian tersebut membawa dampak positif bagi para calon dan jamaah haji Nusantara pada kala itu. Untuk aspek keamanan juga sangat baik dikarenakan kapal sudah menggunakan mesin berteknologi baru, hal tersebut juga membuat perjalanan haji tidak mengurah waktu yang lama dan lebih cepat dari sebelumnya yang menggunakan kapal layar. Dibukanya Terusan Suez juga sangat membantu kapal haji untuk dapat masuk ke perairan Nusantara. Dengan keadaan tersebut membuat minat para masyarakat yang ingin berhaji menjadi tinggi bahkan sampai di golongan anak anak dan wanita.[75]

Perkembangan moda transportasi untuk melakukan suatu perjalanan haji terjadi pada tahun 1873.[76] Pada masa ini pemerintah kolonial Belanda memberi kemudahan dan perlindungan terhadap tiga perusahaan yang melayani pelayanan transportasi haji. Ketiga perusahaan tersebut ialah *De Rotterdamsche Lloyd*,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] *Staatblad van Nederlandsch-Indie* 6 Juli 1859, No. 42.
[74] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 69.
[75] Ibid.
[76] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi." 32.

*Stoomvaartmaatschappij Nederland, dan Stoomvaartmaatschappij Oceaan.* Ketiga perusahan tersebut merupakan satu kongsi, yang dinamai dengan *"Kongsi Tiga"*. Kongsi ini ditunjuk oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menganangi proses perjalanan ibadah haji.[77]

Tiga perusahaan yang mendapatkan ijin tersebut memiliki ciri, yang pertama yakni *De Rotterdamsche Lloyd*, sebagian besar kapal dari perusahaan ini melayu ke kapal perusahaan seperti *Slamet, Tabanan, Tambora, Sibayak, Dempo, Indrapura*, dan sebagian kecil lainya menggunakan nama Belanda. Agen dari perusahaan *De Rotterdamsche Lloyd* ini terdapat di kota-kota besar yang tersebar di Nusantara, seperti Batavia, Cirebon, Semarang, Surabaya, Padang, Singapura, Manado, Makasar, dan Medan. Dengan rute pelayaran dari Genoa, Port Said, Colombo, Singapura, Jawa, dan Australia.[78] Perusahaan pengangkut jamaah haji yang kedua yakni *Stoomvaartmaatschappij Nederland* berbeda dari perusahaan *De Rotterdamsche Lloyd* yang menggunakan nama-nama Melayu, perusahaan ini banyak menggunakan nama-nama Belanda, yang diantaranya adalah sebagai berikut: *Vandaal, Grotius, Princes Juliana, Koningin der Nederland, Chistian, Huijgens*. Sepanjang perjalanan kapal tersebut singgah dibeberapa pelabuhan seperti di South Hemton, Aljazair, Tangier, Marsaille, Port Said, Aden, Colombo, Singapura, Jawa, dan Australia. Perusahaan terakhir dari *"Kongsi Tiga"* yakni perusahaan yang menggunakan bendera Inggris di kapalnya, yakni perusahaan yang bernama *Stoomvaartmaatschappij Oceaan*. Perusahaan ini banyak membuka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 52-53.
[78] Ibid., 52.

cabang diberbagai kota, seperti *Maclaine Watson & Co* di Surabaya dan *Mc. Neill & Co* di Cilacap. Perusahaan ini memiliki rute pelayaran antara Eropa sampai Asia Tenggara.[79]

Setelah serangkaian kebijakan tersebut, kebijakan tersebut masih perlu dilakukan penyempurnaan kembali agar supaya jamaah haji Nusantara mengikuti penuh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1922 kebijakan tentang ibadah haji kembali diperbaharui dan disempurnakan untuk kesekian kali. Kebijakan ini bertujuan agar supaya mengambil hati para jamaah haji Nusantara dan jamaah haji Nusantara dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1922 pembaharuan kebijakan Ordonansi Haji berisi tentang pelayanan ibdah haji. Pembaharuan kebijakan ini didasarkan atas desakan dari umat Islam dan organisasi Islam yang ada di Nusantara contohnya Muhammadiyah agar supaya lebih memperhatikan dan melakukan perbaikan atas pelayanan di atas kapal haji. Tuntutan tersebut dinaungkan bukan tanpa alasan, melainkan para jamaah haji yang antusias untuk pergi berhaji semakin banyak akan tetapi tidak diimbangi dengan penambahan dan perbaikan fasilatas diatas kapal haji.[80]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan hal tersebut maka pemerintah kolonial Belanda kembali melakukan serangkaian pembaharuan kebijakan ibadah haji. Ketentuan angkutan ibadah haji tertulis dalam Pelgrim Ordonansi tahun 1922, yang didalamnya terdiri atas IX bab, 74 ayat, yang tertuang dalam *Staatblad van Nederlandsch-Indie* Nomor 698, yang dikenal dengan nama Ordonansi Haji 1922. [81]Didalam kebijakan kali ini memuat

[79] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 53.
[80] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi." 33.
[81] *Staatblad van Nederlandsch-Indie* 1922, No. 689.

atas aturan-aturan pelayaran haji. Dalam hal ini ketentuan dijelaskan tentang penumpang yang pergi menunaikan ibadah haji tidak dibedakan jenis kelamin dan usia. Penumpang kapal dari *"Kongsi Tiga"* tergolong dalam *Pelgrim der laagste klasee* yang berarti penumpang kelas ekonomi dapat menaiki kapal khusus yakni Pelgrimschip dari pelabuhan yang berada di Hindia Belanda. Beberapa embarkasi yang menyediakan karcis adalah pelabukan di Makasar, Surabaya, Tanjung Priok (Jakarta), Emena (Padang), Palembang, dan Sabang. Kapal yang diperkanankan mebawa jamaah haji Nusantara hanya dapat melaju dengan kecepatan 10 mil per jam dan brutonya kurang dari 2500 meter kubik.[82]

Sebagaimana yang tertulis didalam *Staatblad van Nederlandsch-Indie* 1922, No. 689, kondisi dari kapal haji yang digunakan untuk memuat para jamaah haji Nusantara harus memenuhi standar yang ada.[83] Kondisi kapal harus memberikan kenyamanan bagi para jamaah haji Nusantara, dikarenakan kapal tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal para jamaah haji. Maka dengan demikian kapal harus memiliki bagian atas dek yang terbuat dari kayu atau besi, ventilasi yang baik, dan penerangan yang memadai. Perlengkapan seperti baju pelampung, perlengkapan regu penolong, dan inventaris lainya harus selalu dalam kategori standar. Perlengkapan tersebut haruslah diletakkan ditempat yang mudah dijangkau, agar supaya jika sesuatu saat akan dipakai mudah untuk diambil.[84]

Kebutuhan kesehatan para jamaah haji Nusantara tidak kalah jadi perhatian bagi pemerintah kolonial Belanda, terdapat rumah sakit yang baik dan permanen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 105.
[83] *Staatblad van Nederlandsch-Indie* 1922, No. 689.
[84] Majid., 105.

yang berisi dengan enam tempat tidur. Rumah sakit permanen ini lebih dikhususkan untuk para kaum wanita, dikarenakan wanita yang paling rentan dan maka harus dibangu rumah sakit permanen. Rumah sakit tersebut juga harus tahan air dan mudah untuk dapat dibersikan. Serta terdapat ruang isolasi untuk para jamaah haji Nusantara yang tertular penyakit menular. Selain hal tersebut didalam kapal harus memiliki sedikitnya dua ruang untuk awak kapal dan penumpang serta dilengkapi dengan kamar mandi, tempat cuci dan kakus (MCK).[85] Hal tersebut sangat diperhatikan dikarenakan perjalanan haji pada masa itu tidak dalam waktu singkat melainkan dalam waktu yang relatif lama sampai berbulan-bulan. Nahkoda yang tidak melakukan pelayanan yang baik terhadap jamaah haji Nusantara akan didenda sebesar f. 1000.[86]

Pemerintah kolonial Belanda menarik simpatisan umat Islam yang akan menjadi jamaah haji dengan membuat serangkaian kebijakan-kebijakan yang ada berupa Resolusi Haji. Pada awalnya kebijakan tersebut tidak ditaati dengan sungguh sungguh oleh para jamaah haji Nusantara, dikarenakan kebijakan tersebut sangat merepotkan para jamaah haji Nusantara, sehingga para jamaah haji Nusantara lebih memilih embarkasi Singapura atau Malaka untuk dapat melakukan perjalanan haji menuju tanah suci. Namun seiring berjalannya waktu dan penyempurnaan demi penyempurnaan kebijakan haji yang awalnya kebijakan Resolusi Haji 1825 sampai kepada penyempurnaan kebijakan yang bernama Ordonansi Haji 1922, akhirnya para jamaah haji Nusantara memilih menggunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 105-106.
[86] *Staatblad van Nederlandsch-Indie* 1922, No. 689.

embarkasi Hindia Belanda yang disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan perjalanan haji dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda tentang perjalanan ibadah haji.

**2. Pendudukan Jepang**

Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang singkat yakni dalam rentan waktu tiga tahun antara tahun 1942-1945 tepatnya pada pertengahan tahun 1945. Hal ini ditandai dengan menyerahnya kolonial Belanda tanpa syarat kepada pemerintahan Jepang,[87] sehingga hal tersebut mengakhiri kolonialisme yang dilakukan Belanda terhadap Hindia Belanda atau Indonesia. Serentetan kemenangan Jepang yang tergolong sangat cepet di wilayah Asia Tenggara, dan serentetan kemenangan besar tersebut berpuncak pada kemenangan dasyat pendudukan Jepang terhadap wilayah Jawa. Keberhasilan Jepang mengusur koloni barat dan menaklukan Jawa menjadikan dua faktor penting rakyat Indonesia pada kala itu memiliki rasa kekaguman terhadap pendudukan Jepang dan yang paling dominan adalah rasa takut.[88]

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang juga menjalankan *"Politik Islam"*[89] dan juga sebenarnya Jepang khawatir akan ajaran Islam yang sudah mengakar di mayarakat Nusantara. Sejak kedatangan pemerintahan Jepang di pulau Jawa, pemerintah Jepang berulang-ulang menyebutkan kata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010). 11-12.

[88] Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. Daniel Dhakidae, (Jakarta Pusat: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1980), 151.

[89] Sumur Harapan dan Murdisi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, (Jakarta: Insan Cemerlang, 1984), 50.

*"Menghormati dan Menghargai Islam"*, hal ini tentu saja memiliki tujuan untuk dapat menguasai Indonesia khusunya Jawa lebih mendalam lagi[90].

Jepang beranggapan bahwa ajaran agama dan kebudayaanya lah yang paling uggul daripada ajaran agama Islam.[91] Falsafah Jepang yang menyebutkan bahwa mereka merupakan ras pilihan dan memiliki derajat yang lebih tinggi dari yang lain, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan pemikiran Islam. Sehingga hal tersebut menjadikan kebanyakan rakyat Indonesia sukar untuk menerimanya. Konsep kedewaan Jepang bertabrakan langsung dengan iman Islam. Dengan kebiasaan Jepang yang melaukan *Saikerei*[92] atau membungkukan badan menghormat ke kaisar dan memaksa paksa rakyat Indonesia melakukannya, hal ini sangatlah dibenci oleh kaum muslimin Indonesia.[93] Gerakan *Seikerei* sangat menyerupai gerakan *rukuk* disalah satu rukun sholat, hal ini yang membuat masyarakat Islam Indonesia sangat membencinya, mereka beranggapan bahwa gerakan tersebut hanya ditunjukan ketika menghadap ke Tuhan bukan terhadap kaisar atau manusia.[94] Namun demikian pemerintah Jepang tetap kekeh dengan kebijakanya, dan menganggap ras mereka yang paling unggul diantara ras lain, serta pemeritah Jepang beranggapan bahwa penghormatan kepada kaisar berbeda dengan rukuk dengan demikian pemerintah Jepang sama sekali tidak mengahpuskan tradisi Saikeirei bahkan ke orang-orang Islam.[95] Atas dasar tersebut yang menjadikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[90] Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit,* 153
[91] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi." 35.
[92] Saikerei adalah suatu bentuk penghormatan kepada Dewa Matahari dengan membungkukan badan mengarah ke matahari terbit. Saikerei ini dilakukan pada masa pemerintahan Jepang sebagai wujud penghormatan kepada Kaisar Jepang.
[93] Benda, 154
[94] Ibid., 156
[95] Ibid.

pemeritah Jepang memberikan banyak kelonggaran dalam kebijakan-kebijakan agama daripada yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Salah satu kebijakan yang diatur oleh pemerintah kolonial Belanda yakni kebijakan tentang ibadah haji dan ketika kedatangan pemeritah Jepang, kebijakan ibadah haji pada masa pemerintahan Jepang tidak merubah atau merevisi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebelumnya, bahkan pemerintah Jepang juga tidak membuat peraturan baru untuk mengatur kebijakan tentang haji.[96] Jepang juga masih memberlakukan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda berdasarkan aturan peralihan undang-undang bala tentara Jepang no. 1 tahun 1942.[97]

Pada masa pendudukan Jepang, rute pelayaran yang biasa mengantarakan para jamaah haji Nusantara tidak beroprasi. Pada masa pendudukan ini, pemerinah Jepang tidak seperti pemerintah kolonial Belanda, pemerintah pada kala itu tidak mengatur layanan  angkutan jamaah haji. Masa pendudukan Jepang tidak tidak ada data yang menyebutkan tentang adanya kapal angkutan jamaah haji yang beroprasi mengantarakan para jamaah haji Nusantara untuk pergi berhaji ke tanah suci.[98] Organisasi besar Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak terdapat data untuk mengatur dan menyelengarakan perjalanan ibadah haji. Perusahaan kapal swasta yang tidak termasuk kedalam *"Kongsi Tiga"* yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa pendudukan Jepang juga tidak terdapat data yang menulis tentang perjalanan haji jamaah Nusantara menuju tanah suci. Hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[96] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi." 35.
[97] Murdisi., *Lintas Sejarah Perjalanan*, 50.
[98] Ismail.,  36.

ini bia terjadi karena pada kala itu situasi Perang Dunia ke II sedang tidak kondusif, sehingga hal tersebutlah yang menjadikan tidak adanya data yang menyebutkan suatu perjalanan haji.[99]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia." 38.

# BAB III

# IBADAH HAJI PASKA KEMERDEKAAN INDONESIA

## A. Permulaan Ibadah Haji Paska Indonesia Merdeka

Perjuangan rakyat bangsa Indonesia akhirnya membuahkan hasil, selama beberapa abad dijajah oleh bangsa asing, akhirnya bangsa Indonesia dapat menemukan jalan kemerdekaannya. Tanggal 17 Agustus 1945 tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah Indonesia, dengan serangkaian perjuangan yang banyak menimbulkan korban dan jerih payah, pada akhirnya dimenangkan oleh para pejuang rakyat Indonesia. proklamasi kemerdeakaan terkumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, tujuan dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan adalah tercapainya Indonesia merdeka. Proklamasi, adalah suatu simbol yang sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia. Karena dari situlah bangsa Indonesia baru akan dapat menata diri untuk diakui keberadaannya oleh dunia internasional sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri.[1]

Setelah Proklamasi terkumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, semua hal yang ada pada masa sebelumnya baik tatanan negara atau kebijakan dari pemerintahan sebelumnya yakni pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah Jepang semua hal tersebut terputus kan. Indonesia sebagai sebuah negara memiliki tatanan hukum yang terlepas dari tatanan sebelumnya, yang dinamakan dengan tatanan hukum Indonesia, yang berisikan hukum Indonesia, yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Aman, M.Pd, *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1998* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 8

[2] Ibid., 12.

Dengan berdirinya negara Republik Indonesia bukan berati masyakat pada kala itu hidup dengan tenang, mereka harus kembali menghadapi serangan-serangan yang diluncurkan oleh pihak Sekutu. Tugas dari bangsa Indonesia semakin berat, karena harus mempertahankan kemerdekaannya.[3] Hal ini berimbas kepada perjalanan haji jamaah Indonesia. Jamaah haji Indonesia pada kala terpaksa harus menunda keberangkatanya, hal ini dikarenakan serangan demi serangan yang diluncurkan, dan keadaan negara yang tergolong sangat kerepotan mengahadapi Agresi Militer sehingga berimbas kepada kebijakan haji, dan tidak melakukan pemberangkatan haji.[4]

Paska kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah, pemerintahan Indonesia membuat berbagai departemen-departemen gunanya untuk membantu mengurus negara Indonesia, departemen yang terbentuk paska kemerdekan Indonesia diantara lain yakni sebagai berikut:[5]

a. Departemen Dalam Negeri
b. Departemen Luar Negeri
c. Departemen Kehakiman
d. Departemen Keuangan
e. Departemen Kemakmuran
f. Departemen Kesehatan
g. Departeman Pengajara, Pendidikan, dan Kebudayaan
h. Departemen Sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Aman, M.Pd, *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1998* , 21
[4] Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 41.
[5] Aman., 13.

i. Departemen Pertahanan

j. Departemen Perhubungan

k. Departemen Pekerjaan Umum

Para departemen tersebut dibentuk untuk membantu laju kerja negara Indonesia yang baru mendirikan suatu kesatuan negara atau merdeka. Depatermen yang mengurusi tentang kebenrangkatan jamaah haji Indonesia yakni Deprtemen Agama, belum tercipta pada awal pembentukan departemen-departemen negara. Meskipun terdapat *Shumubu* yang merupakan Kantor Urusan Agama atau milik pemerintah Jepang pada masa penjejahanya di Indonesia, hal tersebut tentunya berbeda dengan Departemen Agama bentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun *Shumubu* merupakan cikal bakal Departemen Agama.[6]

Departemen Agama baru berdiri setelah satu tahun Indonesia merdeka yakni pada tahun 1946 tepatnya yakni pada tanggal 3 Januari 1946.[7] Dengan berdirinya Departemen Agama diharapkan dapat mengelola pemberangkatan ibadah haji, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan terciptanya Departemen Agama tidak fokus mengurus atau belum dipersiapkan untuk mengurus urusan hal yang berkaitan dengan pemberangkatan haji. Selain hal tersebut pemerintah Indonesia masih tergolong negara yang baru awal, pemerintah Indonesia masih belum mempunyai transpotasi yang belum memadai untuk dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. Daniel Dhakidae, (Jakarta Pusat: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1980), 157-158

[7] Kementrian Agama Republik Indonesia "Sekilas Tentang Kementrian Agama", dalam https://kemenag.go.id/artikel/sejarah

melaksanakan pemberangkatan haji.[8] Disisi lain dari sektor laut, blokade yang dilakukan angkatan laut Belanda menjaga perairan Indonesia, dan hal tersebut yang menyebabkan kekosongan pemberangkatan haji, serta pada masa itu merupakan masa darurat perang setelah kedatangan Belanda, sehingga pemerintah Indonesia memfokuskan untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari tangan bangsa asing yang menyerang.

Dengan menggunakan perusahaan *Kongsi Tiga* milik Belanda, pemerintah Belanda memakai strategi untuk dapat mengambil hati para masyarakat Indonesia. Belanda pada kala itu mebuka kuota pemberangkatan haji.[9] Ibadah haji selalu menjadi senjata yang sangat efisien untuk mengambil kembali simpatisan rakyat Indonesia yang dikhususkan pada kaum muslimin. Ibadah haji dijadikan alat propaganda bagi pemerintah Belanda, dan hal tersebut selalu berhasil dilakukan, terbukti pada kala itu yakni tahun 1946 terdapat 70 jamaah haji Indonesia melakukan pemberangkatan haji dibawah kepemimpinan pemerintah Belanda.[10]

Salah satu ulama besar Indonesia yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri organisasi Islam terbesar yakni Nahdlatul Ulama memiliki andail sangat besar dalam terciptanya kemerdekaan bangsa Indonesia, dan peranan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya mampu mempertahankan Indonesia yang baru merdeka dari serangan bangsa asing yang akan kembali

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Kees van Dijk, "Perjalanan Jamaah Haji Indonesia" dalam empat karangan di bawah redaksi Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, terj Soedarso Soekarno dan Therisia Slamet (Jakarta: INIS 1997). 102.

[9] Ibid.

[10] Jacob Vredenbregt, "Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia" dalam empat karangan di bawah redaksi Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, terj Soedarso Soekarno dan Therisia Slamet (Jakarta: INIS 1997). 52.

menjajah wilayah Indonesia. Resolusi jihad yang dipaparkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mampu memberikan dorongan kuat kepada rakyat Indonesia agar terlepas dari belenggu penjajahan. [11]

Dengan straegi yang digunakan oleh Belanda yakni yang meberangkatkan jamaah haji Indonesia pada kala itu dan memiliki tujuan untuk dapat mendapatkan kembali simpatisan dari rakyat Indonesia khusunya kaum muslimin,[12] Kiai Haji Hasyim Asy'ari meberikan arahan dan menyiarkan fatwa[13] mengharamkan umat Islam untuk mengikuti kebijakan pemerintah Belanda, hal ini juga termasuk kedalam pelaksanaan ibadah haji. Fatwa yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilakukan pada hari Sabtu, 20 April 1946 dengan dibantu siaran radio, fatwa tersebut berbunyi:[14]

*"Haram bagi umat Islam Indonesia meninggalkan Tanah Air dalam keadaan musuh menyerang untuk menjajah dan merusak agama. Karena itu tidak wajib pergi haji di mana berlaku fardu'ain bagi umat Islam dalam keadaan melakukan perang melawan penjajahan bangsa dan negara"*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beredar dengan luas kepada umat Islam Indonesia pada kala itu. Fatwa tersebut sangat mengakar dengan kuat ke seluruh umat Islam Indonesia, bukan hanya dari kalangan Nahdlatul Ulama, melainkan semua umat Islam Indonesia baik dari kalangan selain organisasi Nahdlatul Ulama. Adanya seruan Kiai Haji Hasyi Asy'ari menjadikan banyak para

---

[11] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi: Ibadah Haji dengan Misi Tersembunyi Jamaah Haji Indonesia Tahun 1945-1950" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020), 38-39

[12] Jacob Vredenbregt, "Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia," 18.

[13] Fatwa adalah nasehat yang diberikan oleh pemuka agama dan berlandaskan pada dasar hukum Islam

[14] Ismail., 39.

tokoh Islam yang akan melakukan pemberangkatan haji dengan menggunakan *Kongsi Tiga* milik pemeritah Belanda, mengurungkan niatnya untuk dapat pergi berhaji ke tanah suci.[15]

Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan pemberangkatan ibadah pada tahun 1948. Akan tetapi pemberangkatan ibadah haji ini bersifat politik, bukan jamaah haji secara umum yang dapat melaksanakan ibadah haji akan tetapi pemerintah Indonesia menunjuk utusannya untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Pemberangkatan ibadah haji ini dinamakan Misi Haji, pada misi kali ini merupakan misi haji pertama Indonesia, pemerintah menunjuk beberapa nama yakni diantaranya adalah sebagai berikut:[16]

a. Moh. Adnan
b. Ismail Banda
c. Saleh Suaidy
d. Samsir Ameh

Sedangkan untuk misi haji kedua Indonesia terjadi pada tahun 1949, dan pemerintah menunjuk beberapa nama yang diantaranya yakni:

a. H. Abd Hamid
b. M. Noor Ibrahimy
c. Prof. Ali Hasjmy
d. Prof. Abdul Kahar Mudzakkir
e. H. Sjamsir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Taufik Ismail, "Berhaji pada Masa Revolusi." 39-40.
[16] Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia." 40.

Misi haji ini disambut dengan hangat oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, dan dengan adanya misi ini bendera Merah-Putih atau bendera Indonesia berkibar untuk pertama kali di Arafah. Dengan adanya pengiriman misi haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda tidak tinggal diam, pemerintah Belanda juga ikut serta mengirimkan para nama yang ditugaskan untuk dapat melaksanakan misi kehormatan. Pemerintah Belanda mengirimkan beberapa nama yang berasal dari Indonesia Timur, yang merupakan negara boneka Belanda yang diciptakan Van Mook paska peristiwa 1945.[17] Raja Arab Saudi mengetahui ini dan tetap bersifat netral dan memperbolehkan kedua pemerintahan ini saling mengirimkan jamaah untuk misi haji.[18]

Setelah rentetan peristiwa pemberangkatan misi haji dari wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, pemberangkatan haji dari Indonesia mulai menemukan titik terang tentang pemberangkatan ibadah haji melalui embarkasi pemerintah Indonesia. Jamaah haji yang mendapatkan pemberangkatan melalui embarkasi pemerintah Belanda paska 1945 menjadapatkan julukan Haji NICA *(Netherlands Indies Civil Administration)*.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## B. Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Pemerintah Indonesia

Setelah pemberangkatan pertama paska Indonesia merdeka yakni dengan misi haji, pemerintah Indonesia mulai membuka kuota untuk memberangkatkan jamaah haji Indonesia dibawah naungan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1950 merupakan tahun dimana pemerintah Indonesia mulai meberlakukan

[17] Jacob Vredenbregt, "Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia," 18.
[18] Ibid., 32.
[19] Kees van Dijk, "Perjalanan Jamaah Haji Indonesia" 102.

pemberangkatan iabdah haji untuk semua rakyat Indonesia yang akan melakukan suatu perjalanan ibadah haji. [20]

Dengan terbukanya kuota haji, para masyarakat muslim Indonesia berbondong-bondong mendaftar namanya agar dapat melaksanakan ibadah haji. Terdapat sekitar 20.000 jamaah yang mendaftar untuk dapat melaksanakan ibadah haji, pemerintah Indonesia hanya dapat membatasi sekitar 10.000 jamaah yang akan pergi berhaji. Dengan demikian berimbas kepada banyak calon jamaah haji yang harus menunggu pemberangkatanya untuk tahun depat dan tidak sedikit para calon jamaah haji menggunakan kuota mandiri bukan dari pemberangkatan yang sudah disediakan oleh pemerintah.[21]

Pada tahun 1950 tercatat bahwa terdapat 9.892 jamaah haji Indonesia yang melakukan perjalanan haji dan ditambah dengan 27 pendamping haji serta 14 tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk menemani para jamaah haji Indonesia. untuk para jamaah haji yang menggunakan pemberangkatan jalur mandiri terdapat sekitar 1.843 jamaah haji.[22] Jamaah haji yang menggunakan kuota mandiri ini banyak ditemukan pada wilayah-wilayah bagian timur pulau Jawa, serta jamaah haji tersebut menggunkan visa umroh dan ziarah, visa-visa tersebut sudah dikenal ketika pada masa pemerintahan kolonial Belanda.[23]

Masalah utama bagi pemerintah Indonesia dalam hal pemberangkatan haji ialah tentang kuota haji. Kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia selalu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Kees van Dijk, "Perjalanan Jamaah Haji Indonesia" 104.
[21] Ibid.
[22] Jacob Vredenbregt, "Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia," 52.
[23] Achmad Nizam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers*, (Jakarta: Nizam Press, 2004), 27.

lebih kecil dari calon pendaftar ibadah haji. Hal ini dikarenakan minat masyarakat yang tinggi untuk dapat pergi berhaji ke tanah suci. Peningkatan demi peningkatan selalu terjadi setiap tahunya. Data antara kuota yang diberikan oleh pemeritah dengan pendaftar dalam rentan tahun 1951-1955 adalah sebagai berikut:[24]

**Tabel 3.1 Data Jamaah Haji Indonesia tahun 1951-1955**

| **Data Jamaah Haji Tahun 1951-1955** | | |
|---|---|---|
| **Tahun** | **Pendaftar** | **Kuota** |
| 1951 | 22.079 | 1.842 |
| 1952 | 11.398 | 11.870 |
| 1953 | 39.777 | 14.031 |
| 1954 | 30.446 | 10.154 |
| 1955 | 111.662 | 10.400 |

Sumber: Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 124.

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kuota yang disediakan oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat memberangkatkan jamaah haji Indonesia. Sangat terpaut jauh antara pendaftar dengan kuota yang sudah disediakan. Hal ini membuktikan bahwa minat jamaah haji Indonesia sangat besar untuk dapat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci akan tetapi pemerintah Indonesia masih belum mempunyai fasilitas yang memadai untuk dapat memberangkatkan semua para calon jamaah haji ditahun yang sama.

Pada tahun 1953-1954 terdapat peristiwa unik yang dimana Kementrian Agama mengumumkan bahwa jamaah haji pada tahun 1953 sangat besar dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 124.

peningkatanya sangat signifikan. Para jamaah haji pada tahun 1953 yang tidak diberangkatkan haji sebanyak 30.00 jamaah. Sehingga demi menghindari kekecewaan, kesulitan, dan lain sebagainya maka pendaftaran jamaah haji hanya dibuka untuk jamaah yang mendaftar pada tahun 1953 dan tidak masuk kedalam kuota yang akan diberangkatkan ke tanah suci. Para jamaah baru yang belum mendaftar tidak diperbolehkan untuk mendaftar pada tahun 1954, karena dikhususkan untuk para jamaah yang tidak dapat kuota pada tahun 1953. Jamaah haji yang tidak mendapatkan kuota tahun 1953 diharuskan untuk tetap mengikuti prosedur yang telah ditentukan sebelumnya, yakni tetap ikut mendaftar pada tahun 1954. Pembaharuan pendaftaran tersebut dimulai pada tanggal 1 November 1953.[25]

Minat masyarakat Indonesia yang sangat besar untuk dapat melaksanakan haji dan pemerintah hanya membatasi kuota yang sedikit jika dibandingkan dengan para calon jamaah haji untuk pergi berhaji, membuat jamaah haji Indonesai tidak senang. Hal ini diperparah dengan beredarnya rumor tentang kuota khusus yang diberikan pemeritah kepada para calon jamaah haji yang memiliki pangkat seperti pegawai negeri, tentara, dan para Veteran perang. Dan juga tak sedikit para calon jamaah haji yang mendapatkan hak istimewa ini dari golongan politik.[26]

Terdapat peraturan atau kebijakan unik tetntang pendaftaran ibadah haji, yang dimana bangsa asing dapat melakukan perjalanan haji menggunakan embarkasi Indonesia. dijelaskan pada intruksi bersama no. 5 tahun 1953, menjelaskan bahwa bangsa asing mempunyai hak yang sama untuk dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] "Djemaah Hadji 1954: Hanja Diambil dari Mereka jg. '53 tidak mendapat kesempatan," *Malang Pos*, 23 Oktober 1953

[26] Kees van Dijk, "Perjalanan Jamaah Haji Indonesia," 104-105.

melaksanakan ibadah haji. Calon jamaah haji bangsa asing juga harus memiliki surat-surat yang lengkap seperti halnya paspor negaranya, dan surat-surat imigrasi Indonesia.[27] Hal ini sangat unik yang dimana para jamaah haji Indonesia banyak yang mendaftar dan tidak sedikit yang tidak mendapatkan kuota, serta tidak mendapatkan undian. Departemen Agama membuka pendaftaran untuk jamaah haji bangsa asing, sekalipun bangsa asing tersebut mengikuti kebijakan-kebijakan yang berlaku.

Pemerintah dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah haji dengan cara sistem undian, sistem ini didasari karena minat jamaah haji Inonesia setiap tahunya selalu bertambah dan daftar tunggu calon jamaah haji semakin panjang, alhasil cara undian ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur keberangkatan haji. Tentunya sistem undian ini menimbulkan rasa iri sesama jamaah haji lainya. Rasa iri tersebut dikarenakan sistem undian ini menggunakan adu nasib dan keberuntungan para jamaah.[28]

Dengan adanya sistem undian ini membuat para jamaah sering sekali mendapatkan kerugian berupa pemerasan. Pada umumnya para jamaah haji ingin cepat menunaikan ibadah haji, sehingga mereka mengambil jalan pintas dengan menggunakan calo haji. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh para oknum-oknum tertentu, sehingga merusak citra pemerintah dan Departemen Agama selaku penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[27] "Aturan Untuk Bangsa Asing jang Akan Naik Hadji 1954," *Malang Post*, 9 Desember 1953

[28] Kees van Dijk, "Perjalanan Jamaah Haji Indonesia," 104.

[29] Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*. 107.

Sejak awal Departemen Agama menekankan syarat-syarat jamaah yang diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon jamaah haji. Seleksi yang dipatenkan oleh Departemen Agama harus diikuti dengan sebenar-benarnya oleh para calon jamaah haji, hal ini berguna untuk meberikan mengidentifikasi para calon jamaah haji agar pengetahuan tentang haji dikatakan cukup. Adapun syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Departemen Agama untuk menyeleksi calon jamaah haji adalah sebagai berikut:[30]

a. Umur 15 tahun
b. Cukup pengetahuan tentang agama Islam dan ibadah haji (manasik haji)
c. Belum pernah menunaikan ibadah haji
d. Melek huruf
e. Berbadan sehat untuk mengurus dirinya sendiri

Pada masa rentan tahun 1950-1959 yang merupakan masa demokrasi liberal, negara Indonesia sering terjadi pergantian kabinet sehingga hal ini mempengaruhi kelancaran proses pembangunan sehingga menyebabkan proses pembangunan tidak berjalan dengan lancar, banyak diantaranya lebih mementingkan kepentingan partainya. Hal ini juga berimbas pada kebijakan haji, kebijakan-kebijakan tentang haji banyak dikeluarkan oleh Departemen Agama, akan tetapi kebijakan tersebut masih melanjutkan tentang kebijakan Ordonansi Haji yang dibikin oleh pemerintah kolonial Belanda, pemerintah Indonesai hanya merevisi kebijakan tersebut.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Jacob Vredenbregt, "Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia," 52.
[31] Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia." 50.

## C. Ibadah Haji pada Masa Orde Lama

Terbentuknya Demokrasi Terpimpin atau biasa dikenal dengan masa Orde Lama diawali pada tahun 1959, nama demokrasi terpimpin dikarenakan Presiden Ir. Soekarno sebagai pemegang kekuasaan penuh pemerintahan Indonesia. Surat mandat Dekrit Presiden Juli 1959 merupakan suatu awal dimana kekuasaan Indonesia masuk pada masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Hal ini diakibatkan karena belum tersusunya Undang-Undang Dasar Negara dan kembali menggunakan UUD 1945 sebagai dasar negara. Karena banyaknya kepentingan-kepentingan politik antar partai dan maraknya pemberontakan serta mengarah pada gerakan separatis, maka terciptalah Dekrit Presiden ini. Konflik antar partai inilah yang menyebabkan keterpurukan dan mengganggu stabilitas nasional pada masa Demokrasi Parlemen.[32]

Dengan berubahnya masa pemerintahan dari parlemen ke pemerintahan terpimpin, hal ini juga mengakibatkan kebijakan haji juga mengalami perubahan. Presiden Ir. Soekarno melakukan bebeberapa reformasi guna mengatur kebijakan haji. Pada masa ini pemeritah mulai mengambil alih dan membatasi ruang gerak dari Panitia Haji Indonesia atau PHI. Panitia Haji Indonesia pada sejak tahun 1950 dianggap sebagai bagian dari semi pemerintah dibawah naungan Departemen Agama sebagai lembaga yang mengurus tentang haji. Namun setelah itu dikeluarkanlah Keputusan Menteri Muda Agama No. 39 Tahun 1959, tentang posisi dan penarikan Panitia Haji Indonesia dibawah naungan Departemen Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Abi Sholehuddin dan Aminuddin Kasdi, "Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965," *AVATARA: e-Jounal Pendidikan Sejarah* 3, No. 1 (Maret 2015): 70. (https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/10726)

Dengan demikian menjadikan Panitia Haji Indonesia tidak diberikan tugas untuk menyelengarakan perjalanan ibadah haji.[33]

Pada tahun 1960 terbentuklah peraturan yang mengatur urusan haji peraturan tersebut tertuang pada Peraturan Presiden No 3 Tahun 1960. Pada tahun ini terbentuklah Panitia Negara Urusan Haji (PANUHAD). Dalam menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut urusan haji, Menteri Muda Agama dan Mentri Luar Negeri dibantu oleh suatu panitia yakni Panitia Negara Urusan Haji (PANUHAD). Berdirinya Panitia Negara Urusan Haji (PANUHAD) ini diharapkan untuk dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri perihal urusan haji. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dilakukan atas dasar diminta maupun inisiatif sendiri.[34]

Pada tahun 1960 yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 1960 pemerintah meberlakukan kembali subsidi kepada calon jamaah haji.[35] Subsidi haji pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada jamaah haji sejak pertama kali pemerintah memberangkatkan jamaah haji, akan tetapi pada tahun 1958 peraturan subsidi tersebut dicabut, dan pada akhirnya setelah dua tahun berselang kebijakan subsidi haji diberlakukan kembali.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Moch. Nur Ichwan, "GOVERNING HAJJ: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior to Reformasi Era," *AL-JAMI'AH: Journal of Islamic Studies* 46, No. 1 (2008): 130. (https://doi.org/10.14421/ajis.2008.461.125-151)

[34] Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, Pasal 4 dan 5.

[35] Ibid., Pasal 3

[36] Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia." 53.

Setelah dua tahun berlangsung yakni pada tahun 1962 Panitia Negara Urusan Haji (PANUHAD) berganti atau berubang menjadi Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (PPPH).[37] Berbeda dengan Panitia Negara Urusan Haji (PANUHAD) yang diberikan tugas untuk memberi pertimbangan mengenai urusan haji, pemerintah meberikan dua tugas penting untuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (PPPH). Dua tugas tersebut yakni adalah sebagai berikut:[38]

1. Tugas jangka pendek, yaitu merumuskan pedoman dan tugas pokok dari masing-masing instansi pemerintah maupun swasta yang terlibat langsung dalam pelayanan penyelenggaraan haji.
2. Tugas jangka panjang, yaitu merevisi Ordonansi Haji 1919 dan peraturan pemerintah kolonial Belanda terkait dengan penyelenggaraan haji yang tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Sejak seteleh berdirinya Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (PPPH), jamaah haji setiap tahunya semakin meningkat, akan tetapi Ongkos Naik Haji (ONH) seiring berjalannya waktu juga ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 1962, biaya Ongkos Naik Haji (ONH) mengalami kenaikan sebesar 45% dari tahun sebelumnya, biaya yang diperlukan yakni 60.000 rupiah untuk sekali pemberangkatan haji. Pada tahun berikutnya biaya Ongkos Naik Haji sebesar Rp. 200.00 naik dengan signifikan yakni 334%. Ditahun 1965 biaya yang diperlukan sangat melesat jauh yakni membutuhkan biaya Rp. 2.260.000.[39] Inflasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia." 54.

[38] Moch. Nur Ichwan, "GOVERNING HAJJ: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior to Reformasi Era," *AL-JAMI'AH: Journal of Islamic Studies* 46, No. 1 (2008): 131. (https://doi.org/10.14421/ajis.2008.461.125-151)

[39] Achmad Nizam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji*. 32-33.

yang dialami oleh negara Indonesia yang menyeabkan biaya Ongkos Naik Haji (ONH) selalu mengalami kenaikan setiap tahunya. Hal ini dilatarbelakangi oleh kekacauan bidang politik dan mempengaruhi sektor ekonomi negara.[40]

Berdirinya Dewan Urusan Haji (DUHA) pada tahun 1964 menggantikan lembaga yang mengurusi tentang ibadah haji yakni Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (PPPH).[41] Pada masa ini cita-cita pemerintah Indonesia untuk mempunyai kapal pemberangkatan haji sendiri mulai terealisasi. Dengan dikeluarkanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 122 Tahun 1964 tentang penyelenggaraan urusan haji, pemerintah berupaya untuk membeli kapal-kapal haji untuk mengangkut jamaah haji Indonesia. Biaya yang digunakan untuk membeli kapal-kapal haji menggunakan biaya dari anggaran belanja Sekretariat Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan yang tertuang pada keputusan nomor enam. [42] Pada tahun yang sama suatu perusahaan bernama PT. Arafat berdiri dan mempunyai tugas untuk bergerak dibidang pelayaran dan khusus melayani tentang perjalanan ibadah haji. PT. Arafat ini berfokus pada perjalanan haji moda transportasi laut, pada tahun yang sama PT. Arafat hanya mampu memberangkatkan 15.000 jamaah haji Indonesia melalui moda transportasi laut.[43]

PT. Arafat didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1964. PT. Arafat berdiri sebagai suatu realisasi yang di cita-citakan oleh bangsa Indonesia bahkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[40] Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia." 55-56.

[41] Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 122 Tahun 1964 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.

[42] Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 122 Tahun 1964 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. Nomor enam.

[43] Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA., "Wacana Pengelolaan Ibadah Haji dibawah Badan Otonom," dalam https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Pengelolaan-Ibadah-Haji-diluar-Kemenag-1435282631.pdf

sebelum merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yakni bangsa Indonesia ingin mempunyai kapal pelayaran haji sendiri tanpa import dari negara lain, hal tersebut telah dicita-citakan sejak tahun 1921.[44] PT. Arafat mempunyai tujuh buah kapal laut sebagai alat moda transportasi pemberangkatan ibadah haji, ke-tujuh kapal laut tersebut memiliki nama yakni sebagai berikut:[45]

1. Tjut Njak Dhien
2. Gunung Djati
3. Ambulombo
4. Belle Abeto
5. Pasific Abeto
6. Le Havre Abeto
7. Mie Abeto

Namun, tidak semuanya milik dari PT. Arafat, kepemilikan dengan milik dari PT. Arafat sendiri hanya tiga kapal laut yakni Tjut Njak Dhien, Gunung Djati, dan Ambulombo. Selain itu kapal yang disebutkan merupakan kapal laut yang masih sewa dan kemungkinan besar disuatu hari kapal laut tersebut nantinya akan di beli. Kapal Gunung Djati dan Ambulombo pada awalnya merupakan kapal milik pemerintah, akan tetapi kapal tersebut diserahkan kepemilikanya kepada PT. Arafat.[46]

Pada bulan September 1965 terjadi peristiwa yang menggemparkan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa tersebut juga bertepatan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Perusahaan Pelajaran Arafat, *Mengenal P.T. Perusahaan Pelajaran Arafat*, (Djakarta: Humas P.T. Perusahaan Pelajaran Arafat, 1968), 6.
[45] Ibid., 9
[46] Ibid.

penyelenggaraan ibadah haji, peristiwa tersebut ialah G30S/PKI. Dengan adanya peristiwa G30S/PKI tidak menggoyahkan iman para jamaah haji Indonesia, para jamaah masih banyak yang melakukan perjalanan hajinya. Tercatat terdapat 15.000 jamaah haji yang berangkat dari total 245.400 jamaah yang mengantri mendapatkan kuota haji. [47]

Dengan adanya paska peristiwa G30S/PKI, terdapat suatu perkembangan dan perubahan stuktur pemerintah, hal ini juga berimbas pada struktuk penyelenggaraan ibadah haji. Perubahan dan perkembangan tersebut tetap megikuti administrasi pemerintah. Dikeluarkanya Keputusan Presiden No. 170 Tahun 1966, Departemen Urusan Haji berganti menjadi Direktorat Jendral Urusan Haji dibawah koordinasi Departemen Agama.[48] Paska peristiwa G30S/PKI, keadaan politik Indonesia menjadi kacau, akan tetapi penyelenggaraan ibadah haji terus berjalan. Terdapat dua perbedaan dalam urusan haji, yang pertama untuk urusan haji daerah pusat diambil alih oleh Direktorat Jendral Urusan Haji, dan yang kedua untuk wilayah daerah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dan kepala staf khusus urusan haji.[49]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## D. Ibadah Haji pada Awal Masa Orde Baru

Orde Lama digantikan dengan Orde Baru, Orde Baru ini berlangsung salama 32 tahun, hal ini terjadi karena pergantian Presiden Indonesia pertama yakni Ir. Soekarno digantikan oleh Jendral Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto. Kebijakan

---

[47] Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*. 124

[48] Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 Tahun 1966 Tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen-Departemen Kabinet Ampera.

[49] Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia." 59.

kebijakan juga mengalami perubahan, banyak yang berubah selama 32 tahun berlangsungnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru atau biasa disingkat dengan nama Orba diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dan berakhir sampai tahun 1998.

Pergantian Orde Lama dengan digantikan oleh Orde Baru dimulai dari peristiwa G30S/PKI, peristiwa ini menjadikan kekuasaan politik Ir. Soekarno menjadi goyah dan akhiranya masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin digantikan. Orde Baru memiliki tekad untuk mengoreksi pemerintahaan Orde Lama, dan ingin mengembalikan pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.[50]

Dengan bergantinya kepemimpinan pemerintahan Indonesia, apalagi kepemindahanya diawali dengan peristiwa yang sangat besar, maka tugas dari kepemimpinan Orde Baru sangatlah rumit. Tugas awal yang dilakukan pada masa Orde Baru yakni memperbaiki tatanan sistem negara paska peristiwa G30S/PKI. Penyelenggaraan haji juga mendapatkan imbasnya, hal tersebut menjadikan dikeluarkanya Keputusan Presiden No. 170 Tahun 1966, Departemen Urusan Haji berganti menjadi Direktorat Jendral Urusan Haji dibawah koordinasi Departemen Agama.[51] Perubahan stuktur dan tata kerja Menteri Urusan Haji mengalihkan penyelenggaraan ibadah haji dibawah wenagan Direktorat Jendral Urusan Haji. Hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia." 59.

[51] Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 Tahun 1966 Tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen-Departemen Kabinet Ampera.

ini juga mengatur tentang besarnya biaya haji, sistem managerial, dan bentuk organisasi.[52]

Departemen Urusan Haji yang digantikan oleh Direktur Jendral Urusan Haji bertugas menyelenggarakan urusan haji pada wilayah pusat, sedangkan untuk tingkat daerah pada masa itu diserahkan kepada bupati atau pemerintah daerah. Hal ini termuat dalam Keputusan Bersama Menteri Urusan Haji dan Menteri dalam Negeri No. 1 dan No. 16 tahun 1965. Pada tahun 1968 terbentuknya kantor Dinas Urusan Haji disetiap daerah, guna untuk mempermudah para calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji. Informasi ini termuat dalam Keputusan Menteri Agama No. 56 Tahun 1967, dan diperkuat lahi dengan keputusan yang dipaparkan oleh Direktur Jendral Urusan Haji, yang termuat dalam Keputusan Direktur Jendral Urusan Haji No.1 Tahun 1968.[53]

Beranjak pada tahun 1969, pada tahun ini pemerintah mengambil alih secara keseluruhan tentang penyelenggaraan urusan haji, hal ini termuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 1969 pada pasal satu.[54] Peralihan ini didasari dengan banyaknya para jamaah haji Indonesia yang telah melunasi biaya Ongkos Naik Haji (ONH), bahkan jumlahnya sampai puluhan ribu jamaah yang sudah melunasi, akan tetapi tidak mendapatkan kuota untuk pergi berhaji. Hal ini dikarenakan para jamaah haji Indonesia tersebut membayar atau melunasi biaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Achmad Nizam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji*. 34.

[53] Sumuran Harahap dan Mursidi, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, (Jakarta: Insan Cemerlang, 1994), 207.

[54] Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 1969 Tentang Keseluruhan Penyelenggaraan Haji Hanya Dilaksanakan Oleh Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan-Ketentuan Dalam Keputusan Presiden Ini.

berhaji pada perusahaan swasta, dan tidak dalam lingkup Direktur Jendral Urusan Haji.[55]

Setelah pemerintah mengambil alih urusan haji, pemerintah menetapkan Ongkos Naik Haji (ONH), dan biaya tersebut terpampang pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 1969, biaya tersebut harganya selalu mengalami kenaikan setiap bulannya. Keterangan tersebut dapat dilihat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 1969 pasal 3 tentang pembayaran ongkos naik haji.[56]

Untuk jumlah kuota yang diberikan pemerintah dalam musim haji tahun 1969/1970 sebesar 25.000 jamaah yang akan diberangkatkan menuju ke tanah suci. Dan untuk periode selanjutnya yakni pada musim haji 1970/1971 terjadi sebuah peningkatan kuota haji sebanyak 5.000 jamaah haji, jadi total jamaah haji yang berangkat pada tahun 1970/1971 pemerintah menetapkan 30.000 jamaah haji yang dapat menjalankan ibadah haji. Pembagian kuota haji untuk daerah-daerah telah diatur oleh Departemen Agama dalam Direktur Jendral Urusan Haji dengan prosedur yang sudah ditetapkan.[57]

Dengan dikeluarkannya Instrusi Presiden No. 5 Tahun 1971, dalam hal ini mebahas tentang tatacara penyetoran Ongkos Naik Haji (ONH), hal ini berguna untuk memudahkan para xalon jamaah haji untuk dapat melakukan pembayaran biaya haji. Calon jamaah haji langsung menyetorkan Ongkos Naik Haji (ONH)-nya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA., "Wacana Pengelolaan Ibadah Haji,"

[56] Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 1969 Tentang Keseluruhan Penyelenggaraan Haji Hanya Dilaksanakan Oleh Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan-Ketentuan Dalam Keputusan Presiden Ini. Pasal 3.

[57] Ibid., Pasal 2.

langsu ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah, serta tidak perlu menunggu kuota haji. [58]

Pada tahunn 1971 merupakan dimana kuota haji yang sebelumnya diberlakukan pada tahun ini kuota haji ditiadakan.[59] Untuk urusan biaya haji tahun ini terdapat dua biaya yang dapat dipilih oleh para calon jamaah haji Indonesia, biaya tersebut termasuk kedalam transportasi haji. Yang pertama yakni untuk transportasi haji berupa kapal laut, calon jamaah haji perlu mebayar sebesar Rp. 320.000. Opsi selanjutnya yang dapat dipilih oleh calon jamaah haji Indonesia yakni menggunakan opsi transportasi kapal udara atau pesawat terbang, calon jamaah haji yang memilih opsi ini dikenakan biaya sebesar R.p 370.000.[60]

Pada tahun 1973 untuk pertama kali dalam sejarah haji Indonesia, jamaah haji Indonesia banyak yang menggunakan transportasi haji berupa kapal udara atau pesawat terbang dibandingkan dengan transportasi haji kapal laut. Perbandingan penggunaan transportasi haji ini yakni kapal laut dengan pesawat adalah, sebanyak 16.039 jamaah menggunakan kapal laut, sedangkan yang menggunakan transpotasi kapal udara atau pesawat yakni 23.449 jamaah haji Indonesia.[61]

Jamaah haji Indonesia banyak yang menggunakan transpotasi pesawat terbang dikarenakan beberapa faktor, faktor keamanan menjadi faktor utama jamaah haji Indonesia lebih memilih pemberangkatan menggunakan pesawat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1971 Tentang Tambahan/Penyempurnaan Instrusi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahnun 1969

[59] Direktur Jendral Urusan Haji, Keputusan Dirjen Urusan Haji No. 50 Tahun 1971

[60] Untuk mengetahui selegkapnya tentang biaya Ongkos Naik Haji perbulan terpampang dalam Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 1971 Tentang Besarnya Ongkos Haji untuk Tahun 1971/1972.

[61] Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*. 124

terbang. Ditahun 1972, kapal laut dengan nama Gunung Djati mengalami kendala berupa kerusakan kapal, sehingga jamaah haji Indonesia harus menunggu kapal jamaah haji lain. Hal ini menyebabkan para jamaah haji kehabisan bekal untuk bertahan hidup, bahkan tak sedikit jamaah haji yang terlilit hutang. Kapal-kapal laut milik PT. Arafat banyak yang mengalami kerusakan yang sama, sehingga hal tersebut yang menjadikan para jamaah haji Indonesia mulai menggunakan pesawat terbang untuk transportasinya. Disisi lain secara biaya, biaya Ongkos Naik Haji (ONH) yang diperlukan untuk melakukan perjalanan haji, biaya transportasi kapal laut dengan kapal udara atau pesawat hanya terpaut Rp. 22.000, sehingga dengan hal ini banyak jamaah yang memertimbangkan untuk menggunakan transportasi pesawat terbang.[62]

Dengan maraknya penggunaan transpotasi pesawat terbang, terjadi peristiwa yang memilukan bagi penyelenggaraan ibadah haji, yang dimana pada tahun 1974 terjadi kecelakan hebat pesawat haji di Kolombo, Sri Langka. Peristiwa memilukan tersebut terjadi pada tanggal 4 Desember 1974, sebuah pesawat haji Martin Air DC – 8 F 55 menabrak suatu bukit Adam dengan jarak masih sekitar 100 mil dari lapangan terbang Katuyanake Kolombo. Pada peristiwa ini tidak ada tanda kehidupan, pesawat yang mengankut jamaah haji tersebut hancur berkeping-keping dengan total korban 182 jamaah haji, 3 pramugari pesawat, dan 8 kru pesawat. Dengan demikian maka total korban pesawat haji pada tahun 1974 berjumlah 193 korban.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia." 89.
[63] H. Soeharto, *Tragedi Pesawat Haji di Kolombo*, (Surabaya: Penerbit Warga Surabaya, 1979), 143

Peristiwa ini membuat bangsa Indonesia sangat berduka, sehingga pada tanggal 21 Desember 1974 dinyatakan sebagai hari berkabung nasional. Pemerintah negara Sri Langka ikut serta berduka dan menyatakan bahwa peristiwa yang memilukan ini sebagai suatu peristiwa yang besar. Pemerintah Sri Langka dengan rakyatnya menyatakan duka cita, sehingga pada hari-hari duka itu pemerintah dengan rakyat Sri Langka mengibarkan bendera setengah tiang, guna berduka atas terjadinya peristiwa ini.[64]

Empat tahun berselang dari peristiwa jatuhnya pesawat haji di Kolombo tahun 1974, pemerintah Indonesia memutuskan penyelenggaraan ibadah haji hanya menggunakan pesawat terbang, hal ini termuat dalam Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1978. Pada masa itu PT. Arafat sebagai penyelenggara haji menggunakan transportasi laut perusahaan ini sudah kehilangan kepercayaan dari pemerintah Indonesia. Kehilangan kepercayaan ini disebabkan banyaknya jamaah haji yang mengeluh tentang kondisi keamanan kapal pengangkut jamaah haji. Disisi lain PT. Arafat sedang mengalami kesulitan finalsial yang cukup parah dan sedang melakukan usaha penertiban serta kansolidasi perusahaan, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat menyelenggarakan perjalanan ibadah haji.[65]

Dengan terputusnya kerjasama antara pemerintah dengan PT. Arafat sebagai perusahaan pengangkut jamaah haji, pemerintah mempercayaakan pengangkutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[64] Semua cerita tentang peristiwa jatuhnya pesawat haji di Kolombo yang merenggut tidak sedikit nyawa jamaah haji Indonesia dapat dibaca di dalam buku karya H. Soeharto. Buku ini bersifat naratif sehingga kita bisa megikutinya dengan nyaman, buku ini ditulis dengan berciri seperti dialog, Soeharto sebagai penulis menulis buku ini apa adanya seperti yang sumber lisan omongkan, sumber lisan yang digunakan dalam buku ini diambil dari korban peristiwa jatuhnya pesawat haji pada tahun 1978, dan pada masa itu masih ada korban yang selamat. Secara lengkapya bisa membaca dalam H. Soeharto, *Tragedi Pesawat Haji di Kolombo*, (Surabaya: Penerbit Warga Surabaya, 1979), 143

[65] Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1978 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1978/1979.

jamaah haji melalui transportasi udara seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1978 Pasal 1.[66] Empat perusahaan penerbangan dipercaya pemerintah Indonesia untuk mengangkut jamaah haji Indonesia, keempat perusahaan tersebut yakni:[67]

1. PT. Garuda Indonesia
2. Merpati Nusantara Airlines
3. PT. Mandala
4. Bouraq

Akan tetapi keempat perusahaan penerbangan ini masih belum mencukupi untuk mengangkut jamaah haji, sehingga diperlukan pesawat carteran dari luar negeri untuk dapat bisa mengangkut jamaah haji Indonesia. Karena banyaknya jamaah haji yang ingin berangkat ke tanah suci yang menyebabkan empat perusahaan sekaligus tidak bisa mengangkut semua jamaah haji yang ada. Sehinga dibutuhkanlah pesawat tambahan.[68]

Ongkos Naik Haji (ONH) yang diperlukan pada masa itu dengan menggunakan pesawat sebesar Rp. 766.000 sudah termasuk dalam uang bekal kembali untuk jamaah yang berjumlah sebesar Rp. 17.500, pembayaran ini dimulai pada bulan Mei sampai dengan Bulan Agustus. Para calon jamaah haji pada tanggal 31 Agustus 1978 yang belum melunasi setoran Ongkos Naik Haji (ONH) maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1978 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1978/1979.
[67] Sumuran Harahap dan Mursidi, *Lintasan Sejarah*. 283
[68] Ibid.

akan dinyatakan batal dan uang setoran akan dikembalikan, akan tetapi dipotong sebanyak Rp. 25.000.[69]

Peristiwa memilukan yang pernah menimpa jamaah haji Indonesia pada tahun 1974 kembali terulang, peristiwa tersebut terjadi pada tahun diberlakukannya transportasi haji dengan keseluruhan membawa jamaah haji menggunakan pesawat, yakni pada tahun 1978. Sebuah pesawat sewaan dari PT. Garuda Indonesia yakni pesawat Loftleidir Icelandic dengan tipe pesawat yang sama ketika peristiwa jatuhnya pesawat haji 1974 yakni DC-8, nomor penerbangan dari pesawat ini ialah LL-001,[70] pesawat tersebut jatuh di Bandara Internasional Katunayake Kolombo Sri Lanka. Terdapat beberapa hipotesis dari beberapa korban yang selamat yang menyebutkan faktor terjadinya kecelakan tersebut, yakni pesawat yang sudah tua, pilot yang salah melakukan landing, lapangan terbang yang tidak memenuhi syarat, dan faktor cuaca. [71]

Kejadian peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 November 1978 pada jam 19.30, peristiwa ini memakan korban jiwa jamaah haji kloter 02 dari Surabaya, dengan total korban jiwa sebanyak 175 korban. Sedangkan jamaah haji yang selamat yakni sebanyak 74 yang terbagi menjadi 3 kategori. Penerbangan ini menggunakan total 13 awak kapal.[72] Surat-surat kabar dunia menempatkan peristiwa ini sebagai topik atau berita utama, tidak hanya surat kabar saja, radio dan televisi menjadikan peristiwa ini sebagai berita pertama.[73]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[69] Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1978 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1978/1979

[70] H. Soeharto, *Tragedi Pesawat Haji di Kolombo*. 32-37

[71] Ibid., 98

[72] Ibid., 131-142

[73] Ibid., 112.

Akibat terjadinya peristiwa jatuhnya pesawat haji yang kedua kalinya dalam sejarah perjalanan haji Indonesia, tidak sedikit pemimpin Muslim Indonesia dan jajaran legislatif mengusulkan untuk memberlakukan kembali kebijakan haji tentang pelayaran haji menggunakan transportasi haji berupa kapal laut kepada pemerintah Indonesia, sebab dengan menggunakan kapal laut dirasa lebih aman daripada menggunakan transportasi kapal udara. Akan tetapi pemerintah tetep pada pendirianya untuk menggunakan transportasi haji berupa pesawat terbang.[74]

Meskipun terdapat kejadian yang sangat memilukan dalam sejarah pemberangkatan haji, pemerintah tetap memberlakukan penyelenggaraan jamaah haji menggunakan transportasi kapal udara atau pesawat. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan pesawat terbang, menjadikan proses perjalanan menjadi lebih singkat, sehingga menjadikan para jamaah lebih nyaman dan dalam segi biaya akomodasi menjadi lebih hemat.

Prosesi penyelengaraan haji jamaah Indonesia memiliki banyak kisah didalamnya, pemerintah sebagai peran utama penyelenggaraan jamaah haji memiliki beberapa revisi tentang kebijakan haji. Penyelenggaran ibadah haji dari dahulu jaman kolonial sampai dengan sekarang memiliki kisah yang sangat menarik. Pada awal penyelengaraan haji pada masa pemerintahan Indonesia, pemerintah menggandeng staf daerah untuk mengurus penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji di derah memiliki sekelumit cerita yang unik, contohnya di daerah timur jawa yakni kabupaten Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Rina Farihatul Jannah, “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia.” 93.

# BAB IV

# PERJALANAN JAMAAH HAJI UJUNG TIMUR PULAU JAWA

## A. Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi

Prosesi penyelenggaraan haji pada masa pemerintahan Indonesia menyerahkan penyelenggaraan ibadah haji pada pemerintah daerah, dan kabupaten Banyuwangi bukan salah satu kabupaten atau kota pusat, sehingga yang menyelenggarakan ibadah haji adalah pemerintah daerah. Peranan para haji sangatlah berperan penting dalam pembentukan kabupaten Banyuwangi, yang dimana banyak sekali haji-haji lainya yang bukan dari golongan Kiai besar yang memiliki peranan yang sangat penting bagi tempat tinggalnya. Kabupaten Banyuwangi, kabupaten ini merupakan kabupaten paling timur pulau jawa kabupaten Banyuwangi ini juga memiliki sekelumit cerita unik tentang jamaah ibadah haji.

**Gambar 4.1 Pengurus Jajasan Muawanah Lil Muslimien Banyuwangi**
(Sumber: Arsip Keluarga Kiai Haji Mahfud)

Pemerintah juga bekerja sama dengan para penyelenggaraan ibadah haji yang dari lingkup swasta, kebijakan tersebut terjadi pada masa Orde Lama, hal ini

dikarenkan pemerintah Indonesia masih belum bisa menangani secara keseluruhan jamaah haji Indonesia. Banyak PT pelayaran yang menyediakan tempat untuk dapat melakukan suatu pelayaran haji, pelayaran haji meskipun dilakukan oleh pihak swasta tetap bersifat legal dari pemerintah. Organisasi Islam terbesar yakni Nahdlatul Ulama juga memiliki komisi untuk memberangkatkan haji, perusahaan tersebut bernama *"Jajasan Muawanah Lil Muslimien"*[1] atau biasa disebut dengan nama *"Ya Mualim"*.[2] Yayasan Ya Mualim turut ikut serta berperan dalam menyukseskan penyelenggaraan haji Indonesia. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1971, yayasan Ya Mualim di Banyuwangi memberanhkatkan jamaah haji untuk terakhir kali, tidak terdapat data yang menyebutkan setelah tahun 1971, yayasan Ya Mualim Banyuwangi memberangkatkan haji ke tanah suci.[3]

Pada tahun 1971, merupakan tahun dimana kebijakan haji berubah, yang mana pada awalnya pemerintah memberlakukan kebijakan haji dengan cara menerapkan sistem kuota dan dengan mendapatkan kuota tersebut harus melalui yang namanya sistem undian. Akan tetapi pada tahun 1971 kebijakan tersebut dihapuskan dan diganti dengan cara menambah biaya Ongkos Naik Haji (ONH) dan menyetorkan kepada pemerintah jika ingin berhaji pada tahun 1971. Kebijakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Yasasan Ya Mualim ini penulis belum mengetahui kapan tanggal berdirinya, selama menacari sumber penulis belum menemukan keterangan pasti kapan yayasan ini didirikan, penulis menemukan bahwasanya yayasan Ya Mualim merupakan suatu yayasan milik organisasi Nahdlatul Ulama pada sumber primer dan sekunder, dari sumber primer penulis mendapatkan dari Arsip milik dari Kiai Haji Mahfud Genteng, yang pada tahun 1970 merupakan ketua dari Ya Mualim, dan sumber primer berupa sumber lisan dari Kiai Haji Muwafiq Amir, beliau mengetahui kisah secara langsung tentang organisasi ini. Serta sumber pendukung atau sumber sekunder penulis dapatkan dari Akhmad Sayudi, dkk, "Dinamika Politik Partai Nahdlatul Ulama di Semarang Tahun 1952-1979," Journal of Indonesian History 7, No.1 (2018): 4, (https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih) serta melalui wawancara kepada Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa dan H. Subeki selaku anak dari salah satu pengurus Ya Mualim di Banyuwangi.

[2] KH. Muwafiq Amir, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 16 Novenmber 2023.

[3] Ibid..

ini termuat dalam Keputusan Dirjen Urusan Haji No. 50 Tahun 1971.[4] Banyak para jamaah haji yang sebelumnya mendaftar dan antri kuota menggugurkan diri dan mengurungkan niatnya untuk pergi berhaji, dan tak sedikit pula yang melanjutkan untuk dapat pergi berhaji pada tahun 1971.[5]

Dengan sumber primer yang penulis temukan tentang perjalanan haji dari H. Musthofa Sidik, pada tahun tersebut H. Mustofa Sidik melakukan suatu perjalanan haji, akan tetapi ada peristwa didalamnya. Yang dimana pada waktu itu kebijakan haji pada tahun 1971 diberlakukan, awalnya H. Musthofa Sidik sudah mengantri daftar selama delapan kali mendaftar haji, akan tetapi selalu gagal untuk dapat mengabil kuota haji dalam undian haji.[6] Pada tahun 1969-1970 H. Mustofa Sidik mengambil kuota lagi dan dinyatakan gagal, dengan hal ini menjadikan H. Mustofa Sidik pada kala itu *"kemisinen"*[7] merasa malu, karena selalu gagal mendapatkan kuoata haji.[8] Dan pada akhirnya pada tahun 1970-1971 terjadi kebijakan haji yang dimana semua jamaah bisa pergi berhaji pada tahun 1971, asalkan melakukan pembayaran tambahan. Dengan semangatnya, H. Musthofa Sidik akhirnya membayar biaya Onkos Naik Haji (ONH) dan bisa berhaji pada tahun 1971.[9]

Akan tetapi timbul permasalahan baru yang dimana pada tahun tersebut karena kebijakan baru saja disebarkan, menjadikan H. Mustofa Sidik yang penuh semangat ingin pergi berhaji ke tanah suci masih belum mempunyai biaya yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Direktur Jendral Urusan Haji, Keputusan Dirjen Urusan Haji No. 50 Tahun 1971
[5] H. Subeki, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 16 November 2023.
[6] Hj. Siti Umroh, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 17 November 2023.
[7] Kemisinen adalah salah satu kata dari bahasa Osing yang merupakan bahasa asli dari masyarakat suku Osing Banyuwangi, kata kemisinen ini berati sangat malu sekali.
[8] H. Subeki, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 17 November 2023.
[9] Ibid.

cukup untuk melunasi tagian biaya Ongkos Naik Haji (ONH), dan pada akhirnya H. Musthfa Sidik yang juga merupakan pengurus dari Ya Mualim Banyuwangi bilang kepada ketua dari Ya Mualim kala itu yakni Kiai Haji Mahfud, dan akhirnya Kiai Haji Mahfud mengetahui hal tersebut membantu H. Mustofa Sidik untuk melunasi biaya haji tersebut. Pada awalnya, H. Musthofa Sidik akan mengurungkan niatnya untuk pergi berhaji pada tahun 1971, akan tetapi Kiai Haji Mahfud yang kala itu juga ingin melaksanakan ibadah haji, dan Kiai Haji Mahfud tidak ingin berangkat kalau tidak bersama H. Musthofa Sidik, maka dari itu Kiai Haji Mahfud meminjamkan uang kepada H. Musthofa Sidik agar supa bisa melaksanakan haji tahun 1971.[10] Dengan semangatnya untuk dapat pergi berhaji, akhirnya sebelum pelaksanaan ibadah haji, H. Musthofa Sidik mampu membayar semua uang yang dipinjami oleh Kiai Haji Mahfud untuk pelunasan biaya Ongkos Naik Haji (ONH).[11]

H. Mustofa Sidik berserta rombongannya untuk berangkat ke tanah suci menggunakan pemberangkatan dari yayasan Ya Mualim, meskipun demikian seperti yang dijelaskan diatas, yayasan ini tetap bersifat legal oleh pemerintah, meskipun yayasan ini merupakan yayasan pemberangkatan haji swasta. Data-data nama para jamaah yang berangkat menggunakan yayasan Ya Mualim pada tahun pemberangkatan haji 1971, dapat dilihat pada gambar berikut:[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 16 November 2023.

[11] H. Subeki, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 19 November 2023.

[12] Arsip Keluarga Kiai Haji Mahfud: Daftar Nama Jamaah Haji 1971

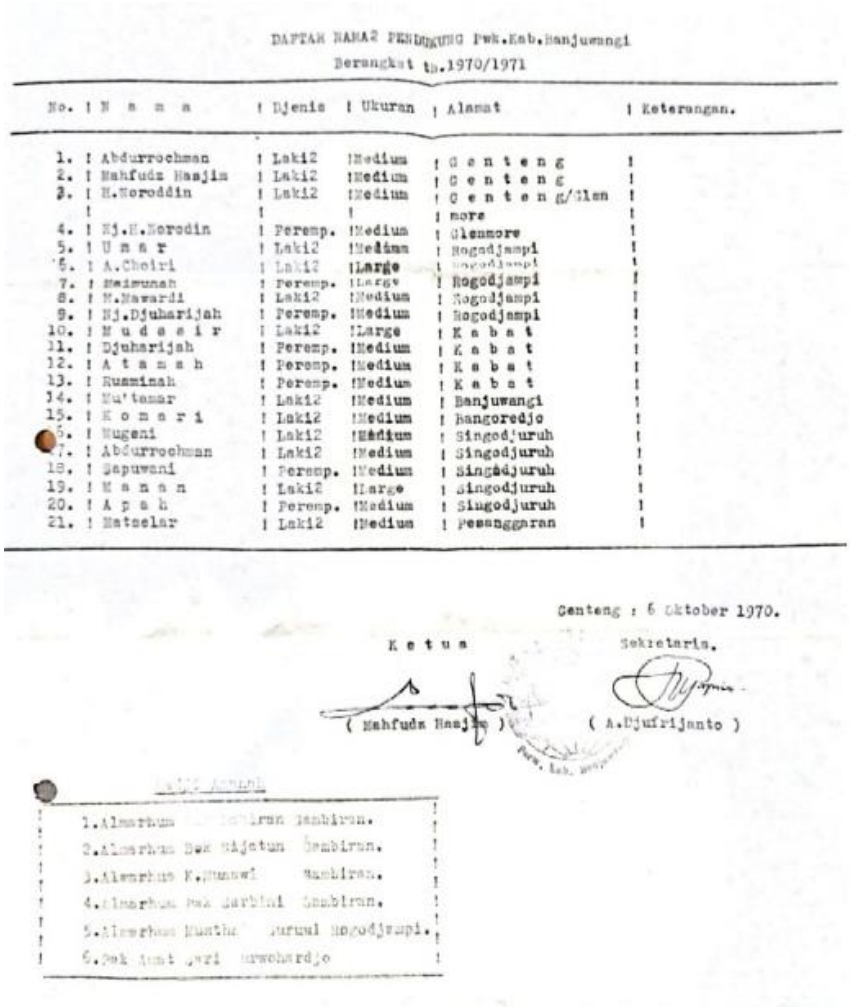

DAFTAR NAMA2 PENDUKUNG Pwk.Kab.Banjuwangi
Berangkat th.1970/1971

| No. | N a m a | Djenis | Ukuran | Alamat | Keterangan. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abdurrochman | Laki2 | Medium | G e n t e n g | |
| 2. | Mahfudz Hasjim | Laki2 | Medium | G e n t e n g | |
| 3. | H.Noroddin | Laki2 | Medium | G e n t e n g/Glem more | |
| 4. | Nj.H.Noroddin | Peremp. | Medium | Glenmore | |
| 5. | U m a r | Laki2 | Medium | Rogodjampi | |
| 6. | A.Cheiri | Laki2 | Large | Rogodjampi | |
| 7. | Maimunah | Peremp. | Large | Rogodjampi | |
| 8. | M.Nawardi | Laki2 | Medium | Rogodjampi | |
| 9. | Nj.Djuharijah | Peremp. | Medium | Rogodjampi | |
| 10. | N u d a s e i r | Laki2 | Large | K a b a t | |
| 11. | Djuharijah | Peremp. | Medium | K a b a t | |
| 12. | A t a m a h | Peremp. | Medium | K a b a t | |
| 13. | Rusminah | Peremp. | Medium | K a b a t | |
| 14. | Mu'tamar | Laki2 | Medium | Banjuwangi | |
| 15. | K o m a r i | Laki2 | Medium | Bangoredjo | |
| 16. | Mugeni | Laki2 | Medium | Singodjuruh | |
| 17. | Abdurrochman | Laki2 | Medium | Singodjuruh | |
| 18. | Sapuwani | Peremp. | Medium | Singodjuruh | |
| 19. | M a m a n | Laki2 | Large | Singodjuruh | |
| 20. | A p a h | Peremp. | Medium | Singodjuruh | |
| 21. | Matselar | Laki2 | Medium | Pesanggaran | |

Genteng : 6 Oktober 1970.

K e t u a — Sekretaris.

( Mahfudz Hasjim ) — ( A.Djufrijanto )

Pwk. Kab. Banjuwangi

Catatan Amanat

1.Almarhum [illegible] Rambiran Rambiran.
2.Almarhum Bek Hajatun Rambiran.
3.Almarhum K.Munawi Rambiran.
4.Almarhum Bek Darbini Rambiran.
5.Almarhum Musthofa Purwul Rogodjampi.
6.Bek Amat Jeri Purwohardjo

**Gambar 4.2 Daftar Nama Jamaah Haji Banyuwangi 1971**
(Sumber: Arsip Keluarga Kiai Haji Mahfud)

Masuk kedalam perjalanan haji, pada tahun 1971 menurut sumber premier yang penulis temukan berupa tulisan harian dari H. Musthofa Sidik pada pelaksanaan ibadah hajinya, jamaah haji Kabupaten Banyuwangi berangkat pergi berhaji terpantau mulai pada tanggal 1 Januari 1971, pada hari tersebut kelompok jamaah haji Banyuwangi berangkat dari Banyuwangi menuju ke Surabaya. Setelah menempuh perjalanan menggunakan kendaraan roda empat, akhirnya jamaah haji Banyuwangi sampai di Surabaya, dan ketika berada di Surabaya, jamaah haji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Banyuwangi menetap selama empat hari di asrama haji.[13] Pada kala itu seluruh keluarga anak, istri, dan saudara-saudara dari H. Musthofa Sidik mengantarkan dengan menggunkan kendaraan roda empat dari Banyuwangi ke Surabaya. Pada kala itu jamaah haji dari daerah harus mendatangi embarkasi pusat yang dimana tempatnya pada provinsi Jawa Timur berada di kota Surabaya. Dengan membawa *"sahara"*[14] yang berisikan kebutuhan-kebutuhan selama di kapal laut, H. Mustofa Sidik bersama sanak keluarga menuju ke Surabaya.[15]

Beralih pada tanggal 4 Januari 1971, jamaah haji dari Banyuwangi melanjutkan perjalanan ibadah haji dari Surabaya dengan menaiki kapal laut dengan nama *"Tjut Njak Dhien"*[16], selanjutnya para rombongan jamaah haji jamaah dari Banyuwangi berangkat menuju ke Jakarta dan sampai pada tanggal 6 Januari 1971. Pada jam dua siang di hari yang sama para jamaah haji Banyuwangi mulai meninggalkan Jakarta dan sampai di kota Kolombo negara Sri Langka enam hari kemudian yakni pada tanggal 11 Januari 1971. Perjalanan haji jamaah Banyuwangi melanjutkan perjalanannya dari Sri Langka menuju ke Arab Saudi sehari ketika kedatangan jamaah haji di Kolombo Sri Langka yakni pada tanggal 12 Januari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Dokumen pribadi H. Musthofa Sidik, Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Tahun 1971.

[14] Sahara adalah kotak yang terbuat dari anyaman bambu yang dipergunakan untuk mebawa kebutuhan selama melaksanakan ibadah haji. Penjelasan Sahara ini penulis dapatkan dalam wawancara kepada beberapa narasumber yang diantaranya adalah, Kiai Haji Muwafiq Amir, Kiai Muhamadun, Hj. Siti Umroh, Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa, H. Subeki, dan H. Maliki. Bahkan penulis mendapatkan info nama pengerajin sahara untuk H. Mustofa Sidik yakni Mbah Madelan.

[15] Hj. Siti Umroh, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 17 November 2023.

[16] Kapal *Tjut Njak Dhien*, merupakan kapal yang mengankut rombongan jamaah haji Banyuwangi 1971. Bahkan anak pertama dari H. Musthofa Sidik yang kala itu berumur sekitar anak SMP yakni Hj. Siti Umroh, sempat masuk kedalam kapal *Tjut Njak Dhien* ini. Ibu Hj. Siti Umroh bercerita kepada penulis bahwasanya kala itu Ibu Hj. Siti Umroh dan H. Djarwadi yang merupakan adik ipar dari H. Musthofa Sidik, diajak untuk masuk kedalam kapal tersebut. Hj. Siti Umroh, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 17 November 2023

1971. Akhirnya pada tanggal 19 Januari 1971 para jamaah haji dari Banyuwangi telah tiba di pelabuhan Jeddah Arab Saudi.[17]

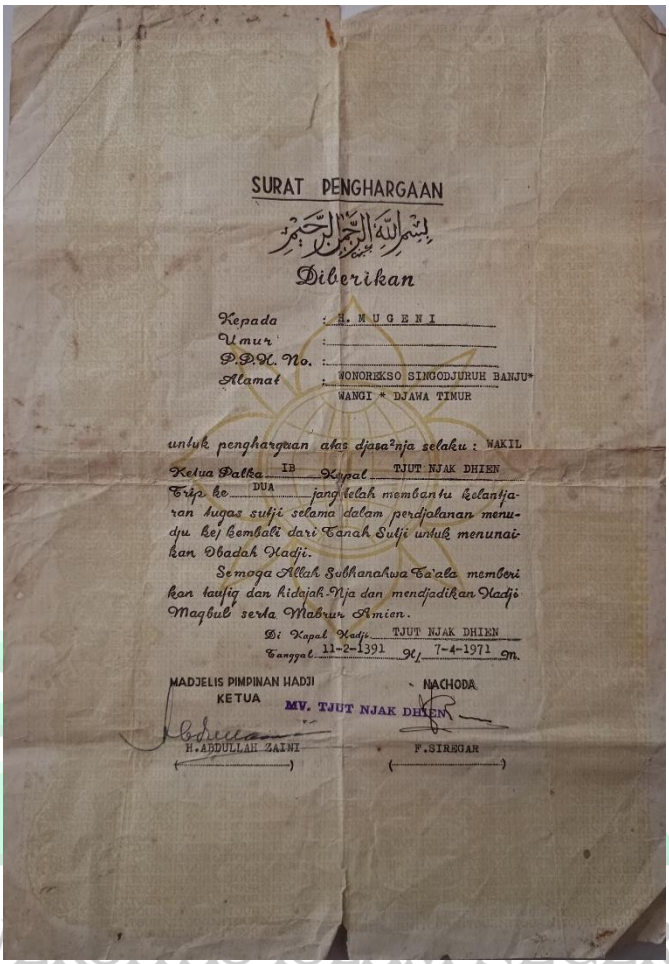

SURAT PENGHARGAAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Diberikan

Kepada : H. M U G E N I
Umur :
P.P.H. No. :
Alamat : WONOREKSO SINGODJURUH BANJU* WANGI * DJAWA TIMUR

untuk penghargaan atas djasa²nja selaku : WAKIL Ketua Palka IB Kapal TJUT NJAK DHIEN Trip ke DUA jang telah membantu kelantjaran tugas suji selama dalam perdjalanan menudju kej kembali dari Tanah Suji untuk menunaikan Ibadah Hadji.

Semoga Allah Subhanahwa Ta'ala memberikan taufiq dan hidajah-Nja dan mendjadikan Hadji Maqbul serta Mabrur Amien.

Di Kapal Hadji TJUT NJAK DHIEN
Tanggal 11-2-1391 H/ 7-4-1971 M.

MADJELIS PIMPINAN HADJI
KETUA
H.ABDULLAH ZAINI
( )

NACHODA
MV. TJUT NJAK DHIEN
F.SIREGAR
( )

**Gambar 4.3 Surat Penghargaan Wakil Ketua Palka (7 April 1971)**
(Sumber: Arsip Bani Musthofa)

Selama perjalanan haji, H. Mustofa Sidik ditunjuk oleh nahkoda kapal yakni F. Siregar untuk menjadi ketua Palka[18] yang membatu kelancaran perjalanan haji. Surat tersebut diberikan pada tanggal 7 April 1971, yang bertandatangan H. Abdullah Zaini selaku ketua Majelis Pimpinan Haji dan bertanda tangan oleh Nahkoda kapal *Tjut Njak Dhien* yakni F. Siregar.[19] Pada awalnya nahkoda kapal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[17] Dokumen pribadi H. Musthofa Sidik, Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Tahun 1971.

[18] Ketua Palka adalah suatu jabatan yang bertanggung jawab untuk mengatur rombongan haji.

[19] Arsip Keluarga Bani Mustofa: Surat Penghargaan Ketua Palka (7 April 1971)

menunjuk Kiai Haji Mahfud sebagai ketua palka, akan tetapi Kiai Mahfud menolak dan menyerahkan urusan tersebut kepada H. Musthofa Sidik. Kiai Haji Mahfud beranggapan bahwa, H. Mustofa Sidik lebih bisa diandalkan karena pribadinya yang telaten.[20]

Dengan demikian perjalaan haji jamaah Banyuwangi pada tahun 1971 memakan waktu sembilan belas hari perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi. Pada masa tersebut perjalanan haji masih menggunkan moda transpostasi berupa kapal laut, sehingga hal tersebut yang menjadikan perjalanan haji pada masa itu tergolong lama jika dibandingkan dengan perjalanan haji di masa sekarang. Perjalanan haji masa tersebut tidak dilakukan sekali jalan, melainkan harus mampir atau transit di beberapa tempat terlebih dahulu, sebelum menuju ke Arab Saudi.

Perjalanan haji menggunakan kapal laut tentunya membuat jenuh para jamaah, hal ini dikarenakan perjalanan haji menggunakan moda transportasi kapal laut memakan waktu yang sangat lama, bahkan terdapat suatu kejadian yang dimana para jamaah haji tidak dapat melihat daratan sama sekali dan hanya melihat lautan. Dengan mengatasi hal tersebut para jamaah mengisi waktu luang dengan mengadakan lomba-lomba didalam kapal, seperti lomba adzan, lomba memakai surban, tilawah Al-Qur'an, dan lain sebagainya. Jika terdapat jamaah haji yang meninggal di dalam kapal, penulis mendapatkan informasi yang dimana mayat dari jamaah tersebut dibungkus dan digantung lalu setelah itu mayat tersebut diceburkan dilaut lepas. Karena memang keadaan yang membuat hal demikian, sehingga jika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 17 November 2023.

mayat dibiarkan dalam kapal akan membusuk dan membuat wabah penyakit di dalam kapal haji, sehingga diputuskan untuk melakukan hal yang demikian.[21]

**Gambar 4.4 Jamaah Haji Banyuwangi di Maktab Syekh Muhtar Sidayu**
(Sumber: Arsip Keluarga Kiai Haji Mahfud)

Seperti kebanyakan para jamaah haji yang sudah melaksanakan haji, yang dimana para jamaah haji setelah mendapatkan gelar haji, para jamaah tersebut merubah namanya, para jamaah haji Banyuwangi pada kala itu juga banyak yang merubah nama asli para jamaah, yang diantaranya jamaah haji Banyuwangi yang merubah nama yakni:[22]

1. Kanang : H. Dulhanan
2. Salim : H. Salim
3. Tasir : H. Mashalim
4. Sulaiman : H. Abdusallam
5. Muntahar : H. Munawar
6. Arifin : H. Djainal Arifin
7. Mugeni : H. Musthofa Sidik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Kiai Muhamadun, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 16 November 2023.
[22] Dokumen pribadi H. Musthofa Sidik, Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Tahun 1971.

8. Mustopo : H. Mustopo
9. Mahali : H. Mansur
10. Ajati : Hj. Djubaidah
11. Sudari : Hj. Munawaroh

بسم الله الرحمن الرحيم

شهادة

الحمد لله القائل (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) واعد لفاعله أجرا حسنا وثوابا جزيلا . وفرض الحج في العمر مرة وخص لمبروره جزاء بالجنة وأعان لوافد بيت الله العتيق ذهابا وايابا بتسهيل الطرق وكتب بخطوانه حسنات ومحى بمتابعة السيئات ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل (العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحاج في ضمان الله مقبلا كان او مدبرا والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة)

سنة نبينا محمد القائل خير الاسماء ما حمد وعبد .

أما بعد فقد حضر في عام ٩٠ المدعو مفتي

الحاج مصطفى صديق من بلدة بابا علي

وقد وفد لحج بيت الله وزار قبر نبيه عليه افضل الصلاة والسلام

شيخ مكه

SEH MUHTAR SIDAYU
شيخ مختار سدايو
TA... MAKKAH

**Gambar 4.5 Sertifikat Syekh Muhtar Sidayu**
(Sumber: Arsip Bani Musthofa)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal tersebut memang tidak asing dilakukan oleh para jamaah haji. Terdapat hal unik dari penyelenggaraan ibadah haji pada masa ini, yang dimana penyelengaraan haji pada masa sekarang Muassasah[23] haji sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut tidak merepotkan jamaah haji, sehingga jamaah haji hanya perlu fokus beribadah. Sedangkan pada tahun 1971, Muasasa dipilih

[23] Muassasah merupakan pembimbing tawaf jamaah haji, Muassasah mempunyai tugas yakni untuk menyambut kedatangan jamaah haji dan meperhatikan keperluan dari jamaah haji. pemerintah arab saudi memberlakukan Muassasah sebagai penganti peran Syekh yakni pada tahun 1984. Zahid Haji, " Info Haji: Maktab dan Muassasah Apa Tugasnya???," diakses pada 19 November 2023, https://www.eramuslim.com/haji/info-haji-maktab-dan-muassasah-apa-tugasnya/

secara pribadi oleh para jamaah, terdapat beberapa nama-nama, pada kala itu disebut dengan nama “syekh”. Syekh yang dipilih oleh H. Musthofa Sidik yakni bernama Syekh Muhtar Sidayu.[24] Syekh Muhtar Sidayu bertugas untuk membimbing jalannya ibadah haji waktu pelaksanaan haji di tanah suci. Syekh Muhtar Sidayu khusus membimbing ibadah haji hanya di kota Mekkah saja, pada kunjungan ke kota Madinah syekh yang membimbing pun berbeda. Dikota Madinah yang bertanggung jawab sebagai syekh dari H. Mustofa Sidik adalah Syekh Madinah.[25]

بسم الله الرحمن الرحيم

شهادة

دارى شيخ المدينة المنورة

الحمدلله القائل ( ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل ( من صلى في مسجدي هذا اربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من العذاب وبراءة من النار وبراءة من النفاق وعلى آله وصحبه الذين اعتنوا بعد اداء مناسكهم بزيارة المسجد النبوى ومآثره الشريفة وفقني الله واياكم باتباع سنة نبينا محمد القائل خير الاسماء ما عبد

دارى نكرى برنام نج

سوداه داتغ مدينة دغن زيارة مسجد النبوي د ن فساريهان نبي كيتا دغن فساريها

فراصجبة ٢ يغ مليا

شيخ المدينة

مطبعة الوفاء

**Gambar 4.6 Sertifikat Syekh Madinah**
(Sumber: Arsip Bani Musthofa)

Setelah menjalankan ibadah haji, H. Mustofa Sidik dikenal dalam lingkungan rumahnya yakni di Dusun Karangasem Desa Alasmalang Kecamatan

[24] Arsip Bani Musthofa: Sertifikat Syekh Muhtar Sidayu
[25] Arsip Bani Musthofa: Sertifikat Syekh Madinah

Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, sebagai seorang guru atau ulama yang sangat dihormati. H. Musthofa Sidik mempunyai rutinan yang dilakukan pada setiap malam selasa di Mushola Miftahul Huda. Dan juga yang tak kalah berpengaruh, pada kala itu H. Mustofa Sidik mempunyai seorang santri yang notabene sudah memasuki usia senja, hal ini dikarenakan pada masa itu pendidikan agama Islam di daerah tempat tinggal H. Mustofa Sidik sangat teramat minim sekali. Dengan hal tersebutlah H. Mustofa Sidik mewadahi para masyarakat yang ingin belajar agama Islam, dan kebanyakan yang belajar dari kalangan masyarakat yang sudah lanjut usia, bahkan para masyarakat tersebut belajar agama pada saat H. Musthofa Sidik belum berhaji, atau masih menggunakan nama Mugeni.[26]

Sekelumit cerita haji Banyuwangi menggunakan kapal laut sudah dilakukan oleh kelompok haji dari yayasan Ya Mualim pada tahun pemberangkatan haji tahun 1971. Pada tahun 1978 merupakan dimana tahun tersebut pemerintah Indonesia memutuskan penyelenggaraan ibadah haji hanya menggunakan pesawat terbang, hal ini termuat dalam Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1978.[27] Sehingga pada tahun tersebut semua pemberangkatan haji tidak lagi menggunakan moda transportasi kapal laut dan menggunakan moda transportasi kapal udara atau pesawat. Didaerah juga demikian, semua pemberangkatan haji jamaah haji dari Banyuwangi pada tahun tersebut menggunakan pesawat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] H. Subeki dan H. Maliki diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 19 November 2023.

[27] Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1978 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1978/1979

**Gambar 4.7 Paspor Turis Tahun 1979 Milik KH. Muwafiq Amir**
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Pada tahun 1979, pada tahun ini Kiai dari pondok pesantren Bustanul Makmur (Kebonrejo) Genteng yakni Kiai Haji Muwafiq Amir saat itu melaksanakan haji. Kiai Muwafiq Amir tercatat lima kali melaksanakan ibadah haji, yakni pada tahun 1979, 1998, 2004, 2008, dan 2014.[28] Pada haji pertama yakni umur 25 tahun, Kiai Haji Muwafiq Amir melaksanakan haji, akan tetapi Kiai Haji Muwafiq Amir tidak menggunakan paspor haji, melainkan menggunakan paspor turis[29], meskipun menggunakan paspor turis hal tersebut dimasa itu tetap legal bagi pemerintah. Perjalanan yang dibutuhkan dengan menggunakan pesawat terbang tergolong sangat singkat, menurut Kiai Haji Muwafiq Amir, pada kala itu pesawat sempat melakukan transit di Bandara Singapura. Pada tahun 1979, Kiai Muwafiq Amir berangkat ke tanah suci pada bulan Syawal.[30]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Arsip Kiai Haji Muwafiq Amir: Paspor Haji

[29] Perbedaan dari paspor haji dan paspor turis ialah pada bentuknya, paspor haji berwarna coklat sedangkan untuk paspor turis berwarna hijau. Hal tersebut dapat dilihat dalam lembar lampiran.

[30] KH. Muwafiq Amir, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 16 Novenmber 2023.

Selama lima bulan di Mekkah, yakni dari bulan Syawal sampai dengan bulan Dzulhijjah, Kiai Muwafiq Amir ikut pada Syekh Ahmad Khotib Madura, yang merupakan salah satu Syekh yang menjadi pembimbing bagi para jamaah haji di tahun itu. Kiai Muwafiq Amir selama lima bulan di Mekkah menjadi wakil dari Syekh Ahmad Khotib Madura, sehingga hal tersebut secara tidak langsung Kiai Haji Muwafiq Amir belajar tentang banyak hal pada Syekh Khotib Madura. Disana Kiai Haji Muwafiq Amir ketika kedatangan jamaah haji mendapatkan tugas untuk mencatat dan mengajak para jamaah untuk dapat memilih Syekh Ahmad Khotib Madura sebagai pembimbing haji. salah satu jamaah yang dikenal oleh Kiai Haji Muwafiq Amir adalah kakak iparnya sendiri yakni Kiai Haji Zarkasyi Djunaidi. Kiai Haji Muwafiq Amir bercerita bahwa pemilihan Syekh itu dipilh langsung oleh para jamaah, jadi jamaah tidak seperti sekarang yang sudah tersedia dan ditetapkan. Akan tetapi pada masa itu para jamaah memilih sendiri Syekh tersebut. Ketika sudah memasuki pintu gerbang tanah suci, para calo-calo syekh menawarkan kepada jamaah Syekh mana yang akan dipilih. Untuk para jamaah Banyuwangi kebanyakan memilih dari Syekh Malik Rawa dan Syekh Muhtar Sidayu.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] KH. Muwafiq Amir, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 16 Novenmber 2023 Terdapat pembahasan unik yang dimana Kiai Haji Muwafiq Amir tidak memilih antara Syekh Malik Rawa dan Syekh Muhtar Sidayu, hal ini dikarenakan keluarga dari Kiai Haji Muwafiq Amir dari dulu sudah memilih Syehk Ahmad Khotib Madura. Kakak ipar dari Kiai Haji Muwafiq Amir yakni Kiai Haji Zarkasyi Djunaidi juga menggunakan Syekh Ahmad Khotib Madura.

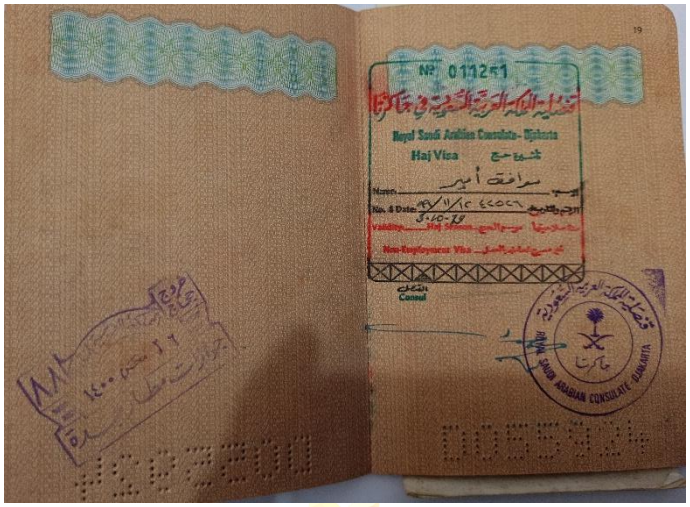


**Gambar 4.8 Visa Haji dalam Paspor Turis Tahun 1979 Milik KH. Muwafiq Amir**

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Setelah menjadi wakil dari Syekh Khotib Madura, pada bulan dilaksanakannya haji yakni bulan Dzulhijjah Kiai Haji Muwafiq Amir melaksanakan ibadah haji. Dengan paspor kepemilikannya yang bersifat paspor turis, hal tersebut menjadikan Kiai Haji Muwafiq Amir harus mendapatkan cap visa haji, untuk dapat melaksanakan ibadah, kalau tidak mendapatkan visa haji, maka Kiai Haji Muwafiq Amir tidak diperbolehkan untuk pergi menunaikan ibadah haji.[32] Akhirnya setelah perjalanan tersebut Kiai Haji Muwafiq Amir pergi menjalankan ibadah haji. Setelah itu pada tahun 1998, 2004, 2008, 2014 kembali datang ketanah suci untuk menunaikan ibadah haji.

Sampai pada tahun 1981, pada tahun ini, pemerintah mebuat kebijakan haji baru yakni termuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 Tahun 1981. Terbentuknya keputusan ini unutk mnyempurnakan kebijakan sebelumnya yakni, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969, Instruksi Presiden Nomor 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] KH. Muwafiq Amir, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 18 Novenmber 2023. Pada tanggal 18 November 2023 merupakan wawancara lanjutan yang dilakukan penulis.

Tahun 1969, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1971.[33] Pada tahun ini pemberangkatan haji didaerah Banyuwangi dipegang oleh pemerintah daerah. Yang mana pada tahun 1981 para calon jamaah haji yang ingin mendaftar untuk pergi berhaji harus mendaftar melalui kesra desa, selanjutnya diarahkan ke kecamatan, lalu sampai pada kesra kabupaten. Syarat seperti syarat kesehatan juga dilakukan pada masa tersebut. Dari awal kebijakan tentang kesehatan para calon jamaah haji selalu diperhatikan, demi kelancaran suatu perjalanan haji.[34] Pemberangkatan haji jamaah Banyuwangi pada tahun 1981 dilakukan di embarkasi Surabaya, bukan seperti sekarang yang dilakukan di daerah masing-masing dan atas tanggung jawab pemeritah. Menurut sumber primer yang penulis wawancarai yakni kepada Drs. H. Achmad Syafi'i Mustofa, bahwasanya pada saat itu Drs. H. Achmad Syafi'i Mustofa pergi ke Surabaya dengan akomodasi pribadi. Kebetulan pada saat itu Drs. H. Achmad Syafi'i Mustofa menemani ibu nya untuk pergi berhaji bersama yakni Hj. Fatemah.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada masa haji tahun 1981, pemerintah masih belum menyediakan asrama haji seperti dengan sekarang. Jadi jamaah haji Banyuwangi kala itu diantarkan langsung menuju ke lapangan terbang atau bandara Juanda.[36] Pada kala itu, Drs. H. Achmad Syafi'i Mustofa dan ibunya yakni Hj. Fatemah, diantarkan oleh sanak keluarganya, serta pada kala itu masyarakat sekitar ikut senang akan

---

[33] Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1981Tentang Penyelengaraan Urusan Haji

[34] Penulis mendapatkan sumber primer berupa surat keterangan hasil cek up untuk salah satu syarat pergi berhaji, surat tersebut milik dari jamaah haji Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa dan Hj. Fatemah. Arsip Bani Musthofa: Surat Cek Kesehatan 1981.

[35] Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 16 November 2023.

[36] Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 16 November 2023.

pemberangkatan jamaah haji, sampai-sampai pada kala itu Drs. H. Achmad Syafi'i Mustofa dan ibunya yakni Hj. Fatemah, diantarkan oleh rombongan satu kampung, hal ini didasari oleh rasa senang.[37]

Setibanya di Mekkah, karena masih belum tahun 1984 maka pemberlakuan Muasassah masih belum terjadi dan Syekh masih berlaku. Pada saat itu jamaah haji Banyuwangi memilih Syekh Malik Rawa sebagai pendamping jamaah haji ketika melaksanakan haji di tanah suci. Seperti yang dibutkan diatas bahwasanya Syekh Malik Rawa merupakan salah satu Syekh yang biasa digunakan jasa nya oleh jamaah haji Banyuwangi. Setelah hal tersebut selanjutnya para jamaah haji melakukan ibadah haji demi menjalankan rukun Islam yang kelima.[38]

Perjalanan ibadah haji jamaah Banyuwangi sangatlah menarik, perjalan haji tingkat daerah menyajikan suatu fenomena-fenomena yang tidak bisa didapatkan didaerah lain. Hal ini dikarenakan suatu budaya dan tradisi yang mengakar disebuah daerah menjadikan ibadah haji tingkat daerah sangat menarik untuk dibahas. Serta peran dari para haji ditingkat daerah sangat memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan ajaran agama Islam, karena para masyarakat sangat menghormati para haji, dan para haji tersebut dijadikan percontohan bagi masyarakat setempat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## B. Peran Para Haji dalam Penyebaran Agama Islam di Banyuwangi

Agama Islam datang di wilayah Nusantara memalui beberapa teori masuknya Islam di Nusantara. Dapat diketahui bahwa sebenarnya agama Islam

[37] Hj. Siti Umroh, H. Subeki, dan H. Maliki, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 16-19 November 2023. Nama yang penulis sebutkan merupakan anak dari Hj. Fatemah dan kakak serta adik dari Drs. H. Achmad Syafi'i Mustofa.

[38] Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 16 November 2023.

merupakan agama yang pendatang bukan agama asli dari wilayah Nusantara. Meskipun demikian agama Islam dapat diterima dengan sangat terbuka oleh masyarakat Nusantara pada kala itu, hal ini dikarenakan agama Islam tidak ada sistem kasta, seperti halnya agama Hindu Budha.

Agama Hindu Budha hidup lebih lama di wilayah Nusantara, sama seperti Islam, Hindu juga merupakan agama pendatang yang berasal dari India. Akan tetapi dalam penyebaranya terdapat teori yang lain yang dipaparkan oleh Frederik David Kan Bosch. Teori tersebut ialah teori arus balik, dalam teori ini F.D.K Bosch menjelaskan bahwa penyebaran agama Hindu Budha di Indonesia merupakan jerih payah dari masyarakat Indonesia di masa lalu. Agama Hindu Budha pertama kali dibawa oleh orang India ke Indonesia, akan tetapi terdapat sebuah kasus yang mana orang Indonesia penasaran akan ajaran asli Hindu Budha, sehingga dengan demikian yang menjadikan masyarakat Indonesia kala itu tertarik untuk belajar langsung ke negara asal Hindu Budha yakni di India. Para masyarakat tersebut berangkat ke India dan belajar ilmu ilmu di India dan ketika kembali ke tanah air, para masyarakat yang belajar langsung dari negara India mengajarkan kembali ilmu yang diperoleh kepada masyarakat Indonesia.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam hal ini memiliki kesamaan pola yang dilakukan oleh sekelompok jamaah haji Indonesia. Pada awalnya Islam masuk oleh pendatang baru yang mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Indonesia. Lalu dengan adanya ibadah haji, masyarakat Indonesia mulai dari jaman sebelum kolonial Belanda

[39] Nofiyah Mardiyani, Umasih, dan Murni Winarsih, "Materi Sejarah Masa Hindu-Budha dan Penggunaan Sumber Belajar Sejarah dalam Pembelajaran di SMK," *TAMADDUN* 7, No. 2 (Desember 2019): 334. (https://doi.org/10.24235/tamaddun.v7i2.5501).

sampai sekarang menjalankan rukun Islam kelima yakni berhaji, dan tak sedikit yang mengambil ilmu dan ketika sepulang haji para jamaah mengajar kan ilmu yang sudah didapat kepada masyarakat sekitar, haji pada masa tersebut selain menjadi konsolidasi politik para haji juga berperan sebagai konsolidasi intelektual. Sampai dengan masa sekarang, banyak dari kalangan haji yang sepulang dari ibadah haji mereka mengajarkan ajaran ajaran agama Islam, baik dengan metode pembelajaran, dakwah, dan lain sebagainya. Banyuwangi memiliki segelintir para haji yang sepulangnya dari tanah suci lalu mengajarkan ilmunya kepada masyarakat Banyuwangi. Salah satu kiai di Banyuwangi yakni Kiai Haji Abdul Bashar Jalen merupakan guru dari ulama besar Nusantara, yakni Syaikhona Kholil Bangkalan. Dengan demikian menjadikan Kabupaten Banyuwangi memiliki kisah para haji yang sangat hebat sehingga menjadikan Syaikhona Kholil Bangkalan menuntut ilmu di Banyuwangi. Selain Kiai Abdul Bashar terdapat banyak ulama yang kharismatik, dan tentunya masih banyak lagi para haji yang sangat berpengaruh dalam lingkup wilayah desa tempat para haji tersebut tinggal.

**1. Kiai Haji Saleh Lateng**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kabupaten Banyuwangi memiliki sekelompok ulama/kiai yang masuk kedalam reputasi nasional, salah satunya yakni Kiai Haji Saleh Lateng. Ilmu yang dimiliki oleh Kiai Haji Saleh Lateng tidak hanya terkenal di kabupaten Banyuwangi saja melainkan sudah menyebar ke penjuru pulau Jawa, Madura, Bali, Kalimantan, hingga sampai ke Sumatera. Bahkan Kiai Saleh Lateng sosok kealimannya terdengar sampai di daerah Malaka, maupun tempat Kiai Saleh Lateng menuntut ilmu yakni di Mekkah dan Mesir. Dengan hal tersebut yang mengantarkan Kiai

Saleh Lateng memiliki peranan yang cukup besar dalam penyebaran agama Islam di Banyuwangi dan perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia, serta berperan aktif dalam pendirian dan pengembangan Nahdlatul Ulama.[40]

Kiagus (KGS) Muhammad Saleh merupakan nama asli dari Kiai Haji Saleh Lateng, Minggu, 6 Ramadhan 1278 H atau Minggu, 7 Maret 1862 M, Kiai Haji Saleh Lateng dilahirkan di Kampung Mandar, Banyuwangi. Bapak dari Kiai Haji Saleh Lateng bernama Kiagus Abdul Hadi dan dengan ibu yang bernama Aisyah.[41] Kiai Saleh pada masih kecil menuntut ilmu di daerah Tumenggungan yang tak jauh dari tempat tinggal Kiai Saleh, dalam hal ini Kiai Saleh menuntut ilmu di pondok pesantren milik Kiai Abdul Aziz. Pengajaran mengenai akidah, fiqih, nahwu dan lain sebagainya diterima oleh Kiai Saleh.[42]

Pada tahun 1877, ketika Kiai Saleh berumur 15 tahun, atas restu orsng tua dan gurunya, Kiai Saleh melanjutkan pendidikan pondoknya di pondok pesantren Kebondalem Surabaya. Setelah setahun nyantri, Kiai Saleh beranjak ke Bangkalan Madura untuk berguru di pesntren milik Syaikhona Kholil.[43] Tujuh tahun dihabiskan untuk belajar di Madura, bukan hanya di Syaukhona Kholil saja melainkan di guru guru yang lain, selepas tujuh tahun tersebut, Kiai Saleh memutuskan pulang ke Banyuwangi dan selama di Banyuwangi Kiai Saleh akhirnya melakukan pernikahan dengan putri dari ulama terkemuka di Kampung Mandar yakni Guru Munah, anak Guru Munah tersebut bernama Khomariyah.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Ayung Notonegoro, *Lentera Blambangan*, (Banyuwangi: Komunitas Pegon, 2023). 3.
[41] Ibid.
[42] Ibid., 7.
[43] Ibid.
[44] Ibid., 12-14.

Atas restu mertua dan istrinya, pada tahun 1894 Kiai Saleh menunaikan ibadah haji. Pada ibadah haji tahun 1894 terdapat 6.874 jamaah haji Nusantara yang berhaji.[45] Ibadah haji yang dilakukan oleh Kiai Saleh merupakan ibadah haji yang dimana peraturan tentang kebijakan haji yang sudah direvisi dari Resolusi Haji menjadi Ordonansi Haji 1859.[46] Sehingga dalam hal ini, perjalanan haji yang dilakukan Kiai Saleh sudah sepenuhnya melalui embarkasi pemerintah kolonial Belanda.

Bukan hanya pergi berhaji, di Mekkah Kiai Saleh juga menuntut ilmu dibeberapa guru atau syekh yang ada negeri Arab. Pada saat di tanah suci, Kiai Saleh tidak membuang-buang waktu yang ada, waktu tersebut digunkan untuk belajar dan beribadah, dengan demikian wakt istirahat yang digunkan Kiai Saleh hanya dua jam ketika malam, dan lima belas menit ketika siang. Selama ditanah suci, Kiai Saleh tercatat berguru kepada tiga belas guru, yang diantaranya yakni:[47]

1. Syekh Abdul Adhim Al-Bangkalani
2. Syekh Yasin Al-Bangkalani
3. Syekh Mahfut At-Tarmisi
4. Syekh Khotib Minangkabawi
5. Syekh Narawi Al-Banyumasi
6. Syekh Syarqowi Al-Sampangi
7. Syekh Musa Nawawi Sidogiri
8. Syekh Umar Al-Sumbawa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 121.
[46] Ibid., 95.
[47] Ayung Notonegoro, *Lentera Blambangan*. 15-17.

9. Syekh Anwar Mandailing Natal
10. Syekh Said Al-Yamani
11. Syekh Said Abdul Karim Al-Dagastani Turkistan
12. Syekh Sholih Bafadlol
13. Guru dari Syekh Syuaib

Dengan berguru ke-13 syekh menjadikan Kiai Soleh semasa di Mekkah menjadi tersohor karena memiliki ilmu yang tinggi, sehingga terdapat cerita dengan keilmuan fikihnya Kiai Saleh dapat menyelesaikan persoalan yang pelik di tanah Arab. Dengan mengutip berbagai dalil dan pendapat ulama dari beberapa kitab, akhirnya bisa menjawab permasalah tersebut. Hal ini dikarenakan Kiai Saleh terus menerus belajar dan hanya beristirahat sekitar dua jam lima belas menit perhari.[48]

Setelah perjalanan belajar di Mekkah, akhirnya Kiai Saleh mendirikan sebuah pondok pesantren, demi upaya menyalurkan ke-Islamannya demi perubbahan sosial masyarakat Banyuwangi kala itu. Setelah sepulangnya dari tanah suci, kondisi kabupaten Banyuwangi sangat krisis moral, banyak terjadi kemaksiatan, dan penyerangan antar desa di Banyuwangi. Tentunya hal tersebut sangat susah untuk diredam, apalagi menyiarkan agama Islam. Tidak habis pikir, Kiai Saleh Lateng melakukan pendekatan kepada para algojo atau preman yang menjadi otak masalah hal tersbut. Lambat laun dengan kepiawaianya Kiai Saleh mampu melunakan preman tersebut, dan menjadikan mereka santri, dan pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Ayung Notonegoro, *Lentera Blambangan*. 17-18.

akhirnya masuk kedalam pesantren yang Kiai Saleh buat. Hal tersebut menjadikan kabupaten Banyuwangi lebih beradab lagi ketimbang tahun-tahun sebelumnya.[49]

**2. Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro**

Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro terkenal dengan pemikirnya tentang tradisi endhog-endhogan, beliau membuat tradisi endhog-endhogan demi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain pemikirannya yang terkenal dengan nama endhog-endhogan, Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro juga mengeluarkan pemikiran yang tidak kalah eksis di Kabupaten Banyuwangi ini, pemikiran tersebut adalah tradisi Ider Bumi. Menurut Gus Reza yang merupakan cicit dari Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro, tradisi ider bumi yang hasil pemikiran Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro merupakan suatu akulturasi budaya lokal di Banyuwangi. Yang mana pemikiran tradisi Ider Bumi tersebut berisikan pawai obor dan membacakan solawat.[50]

KH Abdullah Faqih memiliki nama semasa kecil yakni Mudasir. Semasa hidupnya, KH Abdullah Faqih dikenal sebagai ulama kharismatik pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Cemoro, Songgon yang dirintis pada tahun 1911, namun baru memperoleh izin pendirian dari pemerintah kolonial Belanda pada 17 Agustus 1917. Jangka waktuu antara perintisan dan peresmian yang cukup lama tersebut dikarenakan kala itu tengah diterapkan suatu kebijakan yang bernama Ordonansi Guru.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[49] Ayung Notonegoro, *Lentera Blambangan*. 19-20.

[50] Gus Reza, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 16 April 2023, lalu diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada Kiai Haji Umar Abdullah yang merupakan abah dari Gus Reza. KH Umar Abdullah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 16 November 2023.

[51] Moch Sholeh Pratama, "Identitas Kota Ujung Timur Pulau Jawa:Tradisi Endhog-Endhogan di Banyuwangi dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW," *SANTHET: Jurnal*

Kiai Haji Abdullah Faqih keluar dari rumah sekitar umur sepuluh tahun, dan dalam perjalanan tersebut Kiai Haji Abdullah Faqih pernah menuntut ilmu di kiai kiai atau ulama ulama besar yang diantaranya yakni:[52]

1. Kiai Purwosono (Lumajang)
2. Kiai Muhammad Siddiq (Pasuruan dan Jember)
3. Syaikhona Kholil Bangkalan (Madura)
4. Kiai Jamsaren (Solo)
5. Kiai Saleh Darat (Semarang)
6. Kiai Abdul Jamil (Cirebon)
7. Kiai Syamsuri (Cirebon)
8. Belajar di Banten (tidak diketahui belajar disiapa)

Setelah belajar di Kiai atau Syekh yang terdapat di Nusantara, Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro melanjutkan ke tanah suci.[53] Karena hal tersebutlah yang menjadikan tingkat keilmuan Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro sangat tinggi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

*Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora* 6, No.1 (April 2022): 100-106, https://doi.org/10.36526/js.v3i2.695. Terdapat suatu perbedaan yang dimana ketiak penulis melakukan wawancara kepada Kiai Haji Umar Abdullah yang merupakan cucu sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Cemoro, yang dimana Kiai Umar Abdullah berpendapat bahwa berdirinya Pondok Pesantren Cemoro pada tahun 1901 M. Akan tetapi diliteratur lain menyebutkan bahwa berdirinya Pondok Pesantren Cemoro yakni pada tahun 1911. Penulis tetap menulis tahun 1911, dikarenakan keadaan ketika penulis melakukan wawancara Kiai Umar Abdullah sedang banyak menerima tamu sehingga penulis menyimpulkan bahwa ada kesalahan dalam pengucapan tahun. Dan juga literatur pendukung seperti buku *"Lentera Blambangan"* karya Ayung Notonegoro menjelaskan berdirinya pondok yakni tahun 1911, serta wawancara pendukung yang penulis lakukan kepada Gus Reza yang merupakan cicit dari Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro, beliau menyebutkan tahun berdirinya pondok yakni pada tahun 1911.

[52] KH Umar Abdullah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 16 November 2023. Kiai Haji Umar Abdullah merupakan cucu dari Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro dan merupakan penerus dari pondok pesantren cemoro. Kiai Haji Umar Abdullah, tidak mengetahui siapa Kiai atau guru dari Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro ketika di pondok pesantren Jamsaren Solo dan ketika di Banten.

[53] Ibid.

apalagi dengan pemikiran beliau tentang tradisi endhog endhogan yang menjadikan Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro sangat dihormati oleh rakyat Banyuwangi.

Kiai Haji Abullah Faqih Cemoro menuntut ilmu di Mekkah selama tujuh belas tahun, dalam tujuh belas tahun yang dilalui oleh Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro sekaligus melaksanakan ibadah haji. Selama di tanah suci Mekkah, Kiai Haji Abdullah Faqih bermukim dan bertempat dirumah kakek dari Habib Sayyid Al-Maliki. Salah satu ulama yang menjadi guru dari Kiai Haji Abdullah Faqih waktu di Mekkah ialah Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidak terdapat tahun pasti kapan Kiai Haji Abdullah Faqih berangkat ke tanah suci, akan tetapi bisa dihipotesiskan bahwa Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro berangkat ke tanah suci sekitar tahun 1894. Ketika di tanah suci inilah yang menjadikan Kiai Haji Abdullah Faqih mendapatkan gelar "Faqih", terjadi banyak permasalahan sehingga dari masyarakat yang bermukim disana dimintai pendapat, dan yang bisa menyelesaikan masalah tersebut hanya Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro.[54]

**3. Kiai Haji Harun Abdullah Tukangkayu**

Kiai Harun Abdullah lahir di Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Kiai Harun lahir pada tanggal 28 Agustus 1905. Kiai Harun semasa kecil mengawali pendidikanya dengan belajar kepada orang tuanya, lalu setelah masuk usia ke tujuh tahun Kiai Harun masuk kedalam sekolah rakyat pada jaman pemerintahan kolonial Belanda.[55] Sekolah rakyat merupakan suatu sekolah yang dibangun atas inisiatif desa akan tetapi masih dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] KH Umar Abdullah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 16 November 2023.
[55] Ayung Notonegoro, *Lentera Blambangan*. 77-78.

pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Sekolah rakyat atau ongko loro didirikan pada awalnya memiliki sistem pengajaran yang memiliki unsur kolonial.[56] Hal tersebut dilakukan oleh Kiai Harun, sampai dengan tahun 1918, Kiai Harun belajar tentang bahasa Belanda. Selama di sekolah rakyat, Kiai Harun belajar selama enam tahun. Setelah itu Kiai Harun melanjutkan pendidikanya kedalam pondok pesantren yang berada di Tumenggungan Banyuwangi, yang merupakan pondok pesantren dari Kiai Abdul Aziz, yang merupakan salah satu guru dari Kiai Saleh Lateng.[57]

Dengan umur sekitar 16 tahun, Kiai Harun bersama dengan sejumlah saudaranya diberangkatkan haji oleh orang tuanya pada tahun 1921.[58] Kiai Harun berangkat ke tanah suci masih menggunakan kebijakan haji Ordonansi Haji 1859, setahun sebelum revisinya kebijakan haji menajadi Ordonansi Haji 1922. Yang dimana kebijakan Ordonansi Haji 1859 berisi tentang mencegah para haji untuk tidak menetap ditanah suci dan kembali ke tanah air.[59]

Memanfaatkan momen untuk menimba ilmu di Mekkah, Kiai Harun menimba ilmu di Madrasah Al-Chairiyah, di Mekkah Kiai Harun hanya menghabiskan waktu selama tiga tahun, yakni dari tahun 1921-1924. Pada akhirnya setiba di Banyuwangi Kiai Harun melanjutkan pendidikanya di pondok pesantren Cemoro yang diasuh oleh Kiai Haji Abdullah Faqih. Setelah di pondok pesantren Cemoro, Kiai Harun juga melanjutkan pendidikanya di sejumlah pesantren di pulau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Andi Suherman dan Weny Widyawati Bastaman, "Perkembangan Sekolah Rakyat *(Volkschool)* di Gunung Kencana Kabupaten Lebak Banten Tahun 1940-1946," *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah* 2, No. 2 (2019): 16 (https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/1277)

[57] Ayung Notonegoro, *Lentera Blambangan*. 78-79.

[58] Ibid., 79.

[59] M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, 95.

Jawa lainya, yakni di Tebuireng, Jombang dan Krapyak, Yogyakarta serta di Tremas Pacitan.[60]

Kiai Harun sebagai seorang kiai adalah melanjutkan estafet dari Kiai Asy'ari, Kiai Asy'ari merupakan pendiri dari Madrasah Mambahul Huda, Kiai Harun aktif sebagai penguruh Madrasah pada tahun 1940. Pada tahun tersebut gadung dari Madrasah Mambahul Huda mengalami renovasi, dan mendirikan beberapa gedung baru untuk dijadikan Madrasah, setelah tanggal 4 Januari 1941, gedung beru tersebut selesa dibuat, dan gedung Mambahul Huda berpindah tempat ke gedung baru, dari sini lah nama Madrasah Mabahul Huda berganti nama menjadi Darunnajah. Setelah beberapa hari, Kiai Asy'ari mengundurkan diri sebagai kepala madrasah, dan menunjuk Kiai Harun untuk meneruskan kepemimpinannya.[61]

Beranjak pada masa pemerintahan Jepang, pada masa ini Jepang juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat muslimin di seluruh Indonesia. Tujuaanya untuk mengambil hati para kaum muslimin agar tunduk kepada pemerintahan Jepang. Jepang kala itu membentuk suatu komisi agama yang bernama *Shumubu*, pemerintah Jepang juga menjalankan *"Politik Islam"*[62] dan juga sebenarnya Jepang khawatir akan ajaran Islam yang sudah mengakar di mayarakat Nusantara. Sejak kedatangan pemerintahan Jepang di pulau Jawa, pemerintah Jepang berulang-ulang menyebutkan kata *"Menghormati dan Menghargai Islam"*,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Ayung Notonegoro, *Lentera Blambangan*. 79-80.
[61] Ibid., 87-88.
[62] Sumur Harapan dan Murdisi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, (Jakarta: Insan Cemerlang, 1984), 50.

hal ini tentu saja memiliki tujuan untuk dapat menguasai Indonesia khusunya Jawa lebih mendalam lagi[63].

Dalam *Shumubu*, terdapat beberapa tingkatan untuk membantu tugas dari Shumubu agar bisa didengar oleh semua daerah. Kiai Haji Harun Tukangkayu ditunjuk menjadi *kiyai yuzei shisatsui* (kiai pengawas/pengkhotbah) untuk kabupaten Banyuwangi. Tugas dari *kiyai yuzei shisatsui* adalah untuk menekankan para rakyat Indonesia untuk terus bekerja, dengan hal ini dilakukan menggunakan metode dakwah atau ceramah, jadi para Kiai yang mendapatkan tugas tersebut diharap untuk menyampaikan isi ceramah yang bertema pentingnya bekerja, hal ini agar supaya kaum muslimin mau untuk bekerja, karena Jepang sadar bahwa omongan Kiai pasti didengarkan oleh rakyat.[64] Akan tetapi dengan jabatan yang demikian Kiai Harun tetap berupaya menyelamatkan para rakyat yang terjebak dalam romusha, Kiai Harun selalu memastikan bahwa rakyat tersebut diperlakukan dengan baik.[65]

Setelah Indonesia merdeka, peran Kiai Harun sangatlah luar biasa, pada awalnya Kiai Harun ditunjuk menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) cabang Banyuwangi pada tanggal 28 Juli 1952. Akan tetapi tidak berselang lama Kiai Harun Abdullah keluar dari Masyumi dan berkiprah di Nahdlatul Ulama.[66] Nahdlatul Ulama memang tidak bisa dipisahkan dari sejarah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. 153

[64] Ayung Notonegoro, *Lentera Blambangan*. 92. Untuk lebih mengetahui peran dari *kiyai yuzei shisatsui*, dapat dilihat pada film yang berjudul "Sang Kiai" yang dirilis oleh Rapi Film pada tahun 2013, disana digambarkan tentang bagaimana Jepang menyuruh para *Shumubu* untuk menugaskan para Kiai untuk menjadi *kiyai yuzei shisatsui*.

[65] Ibid.

[66] Ibid., 95-98.

Kiai Harun, sebab beliau diberi mandat langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika Kiai Harun mondok di Tebuireng, ketika itu Kiai Harun mendapatkan tugas untuk menghidupkan Nahdlatul Ulama di Banyuwangi.[67]

Nahdlatul Ulama di Banyuwangi memiliki dua cabang kepengurusan yakni cabang Banyuwangi dan Blambangan.[68] Pada tanggal 18 April 1965, Kiai Haji Abdul Wahab Chabullah mengirim nota kepada penguruh Tanfidziyah PBNU, untuk menyelesaikan masalah yang ada di Banyuwangi. Karena pada kala itu terdapat suatu polemik tentang terpilihnya bupati Banyuwangi yakni Suwarso Kanapi. Kedua cabang Nahdlatul Ulama di Banyuwangi saling bertolak belakang tentang pelantikan bupati terpilih. Karena permasalahan politik yang menjadikan Nahdlatul Ulama di Banyuwangi terpecah menjadi dua kubu, sehingga terdapat arahan untuk meleburkan kedua cabang tersebut menjadi satu. Akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1965 terjadi sebuah musyawarah untuk menyepakati konfrensi gabungan. Dalam konfrensi tersebut terbentuklah kepengurusan bersama yang dinamai "bond stat", kepengurusan ini menunjuk Kiai Haji Harun Abdullah sebagai ketua, dan sementara wakilnya berasal dari kedua cabang yakni Kiai Haji Ali Manshur (cabang Banyuwangi) dan H. Abdul Latief (cabang Blambangan). Hasil dari konfresin gabungan tersebut selanjutnya dibawa ke pertemuan dengan PWNU Jawa Timur di Tretes Pasuruan pada tanggal 8 September 1965.[69]

Dengan hal tersebut akhirnya selama dua puluh dua tahun terpisah antara cabang Banyuwangi dengan cabang Blambangan, kedua cabang tersebut melebur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Ayung Notonegoro, *Lentera Blambangan*. 103.
[68] Ibid., 98 .
[69] Ibid., 106-107.

menjadi satu sebagai cabang Banyuwangi, dengan menunjuk Kiai Harun Abdullah sebagai Rais Syuriyah dan H. Abdul Latief Sudjak sebagai ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi. Semenjak itu nama Kiai Harun Abdullah selalu menjadi Rais Syuriyah PCNU Banyuwangi. Kiprah ke-Nahdlatul Ulama an benar-benar sampai hembusan nafas terakhirnya, Kiai Harun Abdullah wafat pada 24 Desember 1978, Kiai Harun Abdullah di makam kan di dalam kompleks pemakaman Pesantren Darunnajah.[70]

Dengan demikian menjadikan peran para haji dalam penyebaran agama Islam di Kabupaten Banyuwangi sangatlah berperan amat penting. Para haji menjadi tokoh sentral yang memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam bidang agama Islam khusunya. Dengan ini haji bukan hanya sebagai gelar yang didapatkan oleh jamaah haji ketika sepulangnya dari tanah suci, akan tetapi juga berperan penting dalam kosolidasi intelektual khusunya dalam bidang agama Islam. Kabupaten Banyuwangi menjadi saksi tentang gigihnya para haji untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Ayung Notonegoro, *Lentera Blambangan*. 108.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dalam pengkajian berbagai sumber primer berupa dokumen dan arsip serta sumber lisan, lalu dibantu dengan adanya sumber sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan sumber pustaka lainya yang berkaitan tentang penyelenggaraan ibadah haji. Penulis telah sampai pada kesimpulan, yang dimana kesimpulan tersebut yakni berupa pelaksanaan ibadah haji sebelum Indonesia merdeka, paska kemerdekaan Indonesia, dan pelaksanaan ibadah haji jamaah Banyuwangi.

Pelaksanaan ibadah haji sebelum Indonesia merdeka yang pertama yakni terjadi pada era prakolonial. Jamaah haji pada masa ini merupakan dari golongan pedagang dan para pelajar, serta utusan raja. Perjalanan pada masa prakolonial ini tergolong lama, karena masih menggunakan kapal dagang. Berlanjut pada masa kolonialisme Belanda, yang mana pada masa ini terbentuknya sebuah kebijakan-kebijakan haji yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda demi mengatur para haji dari jamaah Nusantara. Kebijakan tersebut berupa Resolusi Haji dan nantinya berubah menjadi Ordonansi Haji. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang, pada masa ini tidak ada data yang mencatat perjalanan haji jamaah Nusantara. Hal ini, dikarenakan pada masa tersebut telah terjadi perang dunia kedua, sehingga mempengaruhi rute kapal laut.

Paska kemerdekaan Indonesia, pelaksanaan ibadah haji untuk pertama kali diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Pada awalnya tidak terdapat perjalanan haji karena Indonesia dalam keadaan darurat perang untuk mempertahankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keerdekaan Indonesia, akan tetapi pada tahun 1948 terjadi suatu misi yang bernama misi haji, para jamaah haji pada kala itu memeang sengaja diutus untuk melaksanakan ibadah haji dan serta memiliki tujuan khusus untuk mengantarkan misi diplomasi. Dan pada tahun 1950, akhirnya jamaah haji Indonesia akhirnya bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci melewati penyelenggaraan haji oleh pemeritah Indonesia. Pada masa Orde Baru pelaksanaan ibadah haji yang awalnya dengan menggunakan sistem kuota, akhirnya pada masa ini sistem tersebut dihapuskan pada pelaksanaan haji tahun 1971. Dan pada tahun 1978, diberlakukan kebijakan haji yang membahas tentang transportasi haji yang dimana menghilangkan transportasi laut dan diganti dengan transportasi udara.

Pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Banyuwangi dimasa awal Orde Baru, pemerintah bekerja sama dengan para pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini, membuat pelaksanaan ibadah haji ditingkat daerah yang menyelenggarakan adalah pemerintah daerah tersebut. Jamaah haji Kabupaten Banyuwangi pada awal masa Orde Baru diharuskan mendaftar pada kesra desa, dilanjutkan ke kesra kecamatan, lalu sampailah ke kesra kabupaten. Peranan jamaah haji ditingkat daerah sangat berperan dalam penyebaran agama Islam khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Banyak sekali kisah para haji yang memiliki peranan penting, contohnya Kiai Haji Saleh Lateng yang menjauhkan Kabupaten Banyuwangi dari kemaksiatan yang merajalela, Kiai Haji Abdullah Faqih Cemoro yang dalam pemikiranya dapat mengalkuturasi budaya Banyuwangi, dan Kiai Harun Abdullah Tukangkayu yang menjadi tokoh Nahdaltul Ulama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terkemuka di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut membuktikan bahwa peran para haji sangat besar dalam meng-Islamkan Kabupaten Banyuwangi.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan dan menyelesaikan penelitian tentang Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi, penulis ingin meberikan sebuah saran-saran kepada para penulis yang kebetulan memiliki tema yang sama terlebih dalam ruang lingkup spasial Kabupaten Banyuwangi. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk dapat memperdalam kajian tentang Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi, karena dalam kajian ini sangat menarik untuk dibahas dan dikulik sampai dengan tuntas.
2. Dan diharapkan kepada peneliti yang membahas penelitian dengan tema ibadah haji, untung mengangkat tentang perjalanan atau penyelenggaraan ibadah haji pada tingkat daerah.

Alhamdulillah, penulis ucapkan karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa karya tulisan ini belum bisa dikatakan sempurna. Akan tetapi penulis mengupayakan secara maksimal untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. Namun demikian, masih terapat banyak sekali kekurangan dan kelemahan serta terdapat banyak sekali celah untuk dapat disempurnakan nantinya. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangu demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Sumber Primer


Arsip Bani Musthofa: Dokumen pribadi H. Musthofa Sidik, Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Tahun 1971.

_____: Sertifikat Syekh Madinah.

_____: Sertifikat Syekh Muhtar Sidayu.

_____: Surat Cek Kesehatan 1981.

_____: Surat Penghargaan Wakil Ketua Palka (7 April 1971).

_____: Surat Tanda Ingin Pergi Haji 1981.

Arsip Keluarga Kiai Haji Mahfud: Daftar Nama Jamaah Haji 1971.

_____: Foto Jamaah Haji Banyuwangi di Asrama.

Arsip Kiai Haji Muwafiq Amir: Paspor Haji.

Direktur Jendral Urusan Haji, Keputusan Dirjen Urusan Haji No. 50 Tahun 1971.

Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 16 November 2023.

Hj. Siti Umroh, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 17 November 2023.

KH. Muwafiq Amir, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 16 Novenmber 2023.

_____, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 18 Novenmber 2023.

Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1971 Tentang Tambahan/Penyempurnaan Instrusi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahnun 1969.

_____, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 122 Tahun 1964 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.

_____, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 Tahun 1966 Tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen-Departemen Kabinet Ampera.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

_____, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 1969 Tentang Keseluruhan Penyelenggaraan Haji Hanya Dilaksanakan Oleh Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan-Ketentuan Dalam Keputusan Presiden Ini.

_____, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1978 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1978/1979.

_____, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1981Tentang Penyelengaraan Urusan Haji.

_____, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, Pasal 4 dan 5.

*Staatblad van Nederlandsch-Indie* 1922, No. 689.

_____ 6 Juli 1859, No. 42.

**B. Sumber Sekunder**

**1. Buku**

Abdurahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

_____. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Aman. 2015. *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1998*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Arafat, Perusahaan Pelajaran. 1968. *Mengenal P.T. Perusahaan Pelajaran Arafat*. Djakarta: Humas P.T. Perusahaan Pelajaran Arafat.

Banyuwangi, BPS Kabupaten. 2023. *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Banyuwangi.

Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Terjemahan oleh Daniel Dhakidae. Jakarta Pusat: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1980.

Deliar Noer. 1983. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.

Djakaria. 2014. *Sejarah Indonesia II*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Douwes. Dick dan Nico Kaptein. *Indonesia dan Haji*. Terjemahan oleh Soedarso Soekarno dan Therisia Slamet Jakarta: INIS, 1997.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Emalia, Imas. 2006. *Historiografi Indonesia Sejak Masa Awal Sampai Masa Kontemporer*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisispasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Harapan, Sumur dan Murdisi. 1984. *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia* .Jakarta: Insan Cemerlang.

Herlina, Nina. 2020. *Metode Penelitian Edisi Revisi 2020*. Bandung: Satya Historika.

Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Majid, M. Dien. 2008. *Berhaji di Masa Kolonial*. Jakarta: CV Sejahtera.

Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif.* Yogyakarta: Raka Sarasin.

Muthari, Abdul Hadi Wiji., Azyumardi Azra, Jajat Burhanudin, Muhamad Hisyam, Setyadi Sulaiman, dan Taufik Abdullah. 2015. *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia: Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Musthofa, Achmad Syafii. 2016. *Ahlussunah Wal Jamaah An Nahdliyah*. t.t : t.p.

Nizam, Achmad dan Alatief Hanan. 2004. *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers*. Jakarta: Nizam Press.

Notonegoro, Ayung. 2023. *Lentera Blambangan*. Banyuwangi: Komunitas Pegon.

Padiatra, Aditia Muara. 2020. *Ilmu Sejarah: Metode Dan Praktik.* Gresik: JSI Press.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

Putuhena, M. Shaleh. 2017. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.

Rochimi, M Abdurachman. 2011. *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Soeharto. 1979. *Tragedi Pesawat Haji di Kolombo*. Surabaya: Penerbit Warga Surabaya.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &. D*. Bandung: Alfabeta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Suminto, Aqib. 1986. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1986.

Taqiyudin, Achmad., Dede Permana., Nugraha., dan Fathurrahmsn Yahya. 2009. *Antara Mekkah dan* Madinah. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Yatim, Badri. 2014. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

**2. Artikel Jurnal**

Hasan, Yunani. "Tinjauan Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau di Indonesia." *CRIKSETRA*. Vol. 5, No. 10 (Agustus 2016): 125-129. http://dx.doi.org/10.36706/jc.v5i2.4809.

Hindasah, Iin dan Amung Ahmad SM. "Transportasi Jamaah Haji Masa Kolonial Abad XIX." *HISTORIA MADANI. Jurnal Ilmu Sejarah*. Vol. 2, No.2 (2018): 1-24. https://doi.org/10.15575/hm.v2i2.9147.

Ichwan, Moch. Nur. "GOVERNING HAJJ: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior to Reformasi Era." *AL-JAMI'AH: Journal of Islamic Studies*. Vol 46, No. 1 (2008): 125 - 151. https://doi.org/10.14421/ajis.2008.461.125-151.

Mardiyani, Noviyah., Umasih, dan Murni Winarsih, "Materi Sejarah Masa Hindu-Budha dan Penggunaan Sumber Belajar Sejarah dalam Pembelajaran di SMK," *TAMADDUN*. Vol 7, No. 2 (Desember 2019): 328-347. https://doi.org/10.24235/tamaddun.v7i2.5501.

Pratama, Moch Sholeh. "Identitas Kota Ujung Timur Pulau Jawa:Tradisi Endhog-Endhogan di Banyuwangi dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW." *SANTHET: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, Vol 6, No.1 (April 2022): 100-106. https://doi.org/10.36526/js.v3i2.695.

Rohmatullah, Dalwan Multazami. "Perjalanan Haji Indonesia di Masa Kolonial." *QALAMUNA*. Vol 10, No. 2 (Juli - Desember 2017): 115-127. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v9i02.359.

Sayono, Joko. "Langkah-Langkah Heuristik Dalam Metode Sejarah Di Era Digital." *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*. Vol 15, No.2 (2021): 369-376. http://dx.doi.org/10.17977/um020v15i22021p369-376.

Sayudi, Akhmad., Wasino., dan Ibnu Sodiq. "Dinamika Politik Partai Nahdlatul Ulama di Semarang Tahun 1952-1979. " *Journal of Indonesian History*, Vol 7, No.1 (2018): 1 – 11. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sholehuddin, Abi dan Aminuddin Kasdi. "Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965." *AVATARA: e-Jounal Pendidikan Sejarah*, Vol 3, No. 1 (Maret 2015): 69 - 81. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/10726.

Sodikin, R. Abuy. " Konsep Agama dan Islam." *AL QALAM: Jurnal Kajian Keislaman*. Vol 20, No. 97 (April–Juni 2003): 1–20, https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i97.643.

Suherman, Andi dan Weny Widyawati Bastaman, "Perkembangan Sekolah Rakyat *(Volkschool*) di Gunung Kencana Kabupaten Lebak Banten Tahun 1940-1946," *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, Vol 2, No. 2 (2019): 11 – 21. https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/1277.

Zainal. "Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah." *JURIS*. Vol 11, No. 2 (Desember 2021): 96-113. https://doi.org/10.1234/juris.v11i2.1118.

### 3. Internet

Agung, Prasetyo Budi. "Frase Bhineka Tunggal Ika dalam Kakawin Sutasoma." Diakses pada 9 Oktober 2023. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/munas/frase-bhinneka-tunggal-ika-dalam-kakawin-sutasoma/.

Djamil, Abdul. "Wacana Pengelolaan Ibadah Haji dibawah Badan Otonom." Diakses pada 11 November 2023. https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Pengelolaan-Ibadah-Haji-diluar-Kemenag-1435282631.pdf.

Dunia, Ensiklopedia. "Albertus Jacobus Duymaer van Twist". Diakses pada 10 Oktober 2023. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Albertus_Jacobus_Duymaer_van_Twist.

Haji, Zahid. "Info Haji: Maktab dan Muassasah Apa Tugasnya???." Diakses pada 19 November 2023. https://www.eramuslim.com/haji/info-haji-maktab-dan-muassasah-apa-tugasnya/.

Kementrian Agama Republik Indonesia "Sekilas Tentang Kementrian Agama." Diakses pada 11 November. https://kemenag.go.id/artikel/sejarah.

### 4. Koran

"Aturan Untuk Bangsa Asing jang Akan Naik Hadji 1954." *Malang Pos*, 9 Desember 1953.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

"Djemaah Hadji 1954: Hanja Diambil dari Mereka jg. '53 tidak mendapat kesempatan." *Malang Pos*, 23 Oktober 1953.

**5. Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Istikomah. "Pelaksanaan Ibadah Haji Abad Ke 19 Dan Dampaknya Terhadap Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda." Skripsi, IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, 2017.

Jannah, Rina Farihatul. "Kebijalan Penyelengaraan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M." Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Taufik Ismail. "Berhaji pada Masa Revolusi: Ibadah Haji dengan Misi Tersembunyi Jamaah Haji Indonesia Tahun 1945-1950." Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

**6. Seminar**

Rozi, Teguh Fatchur. *Menarasikan Sejarah Islam Indonesia Melalui Data Arkeologis*, dalam Seminar 7 September 2023 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

**7. Sumber Lisan atau Wawancara**

Gus Reza, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 16 April 2023.

H. Maliki diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 19 November 2023.

H. Subeki, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 16 November 2023.

_____, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 19 November 2023.

KH. Umar Abdullah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 16 November 2023.

Kiai Muhamadun, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 16 November 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

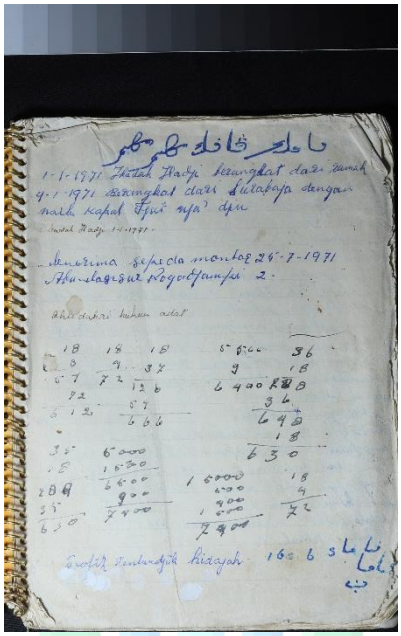

Gambar Lampiran 1 Arsip Bani Musthofa: Dokumentasi Pribadi H. Musthofa Sidik, Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Tahun 1971.
(Sumber: Dokumen Pribadi)

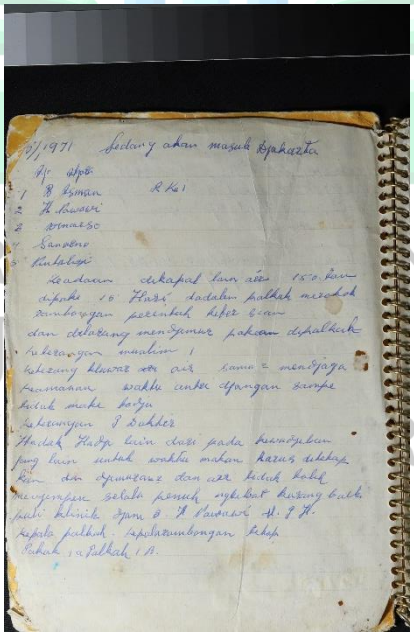

Gambar Lampiran 2 Arsip Bani Musthofa: Dokumentasi Pribadi H. Musthofa Sidik, Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Tahun 1971.
(Sumber: Dokumen Pribadi)

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

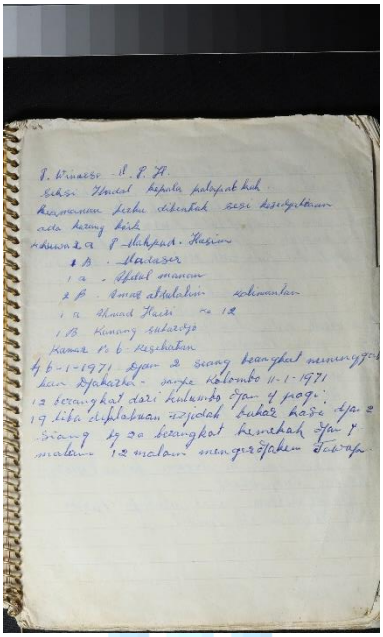

Gambar Lampiran 3 Arsip Bani Musthofa: Dokumentasi Pribadi H. Musthofa Sidik, Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Tahun 1971.
(Sumber: Dokumen Pribadi)

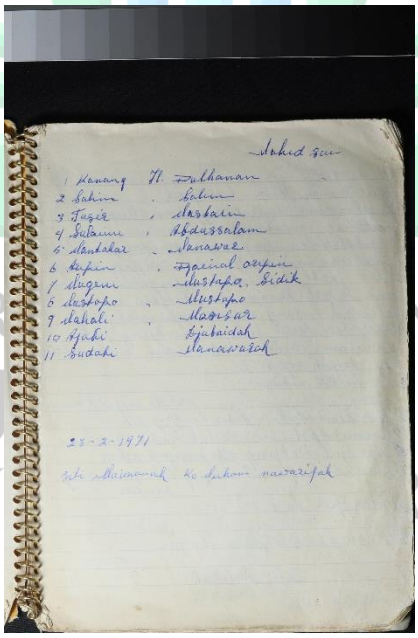

Gambar Lampiran 4 Arsip Bani Musthofa: Dokumentasi Pribadi H. Musthofa Sidik, Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Tahun 1971.
(Sumber: Dokumen Pribadi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar Lampiran 5 Foto Jamaah Haji Banyuwangi di Maktab Syekh Mukhtar Sidayu
(Sumber: Arsip Keluarga Kiai Haji Mahfud)

Gambar Lampiran 6 Foto Jamaah Haji Banyuwangi di Maktab Syekh Mukhtar Sidayu
(Sumber: Arsip Keluarga Kiai Haji Mahfud)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

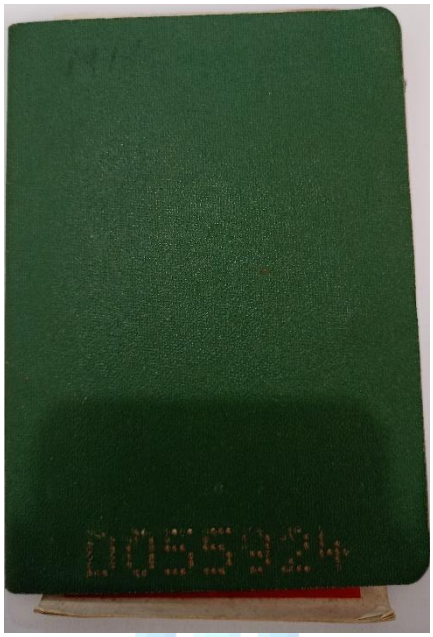

Gambar Lampiran 7 Paspor Turis Tahun 1979 Milik KH. Muwafiq Amir
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Gambar Lampiran 8 Paspor Turis Tahun 1979 Milik KH. Muwafiq Amir
(Sumber: Dokumen Pribadi)

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar Lampiran 9 Ijin Berangkat ke Arab Saudi Selama Musim Haji pada Bagian Paspor Turis Tahun 1979 Milik KH. Muwafiq Amir
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Gambar Lampiran 10 Tiket Bagasi dan Tiket Pesawat KH. Muwafiq Amir Tahun 1979
(Sumber: Dokumen Pribadi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar Lampiran 11 Paspor KH. Muwafiq Amir 1998
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Gambar Lampiran 12 Paspor Haji KH. Muwafiq Amir 2004
(Sumber: Dokumen Pribadi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar Lampiran 13 Paspor Haji KH. Muwafiq Amir 2008
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Gambar Lampiran 14 Paspor Haji KH. Muwafiq Amir 2014
(Sumber: Dokumen Pribadi)

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Gambar Lampiran 15 Arsip Bani Musthofa: Paspor Haji Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa 1981
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Gambar Lampiran 16 Arsip Bani Musthofa: Surat Tanda Ingin Pergi Haji Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa 1981
(Sumber: Dokumen Pribadi)

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

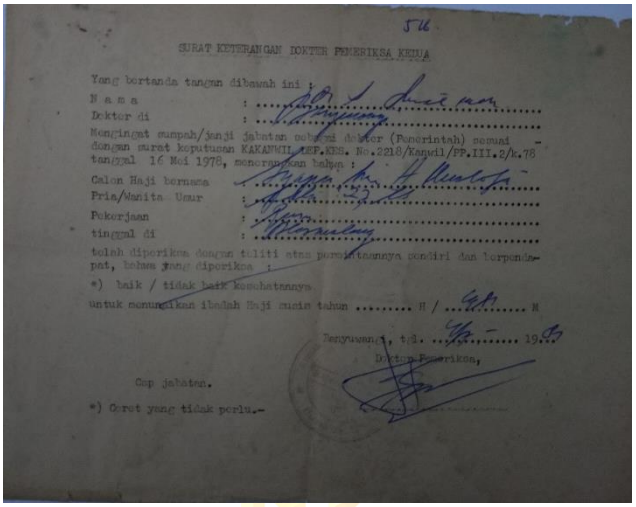

56

SURAT KETERANGAN DOKTER PEMERIKSA KEJUA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....

Dokter di : .....

Mengingat sumpah/janji jabatan sebagai dokter (Pemerintah) sesuai dengan surat keputusan KAKANWIL DEP.KES. No.2218/Kanwil/PP.III.2/k.78 tanggal 16 Mei 1978, menerangkan bahwa :

Calon Haji bernama : .....

Pria/Wanita Umur : .....

Pekerjaan : .....

tinggal di : .....

telah diperiksa dengan teliti atas pemeriksaannya sendiri dan berpendapat, bahwa yang diperiksa :

*) baik / tidak baik kesehatannya

untuk menunaikan ibadah Haji cuaca tahun ..... H / ..... M

Bangkalan, tgl. ..... 19..

Dokter Pemeriksa,

Cap jabatan.

*) Coret yang tidak perlu.-

Gambar Lampiran 17 Arsip Bani Musthofa: Surat Cek Kesehatan Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa Tahun1981
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Gambar Lampiran 18 Arsip Bani Musthofa: Paspor Haji Hj. Fatemah 1981
(Sumber: Dokumen Pribadi)

UNI ERI
KIAI DDIQ
J E M B E R

Pertama

Lembar pertama : Calon haji yhs.
Lembar kedua : Gub/Koruhaj
Lembar ketiga : Bup/Koruhaj
Lembar keempat : Ditjen Haji

SURAT TANDA INGIN PERGI HAJI

I. Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama (huruf cetak) : PATIMAH BINTI HAJI
Tempat & tgl. lahir umur : BANJARMASIN ... BN/BT BANJARMASIN ... tgl. ... 40 Th.
Pekerjaan : Tani
Jenis kelamin : Wanita ... (Pria, Wanita).
Domisili (alamat) : JALAN BANJARAN KECAMATAN BANJARMASIN
Nama Jalan/Desa RT. RW. :
Kelurahan : ALALAK ... Kecamatan : BANJARMASIN
Kabupaten/Kodya : BANJARMASIN
Propinsi : JAWA TIMUR
Pernah pergi Haji : (sudah pernah/belum pernah).
Dimahrami/ditanggung oleh : SYAFRI BIN HAJI SUNUSI
Hubungan keluarga : (suami, ayah kandung, kakek, anak, paman dsb.).
dengan ini menyatakan :
1. ingin pergi haji pada tahun diatas dan telah menyetor ongkos haji laut/udara sebesar Rp. 3.000.000,-.( ... ) pada Bank ... No. ... Tgl. 10 Juni 1981 ( bukti terlampir). **)
2. bersedia mentaati sepenuhnya peraturan-peraturan dan kerentuan yang berwajib.

Banjarmasin, 10 Juni 19 81
Tanda Tangan
PATIMAH BINTI HAJI SYAMSUP BINANTIP

**) Melebihi 10 (sepuluh) hari Tanggal Penyetoran tidak terjamin keberangkatannya.

SURAT TANDA PERGI HAJI

II. Pernyataan tersebut (I) diatas telah dibukukan dengan: STPH No. 573 identitas yang bersangkutan terang pada kami.
Pemberangkatan akan diatur kemudian setelah segala persyaratan dipenuhi oleh yang bersangkutan.
Formulir ini supaya diajukan kembali kepada kami pada tgl. ...
untuk keperluan pengisian segi (III) dibawah, dan lain-lain yang perlu.

Banjarmasin, 10 Juni 19 81
*) BUPATI/WALIKOTAMADYA/KORUHAJ
Cap resmi
*) atau instansi yang sederajat.

TELAH/AKAN DIBERANGKATKAN

III. Nama tersebut (I) diatas telah/akan diberangkatkan dengan :
Kapal Laut/Udara : KAPAL UDARA
pada tanggal : 26 SEPTEMBER 1981.
dari pelabuhan : LANUDAL JUANDA SURABYA.
P.P.H. Nomor tgl. : 1303348

BANJARMASIN, 25-9-1981.
*) BUPATI/WALIKOTAMADYA/KORUHAJ
Cap resmi
a hari sebelum tgl. tertera diatas harus
ah berada di Asrama kota pelabuhan

Gambar Lampiran 19 Arsip Bani Musthofa: Surat Tanda Ingin Pergi Haji Hj. Fatemah 1981
(Sumber: Dokumen Pribadi)

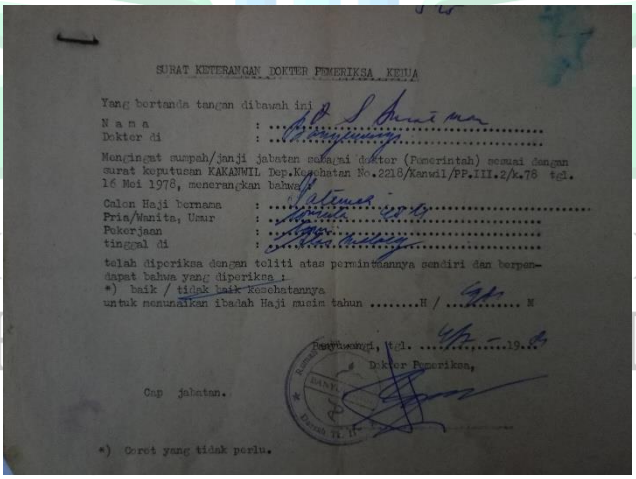

SURAT KETERANGAN DOKTER PEMERIKSA KEUA

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : [illegible]
Dokter di : Banjarmasin

Mengingat sumpah/janji jabatan sebagai dokter (Pemerintah) sesuai dengan surat keputusan KAKANWIL Dep.Kesehatan No.2218/Kanwil/PP.III.2/K.78 tgl. 16 Mei 1978, menerangkan bahwa :

Calon Haji bernama : Fatemah
Pria/Wanita, Umur : Wanita
Pekerjaan : [illegible]
tinggal di : [illegible]

telah diperiksa dengan teliti atas permintaannya sendiri dan berpendapat bahwa yang diperiksa :
*) baik / tidak baik Kesehatannya
untuk menunaikan ibadah Haji musim tahun .....H / ..... M

Banjarmasin, tgl. ..... 19..
Dokter Pemeriksa,

Cap jabatan.

*) Coret yang tidak perlu.

Gambar Lampiran 20 Arsip Bani Musthofa: Surat Cek Kesehatan Hj. Fatemah Tahun1981
(Sumber: Dokumen Pribadi)

UNI ... ERI
KIAI ... DDIQ

Gambar Lampiran 21 Wawancara Kepada Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa (kiri) dan KH. Muwafiq Amir (kanan) pada Tanggal 16 November 2023
( Sumber: Dokumen Pribadi)

Gambar Lampiran 22 Wawancara Kepada KH. Umar Abdullah pada Tanggal 16 November 2023
(Sumber: Dokumen Pribadi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar Lampiran 23 Wawancara Kepada H. Subeki (kiri) dan Hj. Siti Umroh (kanan) pada Tanggal 17 November 2023
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Gambar Lampiran 24 Wawancara Kepada H. Subeki (kiri) dan H. Maliki (kanan) pada Tanggal 19 November 2023
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Gambar Lampiran 25 Berkunjung ke Kementrian Agama Banyuwangi
(Sumber: Dokumen Pribadi)

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Malang Pos 23 Oktober 1953

# DJEMAAH HADJI 1954

## Hanja diambil dari mereka jg. '53 tidak mendapat kesempatan

**Kementerian Agama mengumumkan, bahwa mengingat besarnja djumlah pelamar tjalon Djemaah Hadji dalam musim hadji 1953 jang karena undian dan sebagainja tidak dapat diberangkatkan sebagai tjalon Hadji, ialah l.k. 30.000 orang, dan untuk menghindari ketjewaan2, kesulitan2 dan sebagainja dalam menghadapi musim hadji jang akan datang, maka untuk musim hadji 1954 tidak diadakan pendaftaran baru untuk menerima pelamar jang belum pernah mendaftarkan diri.**

Mereka jang telah mendaftarkan sebagai pelamar dalam tahun 1953 akan tetapi karena udjian/pemeriksaan/undian atau hal lain2 tidak djadi diberangkatkan sebagai tjalon Hadji, dan masih berhadjat pergi hadji dalam tahun 1954, diharuskan membaharui pendaftarannja.

Quotum untuk tahun 1954 bagi daerah2 jang tidak mempunjai sisa pelamar tjalon hadji musim 1953, akan diberikan kepada daerah jang masih mempunjai banjak sisa pelamar tjalon hadji musim 1953.

Pembaharuan pendaftaran tersebut dimulai pada tanggal 1 Nopember 1953 sampai pada hari penutupan jang akan diumumkan dikemudian hari dan diselenggarakan oleh instansi2 menurut peraturan2 jang berlaku untuk musim 1953.

Pada hari 24 Oktober

Arti-P

Oleh: Dag Hammarsk

„24 Oktober adalah Har Perserikatan Bangsa-Bangsa Hari ini telah ditetapkan oleh Sidang Umum dengan maksu untuk menjiar-njiarkan tudj an dan hasil2 jang telah ditj pal oleh PBB. Pada tanggal tersebut dalam tahun 19

Gambar Lampiran 26 Kebijakan Haji 1953/1954
(Sumber: Koran Malang Post, 23 Oktober 1953)

# Aturan untuk bangsa asing jang akan naik hadji 1954

UNTUK menghindarkan kesulitan2 dan guna lancarnja pekerdjaan2 dalam menjelenggarakan urusan haji, maka oleh menteri agama, menteri dalam negeri, kepala djawatan imigrasi, direktur Lembaga Alat2 pemajaran Luar Negeri dan direktur Bank Indonesia dikeluarkan instruksi bersama no. 7 tahun 1953 jang dengan mentjabut segala instruksi2, pengumuman2 dan sebagainja jang terdahulu mengenai hal2 jang dimaksud dibawah ini, menetapkan ketentuan2 dalam lingkungan kewasannja (kompetensinja) asing2 jang harus diketahui dan diperhatikan oleh bangsa asing jang mempunjai hasrat naik hadji dalam tahun 1954, beserta instansi2 dan sebagainja jang mengurusnja.

Dalam hal mendaftarkan (membaharui pendaftaran), bangsa asing itu mempunjai hak sama seperti bangsa Indonesia asli (lihat Instruksi bersama nr. 5 tahun 1953);

Isteri sah dari orang asing itu, kewarga-negaraannja adalah termasuk kewarga-negaraan suaminja. Umpamanja wanita Indonesia jang mempunjai suami bangsa Pakistan, maka kewarga-negaraannja wanita itu termasuk warga negara Pakistan, keadaan mana termasuk djuga anaknja jang sah dengan orang Pakistan itu.

Jang berkepentingan (bangsa asing) itu harus mempunjai paspor-negerinja jang sah dan berlaku; demikian pula surat2 imigrasi Indonesia;

Mengenai soal2 undian dan pemeriksaan2, bangsa asing itu tentang hak dan kewajibannja harus pula disama kan dengan bangsa Indonesia asli;

Bangsa asing jang menang dalam undian, harus menerima „surat izin pergi hadji" dari instansi (panitia) jang bersangkutan. Surat2 izin tersebut dengan surat2 berharga jang tersebut dalam alat 3 diatas oleh jang berkepentingan kemudian harus dibawa ke kantor imigrasi jang bersangkutan, agar kepadanja oleh kantor imigrasi tersebut dapat diberikan „exit dan re-entry permit".

Apabila surat2 berharga jang tersebut dalam alat2 3 dan 5 diatas sudah dapat di miliki semuanja oleh bangsa asing tersebut, maka jang berkepentingan itu harus datang ke Lembaga Alat2 Pemajaran Luar Negeri untuk meminta surat keterangan bahwa ia adalah „penduduk deplesen Indonesia" (devieze-zeninzezetene);

Semua surat2 jang bertalian dengan kepergiannja untuk naik hadji itu, kemudian oleh bangsa asing tersebut harus dibawa ke Bank Negara Indonesia jang bersangkutan;

Bank Negara Indonesia tersebut harus menerima pengongkosan naik hadji dari bangsa asing itu sebanjak jg ditetapkan, demikian bunji instruksi bersama tersebut.

## Divisi Ho adakan serangan sengit

Lebih dari 3000 orang serdadu Ho Chi Minh dalam beberapa gelombang telah melagadkan serangan serangan terhadap pos militer Uni Perantjis di Gia Loc dan hampir berhasil menghantjurkan perpat tab, demikian diumumkan oleh para pembesar di Hanoi pada hari Selasa.

Serangan tadi jang telah dimuli pada malam Mingu jbl. jakni 3 hari setelah pemerintah Perantjis memberi kepada Ho Chi Minh supaja mengemukakan djarak2 untuk mengakhiri perang Indo China jang sudah berlangsung selama 7 tahun, menurut laporan2 dilakukan oleh divisi ke 43 Ho Chi Minh dengan dibantu oleh kaum gerilja. Pos Gia Loc terletak dijalan kolonial ke-3 37 mil Tenggara Hanoi dan 4 mil sebelah Selatan Hai Duong.

Serangan Ho itu telah dapat dielakkan oleh pertahanan Gia Loc sesudah didatangkan suatu kolone berapis badja Uni Perantjis setagal balabantuan dan pesawat2 Perantjis mendjatuhkan bom2 napalm dan melepaskan tembakan2 terhadap serdadu Ho, jang terlibat dalam perang, jang timbul setelah pertempuran seorang lawan seorang, jang timbul setelah Gia Loc tak berhasil menahan gelombang2 serangan Ho. multaljurd perhahanan gelombang2 serangan Ho. Para pembesar di Hanoi djuga mengumumkan bahwa sebuah pos Uni Perantjis lainnja jang terletak 3 mil dari Gia Loc telah diuga diserang oleh pasukan2 Ho.

Mr. Tam

Manusia

Malang Post 9 Desember 1953

Gambar Lampiran 27 Kebijakan Haji Bangsa Asing 1954
(Sumber: Koran Malang Post, 23 Desember 1953)

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

# LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Achmad Thoriq dengan judul penelitian **"Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Pada Tahun 1970 – 1980."**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedian menjadi informan dalam penelitian yang berjudul **"Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Pada Tahun 1970 – 1980,"** yang ditulis oleh saudara Achmad Thoriq.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang bertanda tangan dibawah ini merupakan anak dari H. Musthofa Sidik.

Banyuwangi, 19 November 2023

Mengetahui

Anak Pertama

Hj. Siti Umroh

Anak Kedua

Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa

Anak Ketiga

H. Subeki, B.Sc.

Anak Keempat

H. Maliki

# LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Achmad Thoriq dengan judul penelitian **"Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Pada Tahun 1970 – 1980."**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedian menjadi informan dalam penelitian yng berjudul **"Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Pada Tahun 1970 – 1980,"** yang ditulis oleh saudara Achmad Thoriq.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 16 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E

Mengetahui

KH. Muwafiq Amir. BA

# LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Achmad Thoriq dengan judul penelitian **"Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Pada Tahun 1970 – 1980."**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedian menjadi informan dalam penelitian yng berjudul **"Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Pada Tahun 1970 – 1980,"** yang ditulis oleh saudara Achmad Thoriq.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMA
J E M B E

Banyuwangi, 16 November 2023

Mengetahui

Drs. H. Achmad Syafi'i Musthofa

# LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Achmad Thoriq dengan judul penelitian **"Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Pada Tahun 1970 – 1980."**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedian menjadi informan dalam penelitian yng berjudul **"Perjalanan Haji Jamaah Banyuwangi Pada Tahun 1970 – 1980,"** yang ditulis oleh saudara Achmad Thoriq.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 16 November 2023

Mengetahui

ZIDNIYATI, S.S., M.Pd.

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMA
J E M B E R

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Achmad Thoriq |
| NIM | 204104040014 |
| Program Studi | : Sejarah Peradaban Islam |
| Fakultas | : Ushuluddin, Adab dan Humaniora |
| Institusi | : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Desember 2023

Saya yang menyatakan

Achmad Thoriq

NIM. 204104040014

# BIODATA PENULIS

A. Identitas Penulis

| | |
|---|---|
| Nama | : Achmad Thoriq |
| Tempat/tanggal lahir | : Banyuwangi, 4 Oktober 2001 |
| Alamat | : RT. 1 RW 1, Dusun Karangasem, Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. |
| Fakultas | : Ushuluddin Adab dan Humaniora |
| Prodi | : Sejarah Peradaban Islam |
| NIM | : 204104040014 |

B. Riwayat Pendidikan

| | |
|---|---|
| TK | : Darma Wanita |
| SD | : SDN 1 Alasmalang |
| SMP | :SMPN 3 Rogojampi |
| MA | : MAN 2 Banyuwangi |

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Bidang Jaringan, Relasi, Komunikasi, dan Informasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Sejarah Peradaban Islam Periode 2022-2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R